

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TRIWULAN I 2026



**MEMPERKUAT RESPONS KEBIJAKAN, TRANSFORMASI, DAN
SINERGI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
LEBIH TINGGI DAN BERDAYA TAHAN**





LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA

Triwulan I 2026

Laporan Kelembagaan Bank Indonesia - Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia adalah laporan kinerja kelembagaan yang disusun sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	viii

BAB 1 Kelembagaan Bank Indonesia 1

1.1.	Profil Bank Indonesia	2
1.2.	Dewan Gubernur Bank Indonesia	3
1.3.	Organisasi Bank Indonesia	12
1.4.	Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia	16

BAB 2 Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia 21

2.1.	Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional	22
2.2.	Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan	25

BAB 3 Respons Kebijakan Bank Indonesia 29

3.1.	<i>Stance</i> Kebijakan Bank Indonesia	30
3.2.	Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia	31

BAB 4 Transformasi Bank Indonesia 35

4.1.	Transformasi Kebijakan	36
4.2.	Transformasi Kelembagaan	44

BAB 5 Capaian Kinerja Bank Indonesia 51

PS01	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	52
Boks 1.	Pelaksanaan “Ramadan Tenang, Harga Terkendali: Optimalisasi Kredit Pangan untuk Stabilisasi Pasar”	53

PS 02	Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	56
Boks 2.	Penguatan sinergi pengendalian inflasi pangan dalam TPIP/TPID melalui GPIPS di berbagai daerah	57
Boks 3.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 dengan Kementerian Keuangan	59
OPS 03	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	60
Boks 4.	Pelaksanaan <i>Strategic Surveillance Forum</i>	62
PS 04	Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	63
Boks 5.	Peluncuran Kajian Sistem Keuangan No. 46	65
PS 05	Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, dalam rangka memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	66
PS 06	Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan perlindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	69
Boks 6.	Peluncuran PIDI – DIGDAYA x Hackathon 2026	71
PS 07	Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi	73
PS 08	Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	77
Boks 7.	Pelaksanaan <i>Launching</i> AKSI KLIK dan AKU BISA SEJAHTERA	81
PS 09	Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional	82
Boks 8.	Penandatanganan BCSA Bank Indonesia-Bank of Korea	83
Boks 9.	Peran Bank Indonesia sebagai <i>co-chair</i> ASEAN SLC Meeting	86
PS 10	Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan, serta dukungan organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional	86
PS 11	Merumuskan dan implementasi landasan hukum, manajemen risiko, audit internal, dan komunikasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional	88
PS 12	Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional	89

Lampiran	93
Daftar Istilah	94
Daftar Singkatan	103

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan I 2026. Sebagai bagian dari Laporan Kelembagaan Bank Indonesia, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Laporan ini disusun sebagai perwujudan dari komitmen Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang kredibel dalam mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada triwulan I 2026, perekonomian dunia menghadapi tekanan yang semakin berat di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran serta serangan balasan Iran mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas dunia, mengganggu rantai pasok perdagangan global, serta memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Perkembangan tersebut meningkatkan tekanan inflasi global dan mempersempit ruang penurunan suku bunga kebijakan global, termasuk semakin tertundanya penurunan *Fed Funds Rate* (FFR). Di sisi lain, *yield US Treasury* tetap tinggi seiring besarnya defisit fiskal AS. Kondisi tersebut memicu peningkatan premi risiko investasi global dan mendorong pergeseran aliran modal ke aset *safe-haven*, terutama ke pasar keuangan AS. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) menguat, sementara mata uang negara *emerging markets*, termasuk Rupiah, makin tertekan. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I 2026 diwarnai dengan defisit neraca perdagangan migas dan *net outflow* aliran modal asing akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Perekonomian domestik juga masih menghadapi tantangan untuk terus memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui percepatan penurunan suku bunga perbankan guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan bagi perekonomian.

Di tengah tingginya ketidakpastian global tersebut, kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh 5,61% (yoy), ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, termasuk peningkatan konsumsi rumah tangga pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H serta paket stimulus Pemerintah. Ketahanan eksternal juga tetap terjaga meski perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya aliran keluar modal asing akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi dipicu konflik Timur Tengah. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui optimalisasi intervensi di pasar valas serta penguatan instrumen moneter. Inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1%, didukung oleh konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi bersama Pemerintah. Di sektor keuangan, pertumbuhan kredit tetap positif dengan ketahanan sistem keuangan yang terjaga baik, sementara transaksi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional dan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik Timur Tengah. Sepanjang triwulan I 2026, BI-Rate dipertahankan sebesar 4,75% disertai penguatan intensitas stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF), transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui penyesuaian *threshold* tunai beli valas terhadap Rupiah, peningkatan *threshold* jual DNDF/*Forward*, peningkatan *threshold* beli dan jual *swap*, yang berlaku mulai April 2026. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial tetap diarahkan secara akomodatif untuk mendorong

pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan, termasuk melalui penguatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna mendukung penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Seluruh respons bauran kebijakan tersebut diperkuat melalui sinergi erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, konektivitas sistem pembayaran, dan penggunaan mata uang lokal guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

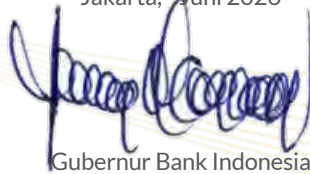
Transformasi kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia terus diperkuat untuk memastikan pencapaian tujuan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia mengembangkan kerangka kerja *macrofinancial linkage* yang mengintegrasikan kebijakan moneter dan makroprudensial dalam pengelolaan likuiditas guna memperkuat efektivitas transmisi suku bunga dan kredit. Penguatan transformasi kebijakan juga ditempuh melalui penyusunan kerangka koordinasi dan komunikasi kebijakan yang lebih terintegrasi, termasuk melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI), untuk mempercepat transmisi kebijakan dan memperkuat sinergi antarlembaga. Bank Indonesia turut mengembangkan pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dalam penyusunan laporan dan analisis kebijakan, pengembangan kodifikasi dan metadata kebijakan untuk mendukung integrasi data, serta penguatan infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan BI-ETP dan

publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang. Di bidang kelembagaan, transformasi diarahkan pada penguatan tata kelola, perencanaan strategis, proses kerja, dan kualitas sumber daya manusia, termasuk penguatan pada program pengembangan kompetensi dan penguatan sertifikasi profesi kebanksentralan guna memastikan Bank Indonesia tetap adaptif, tangguh, dan relevan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.

Di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan I 2026 sesuai tahapannya. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah inisiatif transformasi, baik di area kebijakan maupun di area kelembagaan. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk pengakuan secara internasional.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas mulia dalam menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan I 2026 ini dapat menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menyusun langkah bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan keberkahan, kesempurnaan, dan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

Jakarta, Juni 2026



Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo



RICKY P. GOZALI
Deputi Gubernur



AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur



PERRY WARJIYO
Gubernur



DESTRY DAMAYANTI
Deputi Gubernur Senior



FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur



THOMAS A. M. DJIWANDONO
Deputi Gubernur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia

Perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Serangan Israel dan AS ke Iran yang diikuti dengan serangan pembalasan Iran sejak akhir Februari 2026 makin menekan prospek pertumbuhan global. Melonjaknya harga minyak dan komoditas dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan lebih lambat menjadi 3,1% dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,2%, meskipun terjadi penurunan tarif resiprosal AS. Tekanan inflasi global meningkat dari 3,8% menjadi 4,1%, sehingga mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global, termasuk makin tertundanya penurunan Fed Funds Rate (FFR). *Yield US Treasury* terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS.

Pasar keuangan global juga memburuk dengan kenaikan premi risiko investasi global yang mengakibatkan aliran modal bergeser ke *safe-haven assets*, terutama ke pasar uang AS. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) menguat, sedangkan mata uang *emerging markets* makin tertekan. Berbagai lembaga internasional dan tokoh global seperti International Monetary Fund (IMF), European Central Bank (ECB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, serta UN Trade and Development menegaskan bahwa lingkungan strategis global pada triwulan I 2026 semakin berat dan diliputi ketidakpastian tinggi akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Perekonomian global dihadapkan pada risiko perlambatan pertumbuhan, meningkatnya tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi dan terganggunya rantai pasok global, serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan dan premi risiko investasi global. Berbagai lembaga tersebut juga menekankan bahwa konflik geopolitik dan fragmentasi ekonomi global berpotensi memperlemah perdagangan dunia, memperketat kondisi

keuangan global, dan meningkatkan tekanan terhadap negara berkembang serta *emerging markets*.

Pada triwulan I 2026, tantangan perekonomian domestik yang dihadapi semakin berat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi memicu penguatan dolar AS, meningkatnya premi risiko investasi global, serta keluarnya aliran modal asing dari *emerging markets*, termasuk Indonesia, sehingga memberikan tekanan besar terhadap nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal perekonomian. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I 2026 diwarnai dengan defisit neraca perdagangan migas dan *net outflow* aliran modal asing akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Berbagai lembaga internasional seperti OECD, IMF, dan World Bank menilai bahwa perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan dari meningkatnya tekanan inflasi, perlambatan perdagangan dan investasi global, volatilitas pasar keuangan, serta tingginya ketidakpastian kebijakan global akibat konflik geopolitik dan kenaikan harga energi. Sementara itu, S&P Global Indonesia Manufacturing PMI mencatat perlambatan aktivitas manufaktur sejalan dengan kelangkaan pasokan bahan baku, kenaikan harga material, dan melambatnya permintaan baru akibat gejolak global. Dalam kaitan itu, transmisi pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia masih perlu terus diperkuat melalui percepatan penurunan suku bunga perbankan guna mendorong pertumbuhan kredit, antara lain dengan mengurangi pemberian *special rate* kepada depositan besar.

Di tengah tingginya ketidakpastian global dan beratnya tantangan perekonomian domestik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik dan perlu terus diperkuat agar mampu tumbuh lebih tinggi secara berkelanjutan. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy), ditopang oleh kuatnya permintaan domestik,

termasuk konsumsi rumah tangga pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, stimulus Pemerintah, dan peningkatan investasi. Kinerja eksternal tetap terjaga dengan surplus neraca perdagangan barang pada triwulan I 2026 sebesar 5,5 miliar dolar AS ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas di tengah defisit neraca perdagangan migas, sementara aliran modal asing tercatat *net outflow* sebesar 0,8 miliar dolar AS akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tetap tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada akhir Maret 2026 melemah 1,88% (ptp) dibandingkan level akhir Desember 2025 dipengaruhi penguatan dolar AS dan keluarnya aliran modal asing dari *emerging markets*. Guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF, baik *off-shore* maupun DNDF dan pasar *spot*, serta optimalisasi instrumen moneter *pro-market*. Inflasi IHK pada Maret 2026 tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$, didukung oleh inflasi inti yang tetap rendah dan sinergi pengendalian inflasi bersama Pemerintah. Intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga baik, tecermin dari pertumbuhan kredit perbankan sebesar 9,49% (yoy), likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai, serta risiko kredit yang tetap rendah. Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan I 2026 juga tetap tumbuh tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Selain dinamika perekonomian global dan nasional, Bank Indonesia juga mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan. Sinergi bauran kebijakan bank sentral dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, serta kebijakan stabilitas sistem keuangan sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya dampak ketidakpastian global. Selain itu, diperlukan penguatan respons dan transformasi kebijakan dan kelembagaan untuk mengawal penyelesaian pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK, menjaga kecermatan, kepatuhan hukum, dan kepentingan Bank

Indonesia dalam berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh K/L lain, serta mengelola perubahan demografi pegawai melalui digitalisasi dan otomasi dengan sejumlah manfaat dan risikonya. Tantangan lingkungan strategis global, domestik, dan kelembagaan yang berat tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik terhadap rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan beratnya tantangan perekonomian domestik pada triwulan I 2026, bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat dan diarahkan untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional dan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan moneter difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi dengan mempertahankan BI-Rate sepanjang triwulan I 2026 sebesar 4,75%, disertai penguatan intervensi di pasar NDF *off-shore*, DNDF, dan pasar *spot*, serta pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur. Strategi operasi moneter *pro-market* dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) juga terus diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas, mendukung aliran masuk modal asing, dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan, termasuk melalui penguatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan ini ditujukan guna mempercepat penurunan suku bunga perbankan dan mendorong kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada penguatan keandalan infrastruktur, struktur industri, dan perluasan akseptasi digitalisasi sistem pembayaran sesuai *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, termasuk melalui penguatan inovasi digital dan

kerja sama pembayaran lintas negara. Untuk mendukung efektivitas seluruh kebijakan tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk penguatan kerja sama internasional, konektivitas sistem pembayaran, dan penggunaan mata uang lokal guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Transformasi Bank Indonesia

Di tengah tantangan dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks pada triwulan I 2026, transformasi kebijakan dan kelembagaan terus diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Di area kebijakan, Bank Indonesia mengembangkan kerangka kerja *macrofinancial linkage* yang mengintegrasikan kebijakan moneter dan makroprudensial dalam pengelolaan likuiditas guna memperkuat efektivitas transmisi suku bunga dan kredit serta menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan secara lebih terintegrasi. Bank Indonesia juga merumuskan konsep transmisi kebijakan yang lebih komprehensif melalui sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank (IKNB) melalui penyusunan kerangka kajian, pemetaan kanal transmisi, serta identifikasi peran sektor perbankan dan IKNB dalam mendukung transmisi kebijakan ke sektor riil guna meningkatkan efektivitas intermediasi, mendukung penyaluran pembiayaan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dan komunikasi kebijakan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) guna mempercepat transmisi kebijakan dan memperkuat sinergi antarlembaga. Dalam mendukung pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur data dan BI-ETP untuk mendukung transaksi operasi moneter dan repo valas,

termasuk pengembangan kurva imbal hasil transaksi pasar uang guna meningkatkan transparansi dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Di bidang sistem pembayaran, transformasi diarahkan pada penguatan digitalisasi sistem pembayaran sesuai *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030* melalui penguatan infrastruktur, inovasi digital, dan konektivitas pembayaran. Sementara itu, di area kelembagaan, transformasi difokuskan pada penguatan tata kelola, proses kerja, dan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan pemanfaatan *artificial intelligence (AI)*, penguatan integrasi data dan metadana kebijakan, transformasi program pengembangan kompetensi, serta penguatan sertifikasi profesi kebanksentralan guna memastikan Bank Indonesia tetap adaptif, tangguh, dan relevan menghadapi tantangan strategis yang terus berkembang.

Capaian Kinerja Bank Indonesia

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tahapan yang sudah direncanakan, didukung berbagai inisiatif transformasi dan respons kebijakan di tengah semakin beratnya tantangan lingkungan strategis global, nasional, dan kelembagaan. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, berbagai upaya penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan I 2026 telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk pengakuan secara internasional.





Komplek Perkantoran Bank Indonesia (Koperbi) Jakarta

BAB 1

KELEMBAGAAN BANK INDONESIA



1.1. Profil Bank Indonesia

Status dan Kedudukan

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Republik Indonesia diamanatkan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999, yang kemudian beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 12 Januari 2023. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan UU Bank Indonesia tersebut.

Dalam menjalankan independensinya, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Sebagai perwujudan dari tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, Bank Indonesia mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) selama 22 tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Hal ini merupakan bukti komitmen Bank Indonesia untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden, serta memublikasikannya kepada masyarakat.

VISI

“Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat, yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju.”

MISI

- 01 Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 02 Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 03 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 04 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional.
- 05 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing (valas), termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
- 06 Turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Bank Indonesia.
- 07 Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Tujuan dan Tugas

Tujuan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut ditempuh secara terintegrasi melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, yang didukung oleh pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi-keuangan inklusif termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, kebijakan internasional, serta sinergi yang erat dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan tugas di bidang moneter, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai Rupiah yang mencakup kestabilan harga barang dan jasa, serta kestabilan nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Stabilitas nilai Rupiah merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kepastian ekonomi, terjaganya daya beli masyarakat, serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang transparan dan *forward looking*, didukung oleh strategi operasi moneter *pro-market*, pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional.

Dalam menjalankan tugas di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Bank Indonesia juga menjaga ketersediaan uang Rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan pesatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan, Bank Indonesia terus memperkuat transformasi sistem pembayaran melalui implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, pengembangan infrastruktur pembayaran yang saling

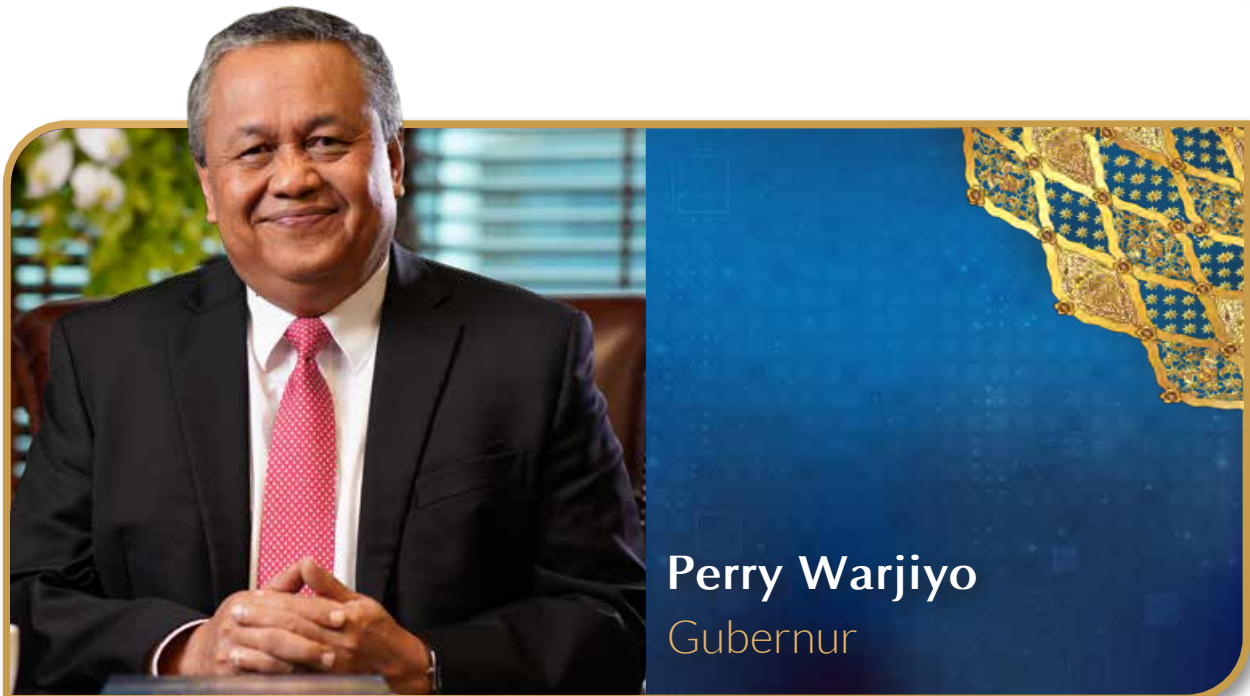
terhubung, terintegrasi, dan interoperabel, perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan struktur industri sistem pembayaran. Bank Indonesia juga terus mendorong inovasi, konektivitas pembayaran lintas negara, dan pengembangan Rupiah Digital untuk memastikan kedaulatan Rupiah tetap terjaga di era digital sekaligus mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Dalam melaksanakan tugas di bidang makroprudensial, Bank Indonesia turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial ditempuh melalui pengelolaan siklus keuangan, penguatan ketahanan sistem keuangan, dan dukungan terhadap penyaluran kredit/pembiayaan bagi perekonomian. Sejalan dengan perkembangan sistem keuangan yang semakin dinamis dan kompleks, Bank Indonesia terus menyempurnakan kerangka dan instrumen kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia bersama kebijakan moneter dan sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputy Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis. Dalam kaitan ini, RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Setiap anggota Dewan Gubernur mempunyai hak suara yang sama. Pengambilan keputusan oleh Dewan Gubernur di dalam RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial. Keputusan Dewan Gubernur dalam RDG merupakan keputusan Bank Indonesia dan mengikat seluruh anggota Dewan Gubernur.

Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputy Gubernur dengan profil sebagai berikut:



Perry Warjiyo
Gubernur

PERRY WARJIYO menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan 2023–2028. Sebelumnya, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018–2023 dan sebagai Deputi Gubernur untuk masa jabatan 2013–2018.

Sebelum menduduki jabatan Deputi Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Jabatan ini diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the South-East Asia Voting Group (SEAVG), yang berkedudukan di Washington DC, AS. Perry Warjiyo mempunyai karier yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa, dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo saat ini juga menduduki posisi sebagai *Chair of Asian Consultative Council – Bank for International Settlements (ACC-BIS)*, *Chairman of Executive Committee (EC)*

– Islamic Financial Services Board (IFSB), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (KAFEGAMA). Selain itu, Perry Warjiyo juga mewakili Bank Indonesia dan Indonesia dalam Keketuaan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting, serta di IMF, ASEAN, ASEAN+3, Financial Stability Board (FSB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Islamic International Liquidity Management (IILM). Selama tahun 2023, Perry Warjiyo aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

Perry Warjiyo juga telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional. Salah satu bukunya, yaitu *“Central Bank Policy: Theory and Practice”* yang ditulis bersama Dr. Solikin M. Juhro, mendapat pengakuan nasional dan internasional sebagai referensi penting dalam perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada tahun 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Gelar Master dan Ph.D. di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.



Destry Damayanti

Deputi Gubernur Senior

DESTRY DAMAYANTI menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019–2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024 Destry Damayanti kembali ditetapkan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024–2029 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2024. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS periode 2015–2019. Selain menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner (*ex officio*) Bank Indonesia pada LPS sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Destry Damayanti mengawali kariernya sebagai Asisten Peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) pada tahun 1988, lalu peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 1987–1990. Selanjutnya, Destry Damayanti bekerja di Kementerian Keuangan selama periode 1992–1997. Pada tahun 1997–2000, Destry Damayanti menjadi

ekonom di Citibank, yang kemudian diteruskan menjadi *Senior Economic Advisor* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000–2003. Kariernya sebagai ekonom berlanjut sebagai Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005–2015 dan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif untuk Mandiri Institute. Pada 2015–2019 Destry Damayanti juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selama tahun 2014–2015, Destry Damayanti juga menjabat sebagai Ketua Task Force Ketahanan Ekonomi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2015, Destry Damayanti dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015–2019. Pada tahun 2019–2021, Destry Damayanti dipercaya menjadi Ketua Iluni FEB UI dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban MASTRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) dari tahun 2015 sampai saat ini.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraihinya dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science pada *Field of Regional Science* diraihinya dari Cornell University, New York, AS, pada tahun 1992.



Aida S. Budiman
Deputi Gubernur

AIDA S. BUDIMAN menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan yang akan berlangsung hingga tahun 2027. Selain itu, Aida S. Budiman juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (*ex officio*) Bank Indonesia untuk sisa masa jabatan tahun 2020–2025, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.101/P Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner LPS.

Aida S. Budiman memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991 dan selama perjalanan kariernya telah memiliki pengalaman yang luas melalui berbagai penugasan, termasuk sebagai Wakil Direktur Eksekutif untuk South East Asia Voting Group (SEAVG) *office* di International Monetary Fund (IMF). Sebelum terpilih menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Kepala Departemen Internasional (DIInt) dari tahun 2014–2018, dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) pada tahun 2018, sekaligus sebagai Asisten Gubernur yang bertugas mengoordinir kebijakan strategis sektor moneter, bauran kebijakan Bank Indonesia, dan sinerginya dengan kebijakan nasional dalam kurun waktu tahun 2020–2022. Di bawah kepemimpinannya di DKEM, Aida S. Budiman memainkan peran kunci dalam merumuskan penguatan Kerangka Bauran Kebijakan Bank Indonesia, mengembangkan sektor prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,

serta memperkuat peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dan nasional.

Sebagai seorang ekonom, Aida S. Budiman telah menerbitkan sejumlah artikel dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan di berbagai jurnal internasional, termasuk di antaranya *The Falsification of Four Popular Hypotheses about the Asian Crisis*, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, dan *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Selain itu, Aida S. Budiman aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum dan seminar baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pernah memberikan berbagai kuliah umum di Perguruan Tinggi. Aida S. Budiman juga telah menjadi pengajar dalam berbagai diklat internal Bank Indonesia dan Sekolah Staf dan Komando TNI serta menjadi dosen pengajar di Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Saat ini, Aida S. Budiman menjabat sebagai Ketua Bidang II Perumusan Kebijakan di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menyelesaikan pendidikan pada bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di University of Southern California dan meraih gelar Master di bidang Ekonomi pada tahun 1996. Aida S. Budiman kemudian melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar Ph.D. di bidang Ekonomi pada tahun 2001.



Filianingsih Hendarta

Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 18 April 2023 untuk masa jabatan 2023–2028.

Filianingsih Hendarta memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1986. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi kebijakan strategis di sektor sistem pembayaran sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019–2023). Sebelumnya, Filianingsih Hendarta memimpin Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015–2019) dan Departemen Pengelolaan Moneter (2013–2015).

Sepanjang kariernya, Filianingsih Hendarta memimpin berbagai proyek berskala nasional dan internasional. Filianingsih Hendarta merupakan figur kunci dalam peluncuran Proyek Garuda yang mengawali eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Rupiah Digital. Filianingsih Hendarta juga memimpin implementasi *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia* (BSPI) 2025 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi dan integrasi ekonomi serta keuangan digital guna meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di hampir seluruh sektor di Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dipercaya untuk terlibat dalam berbagai forum strategis lintas Kementerian/Lembaga di tingkat domestik maupun internasional. Di dalam negeri, Filianingsih Hendarta berperan dalam berbagai forum, antara lain Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan Sektor Keuangan, Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Elektronifikasi Lintas Kementerian/Lembaga, serta berbagai komite internal Bank Indonesia. Di kancah internasional, Filianingsih Hendarta acapkali mewakili Bank Indonesia dalam berbagai fora, seperti G20, Bank for International Settlements (BIS), FSB, IMF, World Bank, ECB, dan Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP).

Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan pada bidang hukum di Universitas Airlangga, Filianingsih Hendarta melanjutkan pendidikan di Boston University dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration (Economics and Finance)* pada tahun 1992. Filianingsih Hendarta juga pernah aktif terlibat sebagai pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *Focus Group Moneter* dan Makroprudensial pada tahun 2018–2021. Saat ini, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Wakil Ketua 1 – Dewan Kehormatan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode tahun 2021–2025.



RICKY P. GOZALI menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/P Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.

Ricky P. Gozali memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1995 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dalam perjalanan kariernya selama lebih dari dua dekade, Ricky P. Gozali banyak terlibat dalam pengelolaan portofolio cadangan devisa negara, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, Ricky P. Gozali juga pernah ditugaskan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York selama empat tahun (2004–2008), dan menjadi *Chief Dealer* di pasar valuta asing. Pengalaman tersebut melengkapi pemahamannya atas dinamika pasar keuangan global secara menyeluruh.

Setelah kembali ke tanah air, Ricky P. Gozali melanjutkan penugasan strategis di Departemen Pengelolaan Devisa sebagai Kepala Divisi Manajemen Valuta Asing, Kepala Divisi Analisa Pasar Internasional, serta di Departemen Internasional sebagai Kepala Grup Hubungan Internasional dan Kepala Grup Kebijakan Internasional. Karier Ricky P. Gozali termasuk memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia di sejumlah provinsi, seperti Gorontalo (2018–

2019), Kalimantan Timur (2022–2023), Sumatera Selatan (2023–2025), dan terakhir di Provinsi DKI Jakarta (2025). Dalam kapasitas ini, Ricky P. Gozali berperan aktif dalam mendorong pengembangan UMKM, ekonomi syariah, digitalisasi sistem pembayaran, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Ricky P. Gozali juga berpengalaman di bidang keorganisasian dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) periode 2020–2023, serta mengoordinasikan pelaksanaan event Presidensi G20 Sektor Keuangan.

Ricky P. Gozali lahir di Jakarta pada tahun 1970. Setelah menempuh pendidikan di bidang Manajemen Universitas Pancasila, Ricky P. Gozali melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia pada tahun 2011. Ricky P. Gozali juga mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia–SESPIBI (2019) serta beragam program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan strategis di berbagai lembaga internasional, seperti *Strategic Leadership Program* di London Premier Center Spanyol (2024), Columbia University (2023), dan Bayes Business School London (2022). Selain itu, Ricky P. Gozali juga aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi kebanksentralan dan pasar keuangan baik di dalam maupun di luar negeri.



THOMAS A.M. DJIWANDONO menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 9 Februari 2026 untuk masa Jabatan 2026–2031.

Thomas memulai karier sebagai jurnalis sebelum beralih ke sektor keuangan dan bisnis. Di sektor keuangan, Thomas A.M. Djiwandono pernah berkarier sebagai analis keuangan, konsultan, serta menduduki berbagai posisi strategis di sektor swasta, baik di dalam maupun luar negeri.

Pada Juli 2024, Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kembali dipercaya menduduki jabatan tersebut pada Oktober 2024.

Selama menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK (*ex officio*) dari Kementerian Keuangan periode 2025–2026. Pasca dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono kembali dipercaya untuk menjabat Anggota Dewan Komisioner OJK (*ex officio*) dari Bank Indonesia sejak 17 Maret 2026.

Thomas A.M. Djiwandono lahir di Jakarta pada Mei 1972. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat, pada tahun 1994, serta meraih gelar Master di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat, pada tahun 2003.



JUDA AGUNG menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 untuk masa jabatan 2022-2027. Dalam perjalanan masa jabatannya, Jуда Agung mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia efektif sejak 13 Januari 2026 dan secara resmi mengakhiri masa jabatannya pada 15 Januari 2026 sesuai Keputusan Presiden No.3/P tahun 2026 tanggal tentang Pemberhentian Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya, Jуда Agung diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan resmi dilantik pada 5 Februari berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pengangkatan tersebut dilakukan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Wakil Menteri Keuangan sebelumnya dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Jуда Agung memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991 dan telah memiliki pengalaman yang panjang melalui sejumlah penugasan, baik di eksternal Bank Indonesia sebagai Economist di Netherlands Central Planning Bureau, Advisor to Executive Director di International Monetary Fund (IMF), dan Direktur Eksekutif IMF, yang mewakili 13 negara Southeast Asian dan Pacific, maupun di internal Bank Indonesia yang meliputi area riset ekonomi dan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, manajemen strategis, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebelum terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Jуда Agung menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP), sekaligus Asisten Gubernur yang membawahi Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan

Makroprudensial di Bank Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020-2022. Dalam kepemimpinannya di DKMP, Jуда Agung berperan penting untuk meletakkan pondasi dasar kerangka kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, termasuk dalam merumuskan sejumlah kebijakan Makroprudensial untuk mendukung inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan.

Sebagai ekonom, Jуда Agung telah memublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Review of International Economics*, *Applied Economics*, dan *Asian Economic Journal*. Salah satu publikasi yang pernah diterbitkan Jуда Agung adalah buku "*Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi*", yang menjadi salah satu referensi utama terkait kerangka kebijakan Makroprudensial di Indonesia. Jуда Agung juga aktif menjadi pembicara pada berbagai forum dan seminar internasional, antara lain IMF, FSB, BIS, Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) dan berbagai forum internasional lainnya, serta memberikan berbagai kuliah tamu di Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri. Jуда Agung juga pernah menjadi staf pengajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Jуда Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan di bidang Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Jуда Agung melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Master di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Jуда Agung kemudian melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Ph.D. di bidang Ekonomi pada tahun 1999.



1.3. Organisasi Bank Indonesia

Struktur Organisasi Bank Indonesia

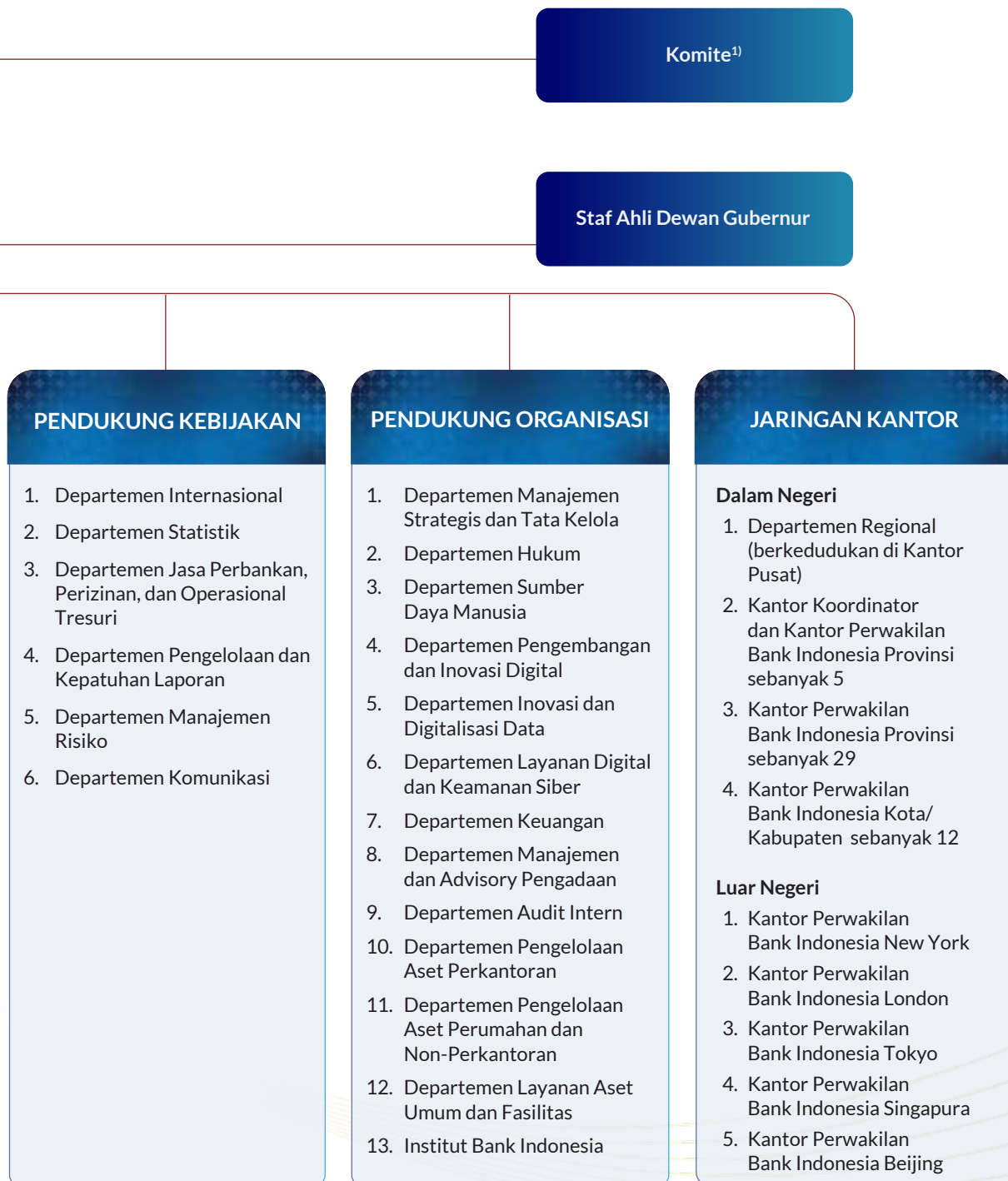
Per Maret 2026



Keterangan:

¹⁾ Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur

²⁾ Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara



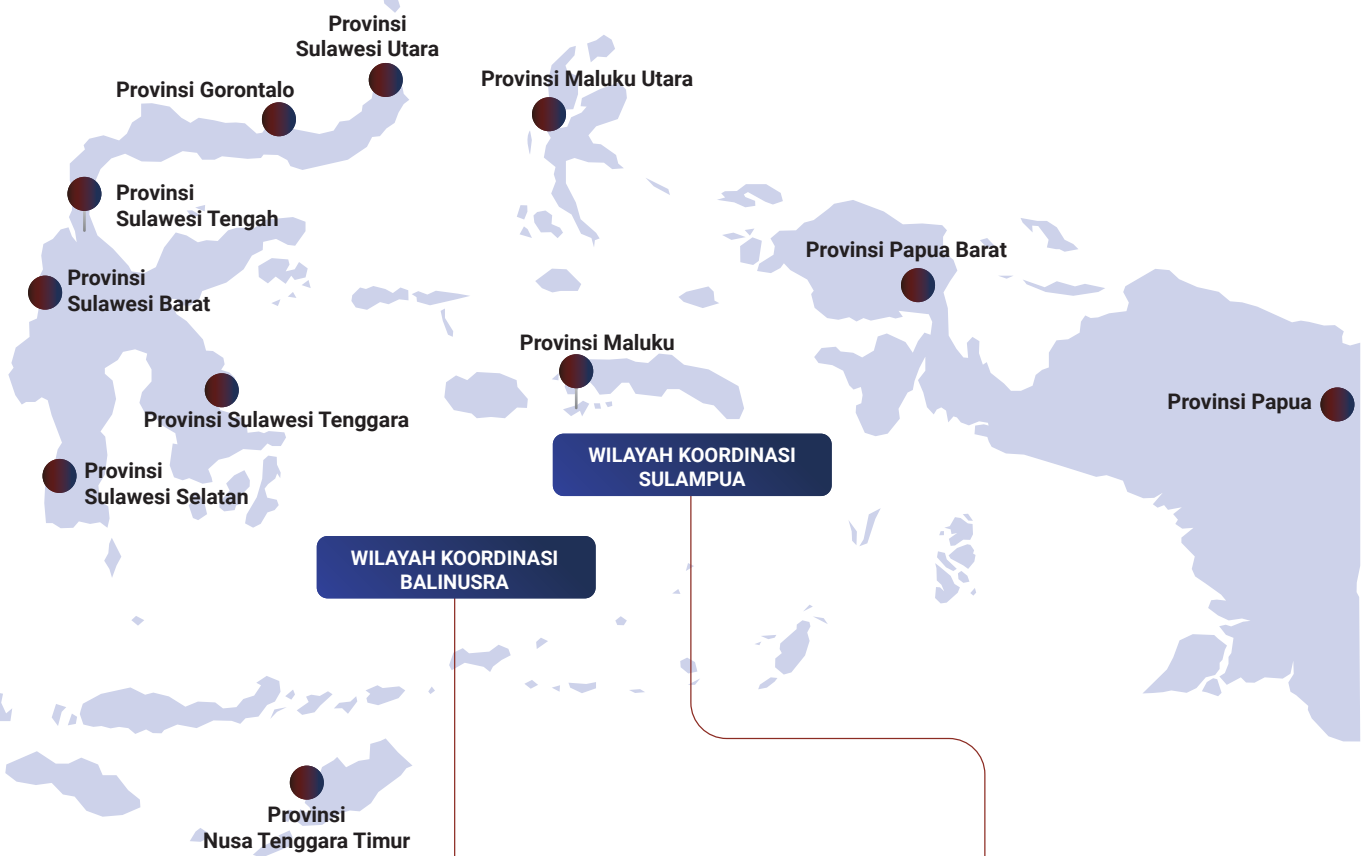
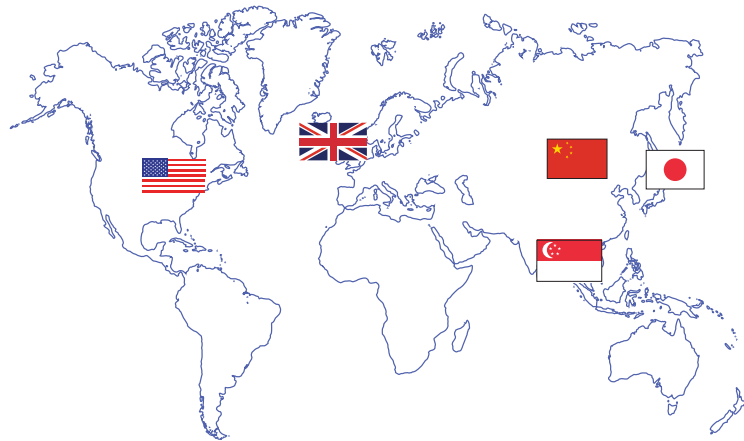
Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)

Per Maret 2026



KPw BI Luar Negeri

- KPw BI London
- KPw BI New York
- KPw BI Singapura
- KPw BI Tokyo
- KPw BI Beijing



**Kantor Koordinator dan
 KPw BI Provinsi Bali**

- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Kantor Koordinator dan
 KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan**

- KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
- KPw BI Provinsi Papua
- KPw BI Provinsi Maluku
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
- KPw BI Provinsi Gorontalo
- KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
- KPw BI Provinsi Maluku Utara
- KPw BI Provinsi Papua Barat

1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia

Per Maret 2026

KANTOR PUSAT BANK INDONESIA

MONETER

FIRMAN MOCHTAR	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
ERWIN GUNAWAN HUTAPEA	Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
RAHMATULLAH	Departemen Pengelolaan Devisa
AGUSTINA DHARMAYANTI	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
IMAM HARTONO	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

MAKROPRUDENSIAL

SOLIKIN M. JUHRO	Departemen Kebijakan Makroprudensial
IRMAN ROBINSON	Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
ANTON DARYONO	Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
ANASTUTY K.	Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

RYAN RIZALDY	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
DWI SUSLAMANTO	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
M. ANWAR BASHORI	Departemen Pengelolaan Uang
YUDI HARYMUKTI	Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, <i>Data Center</i> , dan <i>Business Resumption Site</i>

PENDUKUNG KEBIJAKAN

YOGA AFFANDI	Departemen Internasional
RIZA TYAS U. H.	Departemen Statistik
SUSSY WANDAYANI S.	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
MUSNI HARDI K. ATMAJA	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
GIRI KOORNIAHARTA P.	Departemen Manajemen Risiko
RAMDAN DENNY PRAKOSO	Departemen Komunikasi

PENDUKUNG ORGANISASI

MAL ISNAINI SRI MEYYANTI	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
IMAM SUBARCAH	Departemen Hukum
IDAH ROSIDAH A.	Departemen Sumber Daya Manusia
ENDANG TRIANTI	Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
DIAH ROSDIANA	Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data

RETNO PONCO WINDARTI	Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber
J. B. P. SIMANDJUNTAK	Departemen Keuangan
HARUM SETIAWATI	Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan
HARI WIDODO	Departemen Audit Intern
ARLYANA ABUBAKAR	Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran
BUDIYONO	Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non Perkantoran
EVA ADERIA S.	Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas
CLARITA LIGAYA ISKANDAR	Institut Bank Indonesia

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) DALAM NEGERI

ARIEF HARTAWAN	Departemen Regional
RUDY BRANDO HUTABARAT	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara
IBRAHIM	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur
R. ERWIN SOERADIMADJA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali
FADJAR MAJARDI	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
RIZKI ERNADI WIMANDA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
AGUS CHUSAINI	KPw BI Provinsi Aceh
MOHAMAD ABDUL MAJID IKRAM	KPw BI Provinsi Sumatera Barat
PANJI ACHMAD	KPw BI Provinsi Riau
TEDY ARIEF BUDIMAN	KPw BI Provinsi Jambi
BAMBANG PRAMONO	KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
WAHYU YUWANA HIDAYAT	KPw BI Provinsi Bengkulu
BIMO EPYANTO	KPw BI Provinsi Lampung
ROMMY SARIU TAMAWIWY	KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
RONY WIDIJARTO P.	KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
IWAN SETIAWAN	KPw BI Provinsi DKI Jakarta
MUHAMAD NUR	KPw BI Provinsi Jawa Barat
MOHAMAD NOOR NUGROHO	KPw BI Provinsi Jawa Tengah
SRI DARMADI SUDIBYO	KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
AMERIZA MA'RUF MUSA	KPw BI Provinsi Banten
HARIO KARTIKO PAMUNGKAS	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
ADIDOYO PRAKOSO	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

DONI SEPTADIJAYA	KPw BI Provinsi Kalimantan Barat
YULIANSAH ANDRIAS	KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
JAJANG HERMAWAN	KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
HASIANDO GINSAR MANIK	KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
JOKO SUPRATIKTO	KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
MUHAMAD IRFAN SUKARNA	KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
EDWIN PERMADI	KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
BAMBANG SATYA PERMANA	KPw BI Provinsi Gorontalo
EKA PUTRA BUDI NUGROHO	KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
WAHYU INDRA SUKMA	KPw BI Provinsi Maluku
HANDI SUSILA	KPw BI Provinsi Maluku Utara
WARSONO	KPw BI Provinsi Papua
SETIAN	KPw BI Provinsi Papua Barat
PRABU DEWANTO	KPw BI Lhokseumawe
AHMADI RAHMAN	KPw BI Pematangsiantar
RIZA PUTERA	KPw BI Sibolga
WIHJENG AYU RENGGANIS	KPw BI Cirebon
LAURA RULIDA EKA SARI P.	KPw BI Tasikmalaya
BIMALA	KPw BI Tegal
CHRISTOVENY	KPw BI Purwokerto
DWIYANTO CAHYO SUMIRAT	KPw BI Solo
YAYAT CADARAJAT	KPw BI Kediri
IQBAL REZA NUGRAHA	KPw BI Jember
INDRA KUSPRIYADI	KPw BI Malang
ROBI ARIADI	KPw BI Balikpapan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) LUAR NEGERI

WAHYU AGUNG NUGROHO	KPw BI New York
I GEDE PUTU WIRA K.	KPw BI London
IMADUDDIN SAHABAT	KPw BI Tokyo
WIDI AGUSTIN S.	KPw BI Singapura
YULIAN WIHANTORO	KPw BI Beijing





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

BAB 2

LINGKUNGAN STRATEGIS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA



2.1. Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional

Perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Serangan Israel dan AS ke Iran yang diikuti dengan serangan pembalasan Iran sejak akhir Februari 2026 makin menekan prospek pertumbuhan global. Melonjaknya harga minyak dan komoditas dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diprakirakan lebih lambat menjadi 3,1% dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,2%, meskipun terjadi penurunan tarif resiprokal AS. Tekanan inflasi global meningkat dari 3,8% menjadi 4,1%, sehingga mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global, termasuk makin tertundanya penurunan Fed Funds Rate (FFR). *Yield US Treasury* terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS.

Pasar keuangan global juga memburuk dengan kenaikan premi risiko investasi global yang mengakibatkan aliran modal bergeser ke *safe-haven assets*, terutama ke pasar uang AS. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) menguat, sedangkan mata uang *emerging markets* makin tertekan. Berbagai lembaga internasional dan tokoh global seperti International Monetary Fund (IMF), European Central Bank (ECB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, serta UN Trade and Development menegaskan bahwa lingkungan strategis global pada triwulan I 2026 semakin berat dan diliputi ketidakpastian tinggi akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Perekonomian global dihadapkan pada risiko perlambatan pertumbuhan, meningkatnya tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi dan terganggunya rantai pasok global, serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan dan premi risiko investasi global. Berbagai lembaga tersebut juga menekankan bahwa konflik geopolitik dan fragmentasi ekonomi global berpotensi memperlemah perdagangan dunia, memperketat kondisi keuangan global, dan meningkatkan tekanan terhadap negara berkembang serta *emerging markets*.

Pada triwulan I 2026, tantangan perekonomian domestik yang dihadapi semakin berat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi memicu penguatan dolar AS, meningkatnya premi risiko investasi global, serta keluarnya aliran modal asing dari *emerging markets*, termasuk Indonesia, sehingga memberikan tekanan besar terhadap nilai tukar Rupiah dan ketahanan eksternal perekonomian. Surplus neraca perdagangan triwulan I 2026 diwarnai dengan defisit neraca perdagangan migas dan *net outflow* aliran modal asing

akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Berbagai lembaga internasional seperti OECD, IMF, dan World Bank menilai bahwa perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan dari meningkatnya tekanan inflasi, perlambatan perdagangan dan investasi global, volatilitas pasar keuangan, serta tingginya ketidakpastian kebijakan global akibat konflik geopolitik dan kenaikan harga energi. Sementara itu, S&P Global Indonesia Manufacturing PMI mencatat perlambatan aktivitas manufaktur sejalan dengan kelangkaan pasokan bahan baku, kenaikan harga material, dan melambatnya permintaan baru akibat gejolak global. Dalam kaitan itu, transmisi pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia masih perlu terus diperkuat melalui percepatan penurunan suku bunga perbankan guna mendorong pertumbuhan kredit, antara lain dengan mengurangi pemberian *special rate* kepada deposito besar.

Di tengah tingginya ketidakpastian global dan beratnya tantangan perekonomian domestik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik dan perlu terus diperkuat agar mampu tumbuh lebih tinggi secara berkelanjutan. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dijaga di tengah perlambatan prospek perekonomian global akibat perang di Timur Tengah. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy) ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong oleh kenaikan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H serta paket stimulus Pemerintah untuk mendorong konsumsi. Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG). Investasi juga meningkat didorong oleh kinerja positif pada subkomponen kendaraan serta mesin dan perlengkapan. Ekspor tetap tumbuh positif sejalan dengan tetap baiknya permintaan beberapa mitra dagang utama dan peningkatan aktivitas pariwisata, termasuk wisatawan mancanegara. Ke depan, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia perlu makin diperkuat untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi dunia dan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik. Berbagai program Pemerintah yang berdampak kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja dengan tetap menjaga ketahanan fiskal terus dilakukan. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan

Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan dalam kisaran 4,9-5,7% (yoy).

Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia perlu terus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak perang Timur Tengah. Neraca perdagangan pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar 3,9 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan surplus pada Februari 2026 sebesar 1,7 miliar dolar AS, didukung oleh meningkatnya ekspor nonmigas. Secara keseluruhan, surplus neraca perdagangan barang turun dari 7,6 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025 menjadi 5,5 miliar dolar AS pada triwulan I 2026. Sementara itu, aliran modal pada triwulan I 2026 tercatat *net outflows* sebesar 0,8 miliar dolar AS akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi dipicu konflik Timur Tengah. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, sinergi kebijakan untuk memperkuat kinerja neraca pembayaran perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjaga ketahanan eksternal perekonomian di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang Timur Tengah. Bank Indonesia memprakirakan defisit transaksi berjalan 2026 dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp16.995 per dolar AS, melemah 1,88% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Desember 2025. Memburuknya kondisi global akibat perang Timur Tengah berdampak pada pelemahan nilai tukar dan keluarnya arus modal dari negara-negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Guna tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi baik transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri (*off-shore*) maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar dalam negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga mengoptimalkan seluruh instrumen moneter untuk meningkatkan aliran masuk modal asing guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui penyesuaian *threshold* tunai beli valas terhadap Rupiah, peningkatan *threshold* jual DNDF/*Forward*, peningkatan *threshold* beli dan jual *swap*, yang berlaku mulai April 2026. Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali. Inflasi IHK pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48% (yoy), dan tetap berada di dalam kisaran sasaran inflasi sebesar 2,5±1%. Inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,52% (yoy) seiring tetap terjaganya ekspektasi inflasi sesuai dengan sasaran didukung konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat sebesar 4,24% (yoy), tetap terjaga didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama di tengah peningkatan permintaan pada periode perayaan HBKN Idulfitri 1447 H. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat sebesar 6,08% (yoy) dipengaruhi minimalnya kebijakan harga yang diatur Pemerintah serta berakhirnya faktor temporer *base effect* dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga pada Januari dan Februari 2025. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter dalam menjaga inflasi serta berbagai kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan harga. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarnya.

Kebijakan moneter Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku bunga BI-Rate pada Januari, Februari, dan Maret 2026 dipertahankan sebesar 4,75% yang konsisten dengan fokus kebijakan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga terus diperkuat dengan intervensi di pasar *off-shore* melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder, didukung dengan penguatan kebijakan transaksi pasar valas. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter *pro-market* untuk mendorong peningkatan aliran masuk modal asing ke dalam negeri sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah. Posisi instrumen moneter SRBI tercatat sebesar Rp831,21 triliun pada 31 Maret 2026. Bank Indonesia juga membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, yang pada 2026 (hingga 31 Maret 2026) mencapai Rp90,05 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp50,61 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter.



Konferensi Pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan I 2025 di Jakarta.

Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas guna tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Implementasi penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (*lending channel*) serta bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru (*interest rate channel*). Insentif KLM yang diperoleh bank hingga minggu pertama April 2026 tercatat sebesar Rp427,9 triliun dengan alokasi pada *lending channel* sebesar Rp358,0 triliun serta *interest rate channel* sebesar Rp69,9 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp224,0 triliun, BUSN sebesar Rp166,6 triliun, BPD sebesar Rp29,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,8 triliun. Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Penguatan efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan terus ditempuh guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia telah berdampak terhadap penurunan berbagai jenis suku bunga. Suku bunga INDONIA menurun 217 bps sejak awal tahun 2025 menjadi sebesar 3,85% pada 31 Maret 2026. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan menurun masing-masing sebesar 174 bps, 175 bps, dan 177 bps sejak awal tahun 2025 menjadi sebesar 5,42%; 5,45%; dan

5,50% pada 27 Maret 2026. Sementara itu, imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun dan 10 tahun masing-masing tercatat sebesar 6,21% dan 6,84% pada 31 Maret 2026. Berbagai suku bunga perbankan masih dalam tren menurun didukung oleh kondisi likuiditas yang longgar. Suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 62 bps dari 4,81% pada awal Januari 2025 menjadi 4,19% pada Maret 2026. Sementara itu, suku bunga kredit tercatat turun sebesar 44 bps dari 9,20% pada awal Januari 2025 menjadi 8,76% pada Maret 2026. Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan koordinasi dalam mengurangi pemberian *special rate* kepada depositan besar yang saat ini mencapai 26,30% dari total DPK.

Pertumbuhan jumlah uang beredar tetap terjaga sejalan dengan kebijakan ekspansi likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia. Pertumbuhan M0 pada Maret 2026 tetap tinggi sebesar 11,8% (yoy). Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh giro Bank Umum di Bank Indonesia yang tumbuh sebesar 38,3% dan uang kartal yang tumbuh sebesar 8,6%. Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M0 pada Maret 2026 didorong oleh ekspansi fiskal dan strategi operasi moneter. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,7% (yoy), setelah pada Februari 2026 tumbuh sebesar 8,7% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit. Ke depan, pertumbuhan uang beredar akan terus dikelola sehingga tetap konsisten menjaga stabilitas dan

turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah.

Pertumbuhan kredit perbankan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 9,37% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85% (yoy), 4,38% (yoy), dan 5,88% (yoy). Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12% dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55% (yoy) pada Maret 2026. Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan tetap baik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (*lending requirement*) yang masih longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat strategi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan.

Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang Timur Tengah. Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Februari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,83%, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,17% (bruto) dan 0,83% (neto) pada Februari 2026. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan gejala global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital triwulan I 2026 tetap tinggi didukung oleh sistem

pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi atau tumbuh 37,69% (yoy) pada triwulan I 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet masing-masing tumbuh sebesar 11,82% (yoy) dan 17,13% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 116,43% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1,4 miliar transaksi atau tumbuh 30,82% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.519 triliun pada triwulan I 2026. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,46 juta transaksi atau tumbuh melambat -0,20% (yoy), di tengah nominal transaksi BI-RTGS yang tetap tumbuh 11,26% (yoy) mencapai Rp51.490 triliun pada triwulan I 2026. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 8,59% (yoy) menjadi Rp1.347 triliun pada triwulan I 2026.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga pada triwulan I 2026 ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri, sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun *wholesale*, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

2.2. Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan

Selain dinamika perekonomian global dan nasional di atas, Bank Indonesia juga terus mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga publik. UU P2SK telah mendorong penguatan peran dan

kewenangan Bank Indonesia dalam perekonomian, sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas kelembagaan sebagai wujud pelaksanaan tata kelola yang baik dan profesional. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa peluang transformasi ekonomi berjalan beriringan dengan tantangan lingkungan strategis yang menuntut respons kebijakan yang semakin kredibel, terintegrasi, dan adaptif. Lingkungan strategis dimaksud antara lain mencakup pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK, perlunya menjaga kecermatan, kepatuhan hukum, dan kepentingan Bank Indonesia dalam berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh K/L lain, meningkatnya dampak rambatan ketidakpastian global, serta perubahan demografi pegawai yang perlu diimbangi dengan digitalisasi dan otomasi beserta sejumlah manfaat dan risikonya.

Sejalan dengan dinamika tersebut, UU P2SK telah memperkuat landasan hukum bagi tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia telah menyelesaikan seluruh ketentuan yang diamanatkan oleh UU P2SK sesuai batas waktu yang ditetapkan pada awal Januari 2025. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penyempurnaan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia, termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK. Di samping itu, Bank Indonesia juga perlu memastikan kepentingan dan mandat kelembagaan tetap terjaga melalui keterlibatan aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh kementerian/ lembaga lain guna melindungi kepentingan Bank Indonesia. Upaya tersebut memerlukan koordinasi lintas fungsi, penguatan kapasitas analisis hukum, dan advokasi regulasi yang responsif agar setiap kebijakan dan regulasi baru tetap selaras dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia sesuai mandat UU.

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, penguatan bauran kebijakan bank sentral semakin penting untuk memitigasi dampak rambatan gejolak global, menjaga stabilitas ekonomi domestik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat, sementara pasar keuangan global menghadapi ruang penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang semakin terbatas di tengah masih tingginya *yield US Treasury* akibat besarnya defisit fiskal AS. Dampak kebijakan tarif resiprok AS dan eskalasi konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 semakin menekan prospek pertumbuhan global. Perkembangan tersebut telah mendorong kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok perdagangan antarnegara, menekan prospek pertumbuhan ekonomi global, serta meningkatkan tekanan inflasi dan volatilitas

pasar keuangan internasional. Pasar keuangan global juga memburuk dengan kenaikan premi risiko investasi global yang mengakibatkan aliran modal bergeser ke *safe-haven assets*, terutama ke pasar uang AS. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) menguat, sedangkan mata uang *emerging markets* makin tertekan, termasuk Indonesia.

Kondisi tersebut menuntut penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia fokus pada penguatan stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sinilah pentingnya bauran kebijakan bank sentral, khususnya antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Dari sisi kebijakan moneter, kebijakan suku bunga untuk pencapaian sasaran inflasi perlu didukung dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing. Hal ini agar stabilitas Rupiah tetap terjaga dan berdampak positif pada pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan fiskal di dalam negeri. Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi serta tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan bank sentral tersebut perlu dirumuskan ke dalam kerangka kerja dan pengaturan sebagai acuan dalam merumuskan respon yang diperlukan sesuai dengan dinamika perekonomian global dan nasional yang berkembang.

Bauran kebijakan ekonomi nasional juga perlu terus diperkuat untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional tersebut mencakup kebijakan fiskal dan sektor riil sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah, kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia, kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam KSSK, serta kebijakan transformasi sektor riil. Koordinasi fiskal dan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan, serta pengelolaan defisit dan pembiayaan fiskal yang sehat. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui pemberian insentif fiskal dari Pemerintah dan insentif likuiditas makroprudensial dari Bank Indonesia pada sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kebijakan transformasi sektor riil juga penting untuk makin diperkuat, yakni mencakup kebijakan reformasi struktural dan kebijakan industrialisasi. Penguatan kebijakan reformasi struktural ditempuh melalui perbaikan iklim investasi, penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan keandalan infrastruktur, serta penguatan kerja sama perdagangan dan investasi. Sementara kebijakan industrialisasi diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan nilai

tambah, memperkuat basis manufaktur, dan memperbaiki ketahanan eksternal.

Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi digital dan pergeseran demografi pegawai yang semakin didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z mendorong Bank Indonesia untuk mempercepat transformasi digital pada proses bisnis kebijakan dan kelembagaan. Transformasi tersebut diperlukan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang lebih *robust* dan *agile* di tengah lingkungan strategis yang semakin dinamis. Dengan demikian, respons kebijakan dapat dirumuskan secara lebih cepat dan tepat waktu dengan tetap menjaga kecermatan analisis, transparansi proses, dan akuntabilitas pengambilan keputusan, serta mengedepankan tata kelola yang baik dan profesional.

Dalam kaitan tersebut, transformasi digital ditempuh secara terintegrasi melalui *Integrated Digital Central Bank (IDCB)*. Implementasinya antara lain dilakukan melalui digitalisasi proses bisnis perumusan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran mulai dari satuan kerja hingga pembahasan pada Komite dan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan. Digitalisasi dilaksanakan secara *end-to-end*, mulai dari pengelolaan

input dan metadata, pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* untuk analisis dan proyeksi sejumlah indikator utama perekonomian—seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kredit perbankan—hingga penyusunan bahan dan pembahasan dalam forum pengambilan keputusan. Proses bisnis perumusan bauran kebijakan yang semula terdiri atas 8 (delapan) tahapan disederhanakan menjadi 3 (tiga) tahapan dan didukung oleh penguatan *Collaborative Digital Work Process (DWP)* di tingkat satuan kerja.

Di sisi lain, akselerasi digitalisasi dan pemanfaatan teknologi juga meningkatkan eksposur terhadap berbagai risiko, termasuk potensi ancaman dan serangan siber terhadap sistem serta informasi strategis Bank Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kerangka manajemen risiko teknologi informasi dan ketahanan siber, serta mekanisme respons insiden menjadi prioritas untuk menjaga keberlangsungan layanan dan integritas proses bisnis. Langkah tersebut diperlukan agar transformasi dan inovasi kelembagaan dapat berjalan optimal dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang memadai, sekaligus menjaga reputasi Bank Indonesia dalam mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon

BAB 3

RESPONS KEBIJAKAN BANK INDONESIA





Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bulanan di Jakarta.

3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dalam sinergi erat dengan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik Timur Tengah. Kebijakan moneter pada triwulan I 2026 ditempuh dengan mempertahankan suku bunga BI-Rate sebesar 4,75%, memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran, memperkuat kebijakan transaksi valuta asing, dan memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan moneter tahun 2026 akan ditempuh dengan empat instrumen pokok. *Pertama*, kebijakan suku bunga BI-Rate untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%. *Kedua*, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian global terutama akibat konflik di Timur Tengah. *Ketiga*, menjaga kecukupan cadangan devisa untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, didukung dengan pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional. *Keempat*, strategi operasi moneter *pro-market* untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi SBN di pasar sekunder secara terukur. Bank Indonesia akan

terus memperkuat koordinasi moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang longgar pada tahun 2026 untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan makroprudensial pada 2026 akan tetap longgar dan ditempuh melalui tiga langkah. *Pertama*, penguatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) *forward looking lending channel* dalam mendorong perbankan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. *Kedua*, percepatan penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan melalui efektivitas KLM *forward looking interest channel* dan respons yang diperlukan, termasuk koordinasi KSSK dalam penurunan suku bunga deposito besar (*special rate*) dan penurunan margin suku bunga kredit. *Ketiga*, penguatan surveilans sistemik untuk menjaga ketahanan perbankan dari dampak gejala global dan risiko operasional, termasuk dengan penguatan Protokol Manajemen Krisis (PMK) Terintegrasi. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK juga terus diperkuat untuk peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor prioritas, penguatan ketahanan SSK, serta keberlanjutan reformasi sektor keuangan sebagai tindak lanjut dari amanat UU P2SK.

Bank Indonesia akan terus mengakselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) mengacu pada *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030*. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung aktivitas

ekonomi melalui perluasan penerimaan pembayaran digital, termasuk Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ETKP), penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Arah kebijakan sistem pembayaran pada 2026 difokuskan untuk mempercepat kemajuan digitalisasi guna lebih mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui lima langkah pokok. *Pertama*, dari sisi infrastruktur sistem pembayaran, Bank Indonesia akan melakukan pengembangan *New BI-FAST* dan *fast payment* industri, modernisasi BI-RTGS, dan infrastruktur data pembayaran yang saling 3i (interkoneksi, integrasi, dan interoperabilitas) untuk perumusan kebijakan, pengembangan bisnis industri, dan kepentingan publik. *Kedua*, dari sisi konsolidasi industri, Bank Indonesia akan memperkuat digitalisasi sistem pembayaran pada perbankan dan mendorong *interlink* antara bank dan *fintech*, serta reformasi regulasi untuk konsolidasi industri sistem pembayaran dan penataan Industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) agar integritas pembayaran lebih kuat. *Ketiga*, dari sisi Inovasi dan akseptasi digital, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk inovasi dan akseptasi pembayaran digital secara seimbang dengan perlindungan konsumen melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia/PIDI, kampanye, dan edukasi-literasi masyarakat. *Keempat*, dari sisi internasionalisasi pembayaran, Bank Indonesia akan memperluas kerja sama internasional sistem pembayaran ritel baik secara bilateral maupun multilateral dalam pengembangan NEXUS. *Kelima*, dari sisi pengembangan Rupiah Digital, Bank Indonesia akan melanjutkan tahap eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada pengembangan *Securities Ledger*.

3.1. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Pada triwulan I 2026, kebijakan moneter diarahkan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran melalui:

- a) Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi baik transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik;
- b) Memperkuat strategi operasi moneter *pro-market* untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi SBN di pasar sekunder secara terukur;
- c) Memperkuat kebijakan transaksi pasar valas yang mulai berlaku April 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah melalui:
 - i) penyesuaian *threshold* tunai beli valas terhadap Rupiah dari USD100 ribu per pelaku per bulan menjadi USD50 ribu per pelaku per bulan,
 - ii) peningkatan *threshold* jual DNDF/*Forward* dari USD5 juta per transaksi menjadi USD10 juta per transaksi,
 - iii) peningkatan *threshold* beli dan jual *Swap* dari USD5 juta menjadi USD10 juta per transaksi;
- d) Memperkuat ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) melalui penyesuaian *threshold* kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (*outgoing*) dalam valas dari USD100 ribu menjadi USD50 ribu yang mulai berlaku April 2026.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif senantiasa diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada triwulan I 2026, respons kebijakan makroprudensial Bank Indonesia antara lain:

- a) Mempertahankan: (i) Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CcyB) sebesar 0%; (ii) Rasio intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum 35% dari modal bank; (iv) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4%; dan (v) rasio PLM syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%;
- b) Mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM serta bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendorong kredit/pembiayaan tinggi melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI);

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional. Pada triwulan I 2026, respons kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia yang ditempuh antara lain:

- a) Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI): Hackathon dan Digdaya (Digital Talenta Berdaya dan Berkarya) dan QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok pada 30 April 2026;
- b) Sinergi program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan

Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 dengan PIDI-Hackathon-Digdaya melalui perluasan inovasi sistem pembayaran terkini untuk meningkatkan efisiensi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda);

- c) Diseminasi Kebijakan Reformasi Pengaturan Industri Sistem Pembayaran dan PBI Industri Sistem Pembayaran pada 22 Januari 2026 bersama asosiasi dan pelaku industri sistem pembayaran sebagai bentuk penguatan struktur industri.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk

memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.





BAB 4

TRANSFORMASI BANK INDONESIA



Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi kebijakan dan kelembagaan yang telah ditempuh sejak tahun 2018 untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia di tengah lingkungan strategis yang semakin dinamis dan kompleks. Selain dihadapkan pada ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi, Bank Indonesia juga mencermati pesatnya perkembangan digitalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan demografi pegawai yang semakin didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Berbagai perkembangan tersebut menuntut Bank Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat sinergi bauran kebijakan, serta mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik, profesionalisme, dan akuntabilitas. Di sisi lain, dinamika kebutuhan organisasi dan perkembangan proses bisnis juga mendorong perlunya penajaman prioritas, penguatan kualitas implementasi, serta penyempurnaan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan agar senantiasa selaras dengan standar dan praktik terbaik. Mencermati berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia terus mempertajam dan mengimplementasikan berbagai agenda transformasi secara bertahap guna memperkuat peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendukung transformasi ekonomi nasional sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Pada triwulan I 2026, inisiatif transformasi kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial, percepatan transmisi kebijakan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan. Bank Indonesia juga terus memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta melanjutkan transformasi sistem pembayaran sesuai *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Sementara itu, pada area kelembagaan, transformasi difokuskan pada penguatan tata kelola, proses kerja, kualitas sumber daya manusia, dan digitalisasi kelembagaan. Berbagai upaya tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi, penguatan integrasi data, serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM untuk memastikan Bank Indonesia tetap adaptif, tangguh, dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

4.1. Transformasi Kebijakan

Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan bauran kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana amanat UU. Pada triwulan I 2026, penguatan transformasi bauran

kebijakan diarahkan pada penyempurnaan kerangka kebijakan, penguatan efektivitas transmisi kebijakan, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan infrastruktur dan digitalisasi yang mendukung proses perumusan dan implementasi kebijakan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga melanjutkan penyempurnaan berbagai pengaturan pada area kebijakan utama dan pendukung guna memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Berbagai upaya transformasi tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya stabilitas nilai Rupiah, terpeliharanya stabilitas sistem pembayaran, serta terjaganya stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melanjutkan penguatan kerangka kebijakan melalui pengembangan berbagai konsepsi dan infrastruktur pendukung pada area moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Penguatan juga dilakukan melalui penyusunan dan penyempurnaan pengaturan, antara lain terkait Resolusi Bank, Kebijakan Makroprudensial, Uang Rupiah Kertas dan Logam, serta ketentuan internal di bidang ekonomi dan keuangan daerah. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat infrastruktur data untuk meningkatkan transparansi harga di pasar uang konvensional dan syariah, sekaligus mengembangkan digitalisasi perumusan kebijakan melalui pemanfaatan data dan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence/AI*). Berbagai inisiatif tersebut dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan *business process re-engineering* (BPR) dan transformasi digital menuju *Integrated Digital Central Banking* (IDCB), guna mewujudkan proses bisnis yang lebih sederhana, terintegrasi, *agile*, dan responsif terhadap kebutuhan di era digital.

4.1.1. Transformasi di Bidang Moneter

1) Pengembangan Konsepsi/Kerangka Kerja Area Moneter

Bank Indonesia terus memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan dan mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia di tengah dinamika perekonomian dan sistem keuangan yang semakin kompleks. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan berbagai konsepsi dan kerangka kerja untuk menjadi landasan hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang moneter sesuai amanat UU BI jo. UU P2SK, serta sebagai langkah implementasi atas penguatan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, didukung oleh kebijakan pendukung guna mencapai tujuan Bank Indonesia.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia mengembangkan kerangka kerja *macrofinancial linkage* yang mengintegrasikan kebijakan moneter dan makroprudensial dalam pengelolaan likuiditas. Kerangka ini diarahkan untuk mengoptimalkan interaksi antara instrumen moneter dan makroprudensial sehingga pengelolaan likuiditas tidak hanya merespons siklus ekonomi secara agregat, tetapi juga mempertimbangkan dinamika intermediasi dan likuiditas perbankan. Melalui pendekatan ini, efektivitas transmisi kebijakan diharapkan semakin kuat dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Dari sisi transmisi suku bunga, kondisi likuiditas yang optimal akan meningkatkan efektivitas transmisi BI-Rate ke pasar uang dan perbankan. Sementara dari sisi kredit, kerangka ini bersifat *counter-cyclical*, yaitu membantu memitigasi risiko terjadinya *credit crunch* pada saat kebijakan moneter ketat, sekaligus mencegah ekspansi kredit yang berlebihan pada fase longgar, sehingga siklus keuangan dapat bergerak lebih selaras dengan siklus ekonomi.

2) Pengembangan Data/AI area Moneter

Dalam rangka mendukung penguatan perumusan kebijakan yang berbasis data (*data-driven policy*), Bank Indonesia terus mengembangkan pemanfaatan AI dan digitalisasi integrasi data. Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi proses analisis, mempercepat penyusunan laporan, serta memperkuat kualitas pengambilan keputusan yang lebih responsif dan akurat.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia mengembangkan pemanfaatan AI dan digitalisasi integrasi data di area moneter melalui:

a) Pengembangan *use case* untuk AIU (*nowcasting*)

Bank Indonesia tengah mengembangkan *use case* AI untuk mendukung penyusunan analisis beberapa variabel makroekonomi melalui pengembangan *nowcasting*. Pengembangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi perekonomian terkini secara *real-time* dengan menggunakan data berfrekuensi tinggi, baik data yang terstruktur maupun data tidak terstruktur, melalui pendekatan *machine learning*.

Pemanfaatan *nowcasting* mendukung identifikasi dini terhadap dinamika beberapa indikator makroekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan PDB negara mitra dagang utama, inflasi mitra dagang utama, pertumbuhan investasi domestik,

serta pertumbuhan uang beredar di Indonesia. Dengan demikian, proses perumusan kebijakan Bank Indonesia diharapkan dapat dilakukan secara lebih antisipatif dan bersifat *forward-looking*.

b) Pengembangan *use case* pemanfaatan AI (*report generator*) dan digitalisasi data

Bank Indonesia juga mengembangkan *use case* pemanfaatan AI dalam penyusunan *report generator*, baik untuk pihak eksternal maupun internal. Inisiatif ini memungkinkan proses penyusunan draf siaran pers dan konten komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia yang diperkaya dengan dukungan *Generative AI* sehingga menghasilkan komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia yang berbasis data terkini kepada publik, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. Selain itu, pemanfaatan AI dapat mendukung penyusunan draf laporan AIU (Analisis Indikator Utama) pada variabel makroekonomi secara lebih cepat dan berbasis data terkini untuk mendukung proses perumusan kebijakan Bank Indonesia.

c) Pengembangan kodifikasi dan metadata perumusan kebijakan untuk RDGB

Bank Indonesia tengah mengembangkan kodifikasi dan metadata sebagai dasar integrasi data dalam mendukung proses perumusan kebijakan. Inisiatif ini meliputi standardisasi definisi data, penyusunan taksonomi, dan pengembangan metadata terstruktur guna memastikan konsistensi, keterbandingan, dan kualitas data dalam analisis kebijakan. Integrasi data yang didukung kodifikasi dan metadata memungkinkan tersedianya basis data yang lebih terkelola dan terintegrasi sehingga membantu penyusunan bahan RDGB (Rapat Dewan Gubernur Bulanan) yang lebih lengkap, tepat sasaran, dan tepat waktu. Langkah ini juga membantu mengurangi fragmentasi data antar-satuan kerja serta meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan analisis data.

4.1.2. Transformasi di Bidang Makroprudensial

1) Pengembangan Konsepsi/Kerangka Kerja Area Makroprudensial

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja kebijakan makroprudensial melalui pengembangan berbagai konsepsi, kerangka kebijakan, dan penguatan koordinasi lintas sektor yang selaras

dengan arah transformasi Bauran Kebijakan Bank Indonesia. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat sinergi kebijakan dan meningkatkan efektivitas respons kebijakan terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia mengembangkan berbagai konsepsi, kerangka kebijakan, dan penguatan koordinasi lintas sektor di area makroprudensial melalui:

a) **Kerangka kerja transmisi & *interlink* kebijakan moneter dan makroprudensial (*macrofinancial linkage*) untuk pengelolaan likuiditas**

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia mengembangkan kerangka *macrofinancial linkage* yang mengintegrasikan transmisi dan *interlink* kebijakan moneter dan makroprudensial dalam pengelolaan likuiditas. Dari perspektif makroprudensial, kerangka tersebut mendukung penguatan implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui sinergi kebijakan yang lebih terintegrasi dan *forward looking* dalam pengelolaan likuiditas, intermediasi perbankan, serta transmisi kebijakan ke sektor riil. Selain itu, kerangka ini turut mendukung efektivitas pengelolaan likuiditas perbankan dan memperkuat resiliensi sistem keuangan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan volatilitas pasar keuangan global maupun domestik.

b) **Kebijakan makroprudensial selaras dengan OM *Pro-Market* dan pengembangan PUVA**

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia menyusun kajian kebijakan makroprudensial yang selaras dengan penguatan strategi OM *Pro-Market* dan pendalaman Pasar Uang Valuta Asing (PUVA). Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan melalui penguatan pasar keuangan, pengelolaan likuiditas yang lebih efisien, serta pendalaman instrumen pasar keuangan domestik. Dalam konteks tersebut, pengembangan kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas di sistem keuangan sekaligus mendorong pemanfaatan instrumen pasar keuangan domestik secara lebih luas. Sejalan dengan itu, pendalaman pasar keuangan terus didorong melalui pengembangan instrumen, perluasan basis investor dan pelaku pasar, serta peningkatan volume dan frekuensi transaksi.

Penguatan tersebut juga memiliki peran penting dalam meningkatkan resiliensi sistem keuangan. Pasar keuangan yang lebih dalam dan likuid dapat menyediakan alternatif pengelolaan dana dan risiko bagi pelaku pasar serta memperkuat kemampuan sistem keuangan dalam menyerap tekanan yang berasal dari dinamika global maupun domestik. Dengan demikian, pengembangan kebijakan makroprudensial yang terintegrasi dengan OM *Pro-Market* dan pendalaman PUVA tidak hanya mendukung efektivitas transmisi kebijakan, tetapi juga memperkuat efisiensi pasar, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c) **Kerangka kerja koordinasi dan komunikasi untuk mempercepat transmisi kebijakan**

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia menyusun kerangka kerja koordinasi dan komunikasi kebijakan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan dilakukan melalui koordinasi yang lebih erat antar satuan kerja, harmonisasi perumusan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta strategi komunikasi yang lebih efektif dan kredibel kepada pelaku pasar dan pemangku kepentingan guna membentuk ekspektasi yang selaras dengan arah kebijakan.

Implementasi kerangka kerja tersebut diwujudkan melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI), yang telah diluncurkan pada triwulan I 2026. PINISI merupakan forum koordinasi dan komunikasi yang melibatkan kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan terkait. Melalui PINISI, Bank Indonesia mendorong penguatan sinergi kebijakan untuk meningkatkan intermediasi pembiayaan, mempercepat transmisi kebijakan ke sektor riil, serta mengatasi berbagai hambatan intermediasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini merupakan upaya konkrit dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui akselerasi intermediasi yang optimal, seimbang, dan inklusif.

d) **Konsep transmisi kebijakan sektor perbankan dan IKNB**

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia merumuskan konsep transmisi kebijakan yang lebih komprehensif melalui sektor perbankan dan industri keuangan nonbank (IKNB). Penguatan ini dilakukan melalui penyusunan kerangka kajian, pemetaan kanal transmisi, serta identifikasi peran sektor perbankan dan IKNB dalam mendukung transmisi kebijakan makroprudensial dan moneter ke sektor riil. Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas intermediasi, mendukung penyaluran pembiayaan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

e) **Perumusan kebijakan terkait resolusi bank selaras dengan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi**

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan kajian kebijakan sebagai landasan pembentukan pengaturan terkait resolusi bank yang selaras dengan Protokol Manajemen Krisis (PMK) Terintegrasi. Penguatan ini diarahkan untuk mendukung kesiapan kerangka penanganan krisis sektor keuangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan terkoordinasi antar otoritas. Selain itu, penyusunan kebijakan resolusi bank juga bertujuan memperkuat mitigasi risiko sistemik serta mendukung stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan yang selaras dengan perkembangan dinamika sektor keuangan dan kebutuhan pengelolaan krisis.

2) **Reformasi Regulasi Area Makroprudensial**

Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan terkait Kebijakan Makroprudensial yang sejalan dengan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI). Reformasi regulasi pada area makroprudensial dilakukan dalam rangka mencapai sasaran kredit atau pembiayaan yang optimal, sistem keuangan yang stabil, serta keuangan yang inklusif dan hijau guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penguatan ini mencakup penyempurnaan kerangka kebijakan, penguatan instrumen, serta pengembangan mekanisme implementasi yang lebih efektif dan *forward-looking*.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan Bank Indonesia berupa PBI, PADG, dan ketentuan internal untuk memperkuat instrumen RIM dan PLM. Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan mengenai RIM dan PLM untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan dalam rangka mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas serta mendukung ketahanan likuiditas perbankan. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian pengaturan berupa penerbitan PBI terkait acuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar yang terkait dengan pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah. Implementasi atas PBI tersebut didukung dengan penerbitan penyesuaian peraturan pelaksanaan PADG yang mengatur mengenai formula dan besaran sanksi kewajiban membayar serta teknis pelaksanaan pendebitan rekening giro rupiah dalam hal bank dikenai sanksi kewajiban membayar yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2026. Selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan internal yang mengatur penyesuaian perhitungan sanksi kewajiban membayar yang terkait dengan pemenuhan giro RIM syariah dan PLM syariah beserta penyesuaian mekanisme yang diperlukan.

Selain itu, dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis, Bank Indonesia tengah menyusun PBI terkait hubungan operasional Bank dalam Resolusi (BDR) dengan Bank Indonesia. PBI tersebut mengatur perumusan dan pelaksanaan penanganan BDR di Bank Indonesia agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang untuk mendukung resolusi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3) **Pengembangan Data/AI Area Makroprudensial**

Dalam rangka memperkuat proses perumusan kebijakan makroprudensial yang berbasis data dan *forward-looking*, Bank Indonesia terus mengembangkan pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi AI. Inisiatif ini diarahkan untuk mendukung kualitas analisis dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDGB), mempercepat identifikasi risiko sistem keuangan, serta meningkatkan ketepatan respons kebijakan terhadap dinamika ekonomi dan keuangan.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia mengembangkan pemanfaatan AI dan digitalisasi integrasi data di area makroprudensial melalui:

- a) Pengembangan kodifikasi dan metadata terkait integrasi data untuk perumusan kebijakan (RDGB)

Bank Indonesia mengembangkan kodifikasi dan metadata sebagai fondasi integrasi data dalam mendukung perumusan kebijakan makroprudensial. Penguatan ini dilakukan melalui standarisasi definisi data, penyusunan taksonomi, serta pengembangan metadata yang terstruktur untuk memastikan konsistensi, keselarasan, dan kualitas data yang digunakan dalam analisis kebijakan. Integrasi data yang didukung oleh kodifikasi dan metadata tersebut memungkinkan tersedianya basis data yang lebih terkelola dan terintegrasi, sehingga mendukung penyusunan bahan RDGB secara lebih komprehensif, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, langkah ini juga berkontribusi dalam mengurangi fragmentasi data antarsatker serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan dan analisis data.

- b) Pengembangan *use case* untuk AIU (*nowcasting*)

Dalam rangka memperkuat kemampuan analisis makroprudensial yang responsif terhadap dinamika terkini, Bank Indonesia mengembangkan *use case* AIU untuk *nowcasting*. Pengembangan ini bertujuan untuk menyediakan estimasi kondisi sistem keuangan dan perekonomian secara *real-time*, sebagai pelengkap analisis berbasis data historis. Melalui pemanfaatan data frekuensi tinggi dan pendekatan *machine learning*, *nowcasting* memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi tekanan pada sistem kebijakan makroprudensial, sehingga hasil *nowcasting* dapat menjadi input penting dalam perumusan kebijakan makroprudensial yang lebih antisipatif dan *forward-looking*.

- c) Pemanfaatan AI (*sentiment analysis*) dan digitalisasi integrasi data

Bank Indonesia juga memanfaatkan teknologi AI dalam bentuk *sentiment analysis* untuk menangkap persepsi dan ekspektasi pelaku pasar serta masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan sistem keuangan. Analisis ini dilakukan terhadap berbagai sumber data tidak terstruktur, seperti berita, laporan pasar, dan media digital, guna melengkapi analisis berbasis indikator kuantitatif. Pemanfaatan *sentiment analysis* didukung oleh digitalisasi integrasi data yang memungkinkan penggabungan

data terstruktur dan tidak terstruktur dalam satu ekosistem analisis yang terpadu. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat memperoleh *insight* yang lebih komprehensif dan mendalam dalam memantau stabilitas sistem keuangan serta merumuskan kebijakan makroprudensial yang lebih tepat sasaran.

4.1.3. Transformasi di Bidang Sistem Pembayaran

- 1) Pengembangan Konsepsi/Kerangka Kerja Area Sistem Pembayaran (SP)

Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan infrastruktur SP yang tangguh dan terintegrasi guna mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Pengembangan infrastruktur SP diarahkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, secara lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Upaya tersebut diimplementasikan melalui penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur SP ritel dan *wholesale*; yang mencakup eksplorasi BI Fast, BI-RTGS, *Cross-Border Payment* (Nexus), BI-DIC/PIDI, SI-PUR Terintegrasi, Pendalaman *Wholesale Securities Ledger*, rencana pengaturan Data Sistem Pembayaran, serta pengaturan industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melanjutkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran guna mendukung perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin dinamis. BI-FAST terus disempurnakan sebagai infrastruktur pembayaran ritel yang andal, cepat, dan efisien melalui pengayaan fitur serta perluasan *use case* guna memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin beragam. Sejalan dengan itu, pengembangan BI-RTGS terus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas sistem pembayaran nilai besar yang lebih modern, resilien, dan mampu mendukung kebutuhan transaksi yang semakin kompleks.

Bank Indonesia juga memperkuat pengembangan infrastruktur data sistem pembayaran melalui inisiatif SI-PUR Terintegrasi guna mendorong integrasi data dan sistem yang lebih optimal. Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan ketersediaan data dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih akurat dan tepat waktu, sekaligus memperkuat tata kelola data serta sinergi antarsistem di lingkungan Bank Indonesia. Penguatan infrastruktur pasar keuangan juga dilakukan melalui pendalaman *Wholesale Securities*



Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) Dlgdaya x Hackathon di Jakarta.

Ledger. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi surat berharga, sekaligus mendukung pengembangan instrumen dan mekanisme transaksi yang lebih modern dalam rangka memperkuat pendalaman pasar keuangan domestik.

Dalam rangka memperkuat konektivitas internasional, partisipasi Bank Indonesia dalam pengembangan *Cross-Border Payment (Nexus)* terus diperkuat sebagai upaya mendorong interkoneksi sistem pembayaran antarnegara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Proyek Nexus merupakan inisiatif Bank for International Settlements (BIS) melalui BIS Innovation Hub yang bertujuan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestik (*instant payment systems/IPS*) secara global guna meningkatkan efisiensi pembayaran lintas batas. Inisiatif tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung integrasi ekonomi dan keuangan kawasan serta memperlancar transaksi lintas negara.

Sejalan dengan penguatan infrastruktur dan konektivitas sistem pembayaran tersebut, Bank Indonesia juga terus memperkuat peran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) sebagai wadah kolaborasi untuk mendorong inovasi sistem pembayaran dan pengembangan talenta digital. Melalui berbagai inisiatif, seperti eksplorasi inovasi, penyelenggaraan *hackathon*, penguatan kapabilitas melalui program pengembangan talenta, serta pemanfaatan pendekatan *design thinking* dan *market intelligence*, PIDI diharapkan dapat mendukung lahirnya berbagai solusi pembayaran yang relevan dengan kebutuhan

masyarakat dan industri. Penguatan peran PIDI menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam membangun ekosistem inovasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di tengah akselerasi transformasi digital.

Berbagai inisiatif pengembangan dan eksplorasi tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan sistem pembayaran nasional yang terintegrasi, inovatif, dan berdaya saing, sejalan dengan arah *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030*. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan sistem pembayaran, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

2) Reformasi Regulasi Area Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus memperkuat kerangka regulasi sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas, efisiensi, dan integrasi sistem pembayaran nasional. Reformasi regulasi dilakukan melalui penyempurnaan berbagai pengaturan yang selaras dengan Bauran Kebijakan Bank Indonesia dan perkembangan ekosistem ekonomi-keuangan digital guna memastikan industri sistem pembayaran yang semakin andal, berdaya tahan, dan adaptif terhadap dinamika teknologi.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Rupiah Kertas dan Logam sebagai landasan pengaturan yang komprehensif dalam perencanaan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan uang

Rupiah. Ketentuan tersebut juga memperkuat pengelolaan kualitas uang melalui standar kelayakan edar dan mekanisme penggantian uang tidak layak edar guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Selain itu, pengaturan ini mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan uang Rupiah melalui penguatan koordinasi dengan perbankan dan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, penerbitan PBI ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan uang Rupiah yang modern, andal, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika ekonomi.

Bank Indonesia menyelenggarakan diseminasi Kebijakan Reformasi Pengaturan Industri Sistem Pembayaran dan PBI Industri Sistem Pembayaran kepada 203 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP) dan Penyelenggara Penunjang. Kegiatan yang berlangsung pada 22 Januari 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia dalam memperkuat pemahaman dan kesiapan industri terhadap arah baru reformasi regulasi di area sistem pembayaran, sejalan dengan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan mandat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Substansi utama reformasi pengaturan melalui penerbitan PBI No. 10 Tahun 2025 dan PADG No. 32 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran yang akan berlaku mulai 31 Maret 2026 tersebut mencakup penerapan kerangka Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, serta Infrastruktur Teknologi (TIKMI) sebagai acuan penilaian kinerja dan klasifikasi PSP, penataan aktivitas dan kepesertaan dalam infrastruktur sistem pembayaran ritel, pengaturan kerja sama PSP dengan pihak ketiga khususnya Penyelenggara Penunjang, serta penguatan pengawasan dan pemantauan. Melalui diseminasi ini, Bank Indonesia menegaskan tujuan reformasi regulasi untuk membentuk industri sistem pembayaran yang semakin konsolidatif, andal, berdaya tahan, dan mampu mengelola kompleksitas risiko di tengah pesatnya akselerasi transaksi digital, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara aman dan berkelanjutan.

3) Pengembangan Data/AI Area Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan SI-PUR Terintegrasi sebagai bagian dari upaya modernisasi dan integrasi sistem pengelolaan data dalam mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal. Inisiatif ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai sumber

data dan sistem yang sebelumnya tersebar, sehingga menghasilkan ekosistem data yang lebih terstruktur, konsisten, dan mudah diakses dalam mendukung kebutuhan operasional maupun perumusan kebijakan.

Pada triwulan I 2026, Pengembangan SI-PUR Terintegrasi dilanjutkan melalui penguatan infrastruktur data untuk meningkatkan integritas transaksi sistem pembayaran. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan arsitektur data yang lebih kokoh, standarisasi data, serta peningkatan kualitas pengelolaan data, sehingga setiap transaksi yang terjadi dalam sistem pembayaran dapat tercatat, dipantau, dan dianalisis secara akurat dan *real-time*. Penguatan infrastruktur data ini juga memungkinkan peningkatan kapabilitas dalam melakukan *monitoring*, pengawasan, serta mitigasi risiko transaksi secara lebih efektif, termasuk dalam mendeteksi anomali atau potensi penyimpangan. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran nasional dapat terus terjaga. Secara keseluruhan, pengembangan SI-PUR Terintegrasi dan infrastruktur data ini menjadi fondasi penting dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran serta memperkuat ketahanan dan stabilitas sistem keuangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan inovasi keuangan.

4.1.4. Transformasi di Bidang Kebijakan Pendukung

1) Pengembangan Konsepsi/Kerangka Kerja Area Kebijakan Pendukung

Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur dan kerangka kerja pendukung untuk meningkatkan efektivitas kebijakan serta mendukung pendalaman pasar keuangan domestik. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan infrastruktur data dalam rangka meningkatkan transparansi harga di pasar uang dan pasar uang syariah, serta melakukan pengembangan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP) untuk mendukung repo valas. Transparansi harga yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembentukan harga (*price discovery*), memperkuat kepercayaan pelaku pasar, serta mendukung pendalaman pasar keuangan domestik. Pengembangan pada repo pasar valas diharapkan dapat memperluas instrumen pengelolaan likuiditas valas sehingga meningkatkan fleksibilitas pelaku pasar dalam mengelola kebutuhan likuiditasnya.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia memperkuat infrastruktur data melalui pengembangan sistem

yang mendukung ketersediaan informasi harga bagi pelaku pasar. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menyusun konsepsi *capturing pricing* yang bersumber dari data berupa *pricing repo* dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder untuk selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk kurva imbal hasil (*yield curve*) transaksi pasar uang. Inisiatif publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang ini sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk melanjutkan reformasi suku bunga acuan domestik dan mendorong pengembangan menuju pasar keuangan yang modern, transparan, dan berbasis transaksi. Publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang diharapkan dapat menjadi *guidance rate* yang kredibel kepada pelaku pasar dalam transaksi repo dan SRBI, serta mendukung akselerasi pengembangan pasar *Overnight Index Swap* (OIS).

Selain itu, Bank Indonesia menyelesaikan tahapan pengembangan BI-ETP sebagai bagian dari penguatan infrastruktur PUVA yang terintegrasi dengan strategi operasi moneter (OM) *pro-market*. Pengembangan BI-ETP diarahkan untuk memfasilitasi transaksi OM dan Surat Berharga Negara (SBN), termasuk pengembangan instrumen repo valas Bank Indonesia dengan *underlying* SVBI dan SUVBI. Pengembangan ini bertujuan untuk memperluas instrumen pengelolaan likuiditas valas serta meningkatkan fleksibilitas pelaku pasar dalam mengelola kebutuhan likuiditasnya. Selain itu, pemanfaatan SVBI dan SUVBI sebagai *underlying* juga mendukung peningkatan aktivitas transaksi di pasar valas domestik serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Secara keseluruhan, penguatan infrastruktur data dan pengembangan BI-ETP tersebut merupakan bagian dari upaya strategis Bank Indonesia dalam menciptakan pasar uang yang lebih dalam, likuid, transparan, dan efisien, termasuk pada segmen pasar uang syariah, sehingga mampu mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2) Reformasi Regulasi Area Kebijakan Pendukung

Bank Indonesia terus memperkuat kerangka regulasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) sebagai bagian dari kebijakan pendukung dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia. Penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah dengan tetap berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kerangka kerja KEKDA melalui penajaman tujuan, sasaran, dan strategi KEKDA untuk

mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah secara lebih efektif. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada prinsip sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi. Mengacu pada prinsip sistem tata kelola tersebut, pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia terkait KEKDA didasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu: (i) bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; (ii) sejalan dengan mandat dan norma pada peraturan perundang-undangan dan/atau prosedur; (iii) merupakan bagian dari bauran kebijakan nasional; dan (iv) menerapkan transparansi kebijakan. Penyempurnaan kerangka kerja tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam ketentuan internal Bank Indonesia terkait KEKDA.

3) Pengembangan Data/AI Area Kebijakan Pendukung

Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan data dan infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) guna mendukung efektivitas kebijakan, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan transmisi kebijakan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan metadata dan infrastruktur *capturing data* yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas data, transparansi harga, serta efisiensi dan integritas transaksi di PUVA. Pengembangan *use case* metadata mencakup standardisasi definisi, struktur, dan klasifikasi data guna memastikan konsistensi dan keterbandingan data antar sumber, sehingga mendukung analisis dan perumusan kebijakan yang lebih akurat dan komprehensif, termasuk dalam rangka pengawasan pasar.

Bank Indonesia senantiasa memperkuat pengelolaan data dan infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) melalui pengembangan *use case* metadata, penyelesaian pengembangan BI-ETP, serta pembangunan Pusat *Data Capturing* untuk *pricing* PUVA. Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas data, transparansi harga, serta efisiensi dan integritas transaksi di PUVA. Dalam rangka mendukung integrasi dan standardisasi data, pengembangan *use case* metadata PUVA mencakup penyusunan definisi, struktur, dan klasifikasi data secara terstandar. Pengembangan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan data antar sumber data, sehingga dapat mendukung analisis yang lebih akurat dan komprehensif dalam perumusan kebijakan.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan metadata PUVA sebagai fondasi

integrasi data yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Inisiatif ini mendukung tersedianya data yang lebih berkualitas dan terintegrasi untuk kebutuhan analisis, pengawasan pasar, dan perumusan kebijakan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur *capturing data*, salah satunya adalah *pricing PUVA*, yang berfungsi sebagai sarana pengumpulan dan pengolahan data harga transaksi secara *real time*. Infrastruktur ini memungkinkan tersedianya informasi harga yang lebih representatif, akurat, dan *real-time* sehingga mendukung transparansi pasar dan proses *price discovery* yang lebih efisien. Bank Indonesia juga mengembangkan *capturing data* atas produk/transaksi dari ETP guna memperkuat ketersediaan dan kualitas data transaksi pasar secara lebih terintegrasi dan granular. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung pemantauan aktivitas pasar, penguatan analisis kebijakan, serta peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Secara keseluruhan, pengembangan metadata PUVA dan *capturing data* PUVA merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia dalam memperkuat infrastruktur data pada ekosistem PUVA yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi, guna mendukung efektivitas kebijakan moneter serta pendalaman pasar keuangan domestik.

4.2 Transformasi Kelembagaan

Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sesuai amanat UU P2SK. Penguatan tersebut dilakukan melalui strategi 3P, yaitu perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi pada seluruh area kelembagaan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia tetap efektif, kredibel, dan adaptif di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Transformasi kelembagaan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga untuk membangun institusi yang tangguh, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan.

Pada area organisasi dan proses kerja, transformasi difokuskan pada penguatan tata kelola yang terintegrasi, penyempurnaan kerangka perencanaan strategis, serta reformasi regulasi kelembagaan. Upaya tersebut didukung melalui penyederhanaan, standarisasi, dan digitalisasi proses bisnis guna mewujudkan proses kerja menjadi lebih ringkas, selaras, dan lincah. Sejalan dengan itu, penguatan landasan hukum dan pengelolaan informasi terus dilakukan

untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis didukung oleh ketentuan yang komprehensif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Transformasi kelembagaan juga ditopang oleh penguatan sumber daya manusia dan budaya kerja. Pengelolaan SDM diarahkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara lebih terencana dan berbasis data, dengan menekankan pada kualitas talenta, kesesuaian kompetensi dengan jabatan, serta penguatan kapasitas kepemimpinan. Di samping itu, pengembangan kapabilitas pegawai, digitalisasi layanan SDM, dan penguatan pengalaman kerja pegawai (*employee experience*) terus dilakukan agar peningkatan produktivitas berjalan seiring dengan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Seluruh penguatan tersebut didukung oleh transformasi digital yang terintegrasi melalui pengembangan ekosistem digital Bank Indonesia. Digitalisasi proses kerja, pemanfaatan *artificial intelligence* (AI), penguatan infrastruktur *cloud computing*, serta pengembangan *Integrated Digital Central Bank* (IDCB) diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Dalam implementasinya, inovasi teknologi digital senantiasa diimbangi dengan penguatan tata kelola, keamanan informasi, serta manajemen risiko guna memastikan transformasi digital memberikan manfaat yang optimal sekaligus menjaga keandalan dan resiliensi organisasi.

4.2.1. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja

Pada area organisasi dan proses kerja, transformasi diarahkan pada penguatan fungsi organisasi, proses kerja, dan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, selaras, dan adaptif, termasuk melalui penyempurnaan kerangka kerja dan berbagai ketentuan sebagai tindak lanjut implementasi UU P2SK. Upaya tersebut didukung oleh *streamlining* proses bisnis dan proses kerja berbasis digital guna mewujudkan proses kerja yang lebih sederhana, ringkas, terstandar, dan *agile* sesuai kebutuhan di era digital.

1) Pengembangan Konsepsi/Kerangka Kerja Area Organisasi dan Proses Kerja

Bank Indonesia terus memperkuat kualitas tata kelola kelembagaan melalui asesmen tata kelola terintegrasi dan penguatan kerangka perencanaan strategis. Upaya ini diarahkan untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan, pelaksanaan program, dan pencapaian kinerja secara menyeluruh, sehingga mendukung efektivitas organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melaksanakan asesmen tata kelola terintegrasi untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik dan profesional dalam seluruh proses bisnis. Asesmen dilakukan sesuai amanat Pasal 58 Undang-Undang Bank Indonesia melalui integrasi proses bisnis lintas fungsi tata kelola, optimalisasi kecukupan ketentuan dan dasar hukum, penguatan mekanisme *check and balances*, serta pengendalian internal yang terintegrasi dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan kepatuhan organisasi. Melalui asesmen tersebut, Bank Indonesia mengidentifikasi berbagai area penguatan tata kelola yang mencakup kecukupan mandat hukum dan ketentuan, keandalan manajemen risiko, dan kecukupan pengendalian intern. Hasil asesmen menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola yang terintegrasi, efektif, akuntabel, dan adaptif.

2) Reformasi Regulasi Area Organisasi dan Proses Kerja

Bank Indonesia terus memperkuat landasan hukum dan kerangka tata kelola kelembagaan melalui penyusunan ketentuan internal mengenai **Kewajiban Menjaga Informasi Rahasia (KMIR) serta pengembangan ketentuan dokumen hukum non peraturan**. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan kerangka regulasi dan instrumen hukum yang komprehensif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

Pada triwulan I 2026, penyusunan ketentuan internal mengenai KMIR telah memasuki tahap harmonisasi dengan ketentuan pengelolaan informasi yang berlaku di Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan terkait. Dalam kaitan ini, proses penyusunan telah melalui tahapan diskusi dan pendalaman dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi), serta berkoordinasi dengan satuan kerja terkait. Penyempurnaan difokuskan pada harmonisasi dengan ketentuan internal mengenai Pengaturan Informasi Bank Indonesia (PIBI) dan ketentuan terkait lainnya, standarisasi kepatuhan dan integritas kelembagaan, serta optimalisasi pengelolaan informasi rahasia untuk mendukung tata kelola Bank Indonesia yang aman, efektif, dan akuntabel. Melalui penyusunan ketentuan internal tersebut, Bank Indonesia diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan informasi rahasia yang terintegrasi, adaptif, dan akuntabel.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyusun ketentuan internal mengenai dokumen hukum non peraturan sebagai acuan dalam pengelolaan dokumen hukum non peraturan di Bank Indonesia. Penyusunan ketentuan tersebut dilakukan dengan pendekatan simplifikasi, standarisasi, dan sistemisasi guna mewujudkan pengelolaan dokumen hukum non peraturan yang harmonis, seragam, terintegrasi, dan efektif dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang baik. Ketentuan dimaksud diarahkan untuk mengatur tata kelola dokumen hukum non peraturan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, termasuk pengaturan mengenai klasifikasi, standarisasi, dan digitalisasi dokumen hukum non peraturan.

4.2.2. Transformasi SDM dan Budaya Kerja

Pelaksanaan digital *Business Process Re-engineering (BPR)* didukung penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui penyempurnaan ketentuan terkait SDM, penguatan kepemimpinan, pengembangan *new capabilities*, serta penguatan *employee value proposition (EVP)*. Transformasi SDM dilakukan melalui pendekatan yang lebih terencana dan berbasis data, dengan menempatkan analisis kebutuhan SDM sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data terkait profil pegawai, kompetensi, kinerja, serta proyeksi kebutuhan organisasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan SDM yang diambil bersifat tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh, memastikan keberlanjutan kinerja, serta memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan di tengah dinamika lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis.

1) Pengembangan Konsepsi/Kerangka Kerja di Area SDM dan Budaya Kerja

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi SDM melalui pengembangan infrastruktur dan kapabilitas digital SDM Bank Indonesia. Upaya ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan SDM yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan selaras dengan kebutuhan organisasi, sekaligus memastikan kesiapan kompetensi pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Penguatan sistem informasi SDM terintegrasi yang memungkinkan pengambilan Keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*), serta meningkatkan akurasi dan kecepatan respons kebijakan SDM.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melakukan pengembangan konsepsi/kerangka kerja di area SDM dan budaya kerja sebagai berikut:

a) **Pengembangan Infrastruktur Digital SDM Bank Indonesia**

Bank Indonesia melanjutkan pengembangan konsepsi infrastruktur digital SDM untuk mendukung pengelolaan SDM yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Dalam kaitan ini, *Digital Collaboration Process (DCP)* dan *Digital Decision Making (DDM)* HRM Manajemen Karier terus dikembangkan agar kebijakan MSDM yang disusun dan diaplikasikan sejalan dengan teori dan praktik di level nasional dan internasional. DCP dan DDM HRM Manajemen Karier dapat merealisasikan digitalisasi pengambilan keputusan di level RDG atas Manajemen Karier Pegawai secara *end-to-end* dan *straight through process (STP)*.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga memperkuat strategi pemenuhan SDM berdasarkan prinsip *quality over quantity* serta *person to job fit* guna mendukung pencapaian visi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral digital terdepan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan aplikasi BI-PRESISI untuk mendukung proses pemilihan kandidat Kelompok Pegawai Potensial (KPP), serta promosi dan/atau reposisi pegawai sesuai siklus pemenuhan SDM. Pengembangan aplikasi BI-PRESISI diarahkan untuk meningkatkan tata kelola dari proses bisnis penetapan KPP dan promosi melalui digitalisasi dan *analytics* sesuai dengan kewenangan pejabat pemutus.

b) **Pengembangan Kapabilitas Digital SDM Bank Indonesia**

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia juga melakukan transformasi desain program pembelajaran melalui pengembangan kurikulum baru *Competency Development Program (CDP)*. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan kapabilitas pegawai untuk mewujudkan SDM yang profesional dan memiliki kepemimpinan strategis. Kurikulum baru ini dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai substansi dalam Bauran Kebijakan Bank Sentral (BKBS) dan Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK), serta disusun secara lebih terarah, terintegrasi, dan berjenjang berdasarkan level kompetensi dan *job family*. Dengan demikian, pengembangan kompetensi pegawai dapat semakin relevan

dan selaras dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier profesional pegawai.

Pengembangan CDP juga diselenggarakan dengan pembentukan Standard Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) kebanksentralan sebagai landasan pengembangan sertifikasi profesi dan penguatan standar kompetensi pegawai Bank Indonesia yang terukur dan diakui secara formal. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga memperkuat *Executive Central Banking Program (ECP)* sebagai bagian dari program pendidikan bagi pegawai kelompok pimpinan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis dan pemahaman mendalam terhadap perkembangan kebijakan serta praktik kebanksentralan terkini. Program ini juga terintegrasi dengan skema sertifikasi karier *Certified Central Banking Officer (CCBO)* guna mendukung pengembangan profesi kebanksentralan yang profesional dan diakui oleh publik maupun mitra strategis. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung pengembangan kompetensi, tetapi juga memberikan pengakuan profesional atas kapabilitas pegawai dalam bidang kebanksentralan (*central banking*).

Selain itu, pengembangan KPP terus diperkuat untuk mempersiapkan talenta pemimpin masa depan yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, kompetensi yang memadai, dan kesiapan menghadapi tantangan organisasi di masa depan. Melalui program ini, peserta dibekali dengan penguatan kompetensi teknis maupun perilaku guna mendukung pelaksanaan peran yang lebih luas pada jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi.

2) **Pengembangan Data/AI di Area SDM dan Budaya Kerja**

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi pengelolaan sumber daya manusia berbasis data melalui penyusunan metadata dalam kerangka *4P Human Resource Management (HRM)* serta implementasi berbagai *use case digital* yang terintegrasi. Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan SDM, efisiensi proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia memperkuat pengelolaan pengalaman kerja pegawai (*Employee Experience/EX*) dan tingkat keterlibatan pegawai (*employee engagement*) sebagai bagian dari upaya

menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan produktif. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja dan tuntutan kinerja, sehingga organisasi perlu memastikan bahwa peningkatan produktivitas berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia secara konsisten memanfaatkan asistensi digital dari SABI (Sahabat Bank Indonesia) sebagai instrumen survei berbasis data yang memungkinkan organisasi menangkap aspirasi, persepsi, dan pengalaman pegawai secara lebih *real-time*, *conversational*, dan *personalized*. Pendekatan ini membantu memetakan kualitas *Employee Experience*, tingkat *engagement*, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman kerja pegawai sebagai dasar perumusan kebijakan SDM yang lebih responsive dan berbasis data. Melalui implementasi SABI, Bank Indonesia memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat *engagement* dan persepsi pegawai terhadap berbagai aspek pengalaman kerja, termasuk dalam hal memaknai pekerjaan yang dilakukan saat ini.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga melakukan *launching* berbagai *use case* sebagai bagian dari penguatan digitalisasi proses bisnis SDM. *Use case* tersebut meliputi *enrollment In-House Training* (IHT) secara pasif dan integrasi dengan *Learning Management System* (LMS) yang mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan pelatihan secara *end-to-end*. Pengembangan fitur pemantauan presensi dan cuti pegawai juga dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan kehadiran pegawai. Lebih lanjut, implementasi *use case* mencakup asesmen potensi pegawai guna mendukung pengelolaan talenta berbasis merit, serta pengaturan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan dan produktivitas pegawai. Pengembangan ini turut dilengkapi dengan *Electronic Curriculum Vitae* (ECV) yang terintegrasi, sehingga profil kompetensi dan rekam jejak pegawai dapat terdokumentasi secara komprehensif dan mudah diakses.

4.2.3. Transformasi Digital

Transformasi digital Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Transformasi digital difokuskan pada penguatan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan melalui penyempurnaan *business process re-engineering* (BPR) berbasis digital

yang mengutamakan *collaborative work* dan didukung pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI). Upaya tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) visi inovasi digital, yakni: (i) pengembangan digitalisasi di area sistem pembayaran dan pendalaman pasar uang (*integrated digital payment system and finance*); (ii) pengembangan digitalisasi pendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta SDM (*integrated digital central bank*); dan (iii) peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara *end-to-end* (*integrated digital technology*).

1) Reformasi Regulasi Area Digital

Bank Indonesia mengembangkan ketentuan yang selaras dengan arah transformasi digitalisasi proses bisnis Bank Indonesia. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat pengembangan digitalisasi *Decision Making Process* (DMP) dan BPR di area perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melakukan menyusun beberapa ketentuan untuk memperkuat transformasi digital melalui:

a) Penyusunan Ketentuan Internal terkait *Cloud*

Bank Indonesia memperkuat transformasi digital kelembagaan melalui pengembangan kerangka kerja infrastruktur komputasi berbasis *cloud* yang mendukung kebutuhan pengolahan data dan aplikasi secara lebih fleksibel, efisien, dan terintegrasi. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya modernisasi teknologi informasi guna meningkatkan kapasitas pengelolaan data serta mendukung percepatan proses analisis dan perumusan kebijakan. Pada triwulan I 2026, pengembangan ketentuan internal terkait *Cloud* diarahkan untuk menyediakan lingkungan komputasi yang *scalable* dan *secure*, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan pemrosesan data dalam volume besar (*big data*) serta mendukung berbagai *use case* analitik, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial. Selain itu, ketentuan internal terkait *Cloud* juga memungkinkan peningkatan kolaborasi antar satuan kerja melalui akses data dan aplikasi yang lebih terintegrasi dalam satu ekosistem digital. Dari sisi tata kelola, pengembangan ketentuan internal terkait *Cloud* dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan informasi, kepatuhan terhadap standar teknologi, serta pengelolaan risiko yang memadai. Hal tersebut diarahkan untuk memastikan keandalan sistem serta perlindungan terhadap data yang dikelola.

b) **Penyusunan Ketentuan Internal terkait AI Governance**

Bank Indonesia terus memperkuat tata kelola yang mendukung digitalisasi Bank Indonesia melalui penyusunan ketentuan internal tentang pengelolaan AI dan adopsi *cloud*. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari transformasi digital yang menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan pengelolaan risiko. Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah menyetujui pokok-pokok ketentuan internal tentang pengelolaan AI untuk menyeimbangkan inovasi, risiko, dan kecepatan dalam adopsi AI di Bank Indonesia. Ketentuan tersebut akan mengatur aspek pengembangan, pemanfaatan, dan kapabilitas pendukung AI dengan berlandaskan pada prinsip *fairness, accountability, security transparency, explainability, dan robustness*. Selain itu, diatur pula kewenangan pengambilan keputusan secara prinsipil dan strategis, di antaranya adalah rencana strategis pengembangan AI dan implementasi AI yang berisiko tinggi. Pokok-pokok ketentuan tersebut akan terus diperkuat pada tatanan ketentuan pelaksanaan serta petunjuk teknis.

2) **Pengembangan *Integrated Digital Technology, Integrated Digital Central Bank, dan Integrated Digital Technology***

Bank Indonesia terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan kerangka integrasi yang mencakup aspek sistem pembayaran, fungsi kelembagaan bank sentral, serta infrastruktur teknologi. Inisiatif ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi, efisien, dan adaptif

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia mengembangkan integrasi sistem pembayaran dan keuangan digital untuk menciptakan ekosistem transaksi yang *seamless, efisien, dan inklusif*. Integrasi ini mencakup penguatan interkoneksi antarinstrumen dan kanal pembayaran, serta sinergi dengan sektor keuangan guna mendukung kelancaran transaksi domestik dan lintas batas. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, diharapkan efisiensi operasional meningkat, biaya transaksi menurun, serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas.

Bank Indonesia juga mengembangkan konsep *Integrated Digital Central Bank (IDCB)* sebagai upaya untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi utama bank sentral dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Melalui IDCB, berbagai proses bisnis, data, dan layanan internal diintegrasikan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Inisiatif ini juga memperkuat sinergi antar area kebijakan, termasuk moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia memperkuat fondasi teknologi melalui pengembangan *Integrated Digital Technology* yang mencakup infrastruktur TI, *platform data*, serta kapabilitas analitik yang terintegrasi. Penguatan tersebut mendukung keandalan, keamanan, dan skalabilitas sistem sekaligus membuka ruang pemanfaatan teknologi terkini, termasuk AI dan *clouds*, guna meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas layanan Bank Indonesia.





BAB 5

CAPAIAN KINERJA BANK INDONESIA



Di tengah tantangan lingkungan strategis yang semakin berat, Bank Indonesia berhasil mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan I 2026 sesuai tahapannya. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, berbagai upaya penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratny sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan I 2026 telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk pengakuan secara internasional.

Pencapaian kinerja Bank Indonesia sepanjang triwulan I 2026 tecermin pada capaian IKU Bank Indonesia dalam 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut:

PS 01 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lingkungan strategis global pada triwulan I 2026 diwarnai oleh meningkatnya ketidakpastian akibat eskalasi konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026. Perkembangan tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara, sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tekanan inflasi global. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga makin memburuk, tecermin dari pergeseran aliran modal ke aset yang dianggap aman (*safe-haven assets*), indeks DXY yang terus menguat, serta mata uang *emerging markets* yang makin tertekan, termasuk Indonesia. Dalam kaitan tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat dan diarahkan untuk memperkuat stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional dan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada triwulan I 2026 diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi global, menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ pada tahun 2026 dan 2027, serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter dan memperkuat ketahanan eksternal sebagai langkah antisipatif terhadap potensi dampak lanjutan dari dinamika global, guna tetap konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

1) Inflasi inti yang rendah dan stabil pada kisaran sasarannya didukung transmisi kebijakan yang efektif

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali dengan inflasi inti yang terjaga rendah. IHK pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48% (yoy) dan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2026 sebesar $2,5\pm 1\%$. Inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,52% (yoy) dipengaruhi terutama oleh penurunan harga komoditas emas global dan ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, di tengah kenaikan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat sebesar 4,24% (yoy), didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama di tengah peningkatan permintaan selama periode HBKN Idulfitri 1447 H. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat sebesar 6,08% (yoy), menurun dibandingkan realisasi bulan sebelumnya seiring minimalnya kebijakan harga yang diatur Pemerintah serta berakhirnya faktor temporer *base effect* dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga pada Januari dan Februari 2025. Ke depan, Bank Indonesia memandang inflasi IHK tahun 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran $2,5\pm 1\%$, meskipun lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya dipengaruhi oleh prospek harga komoditas global yang meningkat. Inflasi inti diperkirakan tetap terkendali, sementara inflasi VF meningkat akibat kenaikan harga pangan dan pupuk global.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada triwulan I 2026 diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku bunga BI-Rate sepanjang triwulan I 2026 tetap dipertahankan pada level terendah sejak tahun 2022 yaitu sebesar 4,75%, setelah turun 150 bps sejak September 2024, masing-masing 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025. Keputusan untuk mempertahankan BI-Rate konsisten dengan fokus kebijakan pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam sasaran $2,5\pm 1\%$. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal

dari kemungkinan eskalasi perang Timur Tengah, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna tetap konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Koordinasi pengendalian inflasi pangan juga diterapkan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

2) Terjangkarnya ekspektasi inflasi sesuai dengan target inflasi

Ekspektasi inflasi pada triwulan I 2026 tetap terjaga didukung oleh konsistensi bauran kebijakan Bank Indonesia. Hal ini tecermin dari berbagai indikator survei yang menunjukkan ekspektasi inflasi jangka pendek tetap terkendali. Survei *Consensus Forecast* (CF) yang dirilis selama triwulan I 2026 menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi sepanjang tahun 2026 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Berdasarkan hasil survei *Consensus Forecast* (CF) bulan Maret 2026, ekspektasi inflasi untuk akhir tahun 2026 (*end of period*/EoP) tetap terjaga meski sedikit di atas titik tengah kisaran sasaran, yakni sebesar 2,6% (yoy). Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) data realisasi Maret 2026, tekanan inflasi tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Juni dan September 2026, diperkirakan meningkat. Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juni dan September 2026 yang tercatat masing-masing sebesar 175,6 dan 163,2, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH Mei dan Agustus 2026

yang tercatat masing-masing sebesar 157,4 dan 157,2 didorong oleh kenaikan harga bahan baku.

Bank Indonesia secara konsisten menjaga *stance* suku bunga kebijakan moneter guna memastikan ekspektasi inflasi tetap terjangkau sesuai sasaran. Sepanjang triwulan I 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah. Bank Indonesia siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diperlukan untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$.

Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat komunikasi kebijakan secara transparan dan kredibel kepada pelaku pasar dan masyarakat guna membentuk ekspektasi inflasi yang selaras dengan sasaran. Upaya tersebut dilakukan secara intensif melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk publikasi hasil Rapat Dewan Gubernur dan diseminasi kebijakan, sehingga meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap arah kebijakan yang ditempuh. Pengendalian inflasi juga didukung oleh penguatan sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Melalui koordinasi tersebut, berbagai langkah strategis terus ditempuh untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis, termasuk melalui penguatan operasi pasar, kelancaran distribusi, serta pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H.

Boks.1: Pelaksanaan “Ramadan Tenang, Harga Terkendali: Optimalisasi Kredit Pangan untuk Stabilisasi Pasar”



Pembukaan Seminar Ramadan Tenang Harga Terkendali di Jakarta.

Bank Indonesia bekerja sama dengan media massa Kontan menyelenggarakan seminar nasional "Ramadan Tenang, Harga Terkendali: Optimalisasi Kredit Pangan untuk Stabilitas Pasar" pada 2 Maret 2026 di Jakarta. Seminar ini membahas stabilitas harga pangan pada periode Ramadan, yang secara historis menjadi fase krusial dalam pengendalian inflasi. Dalam konteks tersebut, peran Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi semakin strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan guna mendukung daya beli masyarakat, menjaga kepercayaan pelaku usaha, serta memperkuat stabilitas makroekonomi nasional.

Seminar nasional yang mengangkat tema "Penguatan Sinergi dan Koordinasi Menjaga Stabilitas Harga" dibuka oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa di tengah meningkatnya tantangan global, Bank Indonesia terus memperkuat strategi 3K, yaitu kebijakan yang terintegrasi, kolaborasi erat dengan Pemerintah, serta komitmen untuk terus berada di pasar guna meredam gejolak dan memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran. Dalam konteks pengendalian inflasi, penguatan dilakukan melalui tujuh program unggulan, termasuk

diantaranya hilirisasi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah, operasi pasar murah, serta komunikasi kebijakan untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), berbagai upaya tersebut difokuskan pada strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, meningkatkan kelancaran distribusi, dan memperkuat komunikasi kebijakan. Seminar juga menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional (Bapanas), perbankan, dan ekonom untuk membahas perkembangan inflasi, kesiapan pasokan pangan menjelang Ramadan, dukungan kredit/pembiayaan dari perbankan, serta analisis dampak inflasi terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Penyelenggaraan seminar ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah, industri perbankan, dan pemangku kepentingan terkait dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan HBKN. Melalui penguatan koordinasi tersebut, stabilitas inflasi diharapkan tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026, sekaligus mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

3) Tercapainya stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental perekonomian

Sepanjang triwulan I 2026, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Melonjaknya harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global. Ruang penurunan kebijakan moneter global makin menyempit, termasuk kemungkinan semakin tertundanya penurunan FFR, dan diikuti perkembangan *yield US Treasury* yang terus meningkat. Akibatnya, aliran modal global terus bergeser ke *safe-haven assets* terutama pasar uang AS sejalan dengan meningkatnya preferensi investor terhadap aset aman (*flight to safety*). Indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) terus menguat, sedangkan mata uang *emerging markets* makin tertekan. Pada triwulan I 2026, nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp16.990, atau melemah 1,92% dibandingkan dengan periode triwulan IV 2025 sebesar Rp16.670. Pelemahan tersebut terutama dipengaruhi oleh kekhawatiran berlanjutnya konflik

Timur Tengah dan potensi meluasnya konflik negara teluk sehingga memicu tetap tingginya harga komoditas energi serta mendorong meningkatnya tekanan inflasi dan ekspektasi kenaikan suku bunga global. Sementara itu dari sisi domestik, terdapat kebutuhan valuta asing korporasi menjelang akhir bulan dan adanya pernyataan Kementerian Keuangan RI terkait rencana efisiensi APBN sebagai respons lonjakan harga minyak mentah dunia agar defisit fiskal dapat tercapai di bawah 3%. Sejalan dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri (*off-shore*) maupun transaksi *spot* dan DNDF di pasar dalam negeri. Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing.

Bank Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang Timur Tengah. Pada kebijakan moneter, suku bunga BI-Rate sepanjang triwulan I 2026 tetap dipertahankan pada level terendah sejak tahun 2022 yaitu sebesar 4,75%. Keputusan

ini konsisten dengan fokus kebijakan pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam sasaran $2,5\pm 1\%$. Kebijakan BI-Rate tersebut juga didukung oleh penguatan intervensi di pasar valuta asing, strategi operasi moneter *pro-market*, serta kecukupan cadangan devisa. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memperkuat strategi intervensi pasar valas pada transaksi NDF di pasar luar negeri, transaksi *spot* dan DNDF di pasar domestik, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia juga terus memperkuat strategi operasi moneter *pro-market* guna makin memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong aliran masuk modal asing dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Bank Indonesia secara aktif mengoptimalkan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen moneter yang atraktif dan berdaya saing, sehingga mampu mendukung pendalaman pasar keuangan sekaligus memperkuat stabilisasi nilai tukar melalui pengelolaan aliran portofolio. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi pasar valas yang mulai berlaku April 2026 melalui:

- 1) penyesuaian *threshold* tunai beli valas terhadap Rupiah dari USD100 ribu per pelaku per bulan menjadi USD50 ribu per pelaku per bulan;
- 2) peningkatan *threshold* jual DNDF/Forward dari USD5 juta per transaksi menjadi USD10 juta per transaksi;
- 3) peningkatan *threshold* beli dan jual Swap dari USD5 juta menjadi USD10 juta per transaksi.

Selain itu, Bank Indonesia memperkuat ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) melalui penyesuaian *threshold* kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (*outgoing*) dalam valas dari USD100 ribu menjadi USD50 ribu yang mulai berlaku April 2026.

- 4) **Tercapainya suku bunga pasar uang sesuai suku bunga kebijakan dengan yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur**

Pelaksanaan operasi moneter pada triwulan I 2026 terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan melakukan ekspansi likuiditas moneter termasuk mendorong pertumbuhan uang primer (M0). Hal ini tercermin dari strategi operasi moneter (OM) pro-rata transaksi OM kontraksi dan/

atau penyesuaian frekuensi lelang OPT. Pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) tenor *overnight* (O/N) terjaga di sekitar suku bunga kebijakan. Rerata PUAB O/N pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,94% atau menurun dari rerata triwulan IV 2025 sebesar 4,06%, berada dalam koridor suku bunga kebijakan dengan BI-Rate sebesar 4,75%. Hal ini mencerminkan upaya ekspansi likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia mengendalikan suku bunga antara lain melalui penetapan suku bunga kebijakan, pelaksanaan OM kontraksi dan ekspansi, serta penguatan proyeksi likuiditas harian. Kebijakan moneter Bank Indonesia terus diperkuat untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam kisaran $2,5\pm 1\%$. Konsisten dengan hal tersebut, suku bunga BI-Rate pada Januari, Februari, dan Maret 2026 tetap dipertahankan sebesar 4,75% guna mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Kebijakan moneter ditempuh melalui kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Sejalan dengan pengendalian suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang pada 31 Maret 2026, yaitu Indonesia *Overnight Index Average* (INDONIA) tercatat sebesar 3,85%, bergerak dalam kisaran BI-Rate. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada 27 Maret 2026 tercatat sebesar 5,42%; 5,45%; dan 5,50%. Sementara itu, imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun dan 10 tahun tercatat masing-masing sebesar 6,31% dan 6,86% pada 31 Maret 2026.

Penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter terhadap pergerakan suku bunga di pasar uang terus ditempuh guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Suku bunga BI-Rate pada Januari, Februari dan Maret 2026 dipertahankan sebesar 4,75% disertai dengan penguatan struktur suku bunga instrumen moneter *pro-market* untuk menjaga imbal hasil guna tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah. Selain itu, pengendalian tingkat suku bunga dilakukan melalui penguatan strategi transaksi *term repo* dan *swap* valuta asing yang kompetitif untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen OM *pro-market* melalui penerbitan SRBI untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing, mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Sejak 17 Mei 2024,

pelaksanaan lelang SRBI dilakukan melalui *dealer* utama di PUVA, dengan penguatan implementasi *dealer* utama yang terus didorong melalui pemenuhan kewajiban *dealer* utama di pasar uang, termasuk dalam transaksi SRBI di pasar sekunder serta transaksi *repurchase agreement* (repo) antar pelaku pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan instrumen SRBI melalui penyempurnaan mekanisme *pricing yield*, penguatan fitur instrumen agar semakin *market friendly*, serta perluasan basis investor, termasuk investor nonresiden. Posisi instrumen moneter SRBI pada 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp831,21 triliun, meningkat 13,72% dibandingkan posisi akhir triwulan IV 2025 sebesar Rp730,90 triliun. Peningkatan tersebut mencerminkan masih tingginya minat investor terhadap instrumen SRBI. Bank Indonesia juga terus memperkuat komunikasi kebijakan dengan pelaku pasar guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Komunikasi dilakukan secara intensif melalui berbagai forum, termasuk publikasi hasil Rapat Dewan Gubernur dan *engagement* dengan pelaku pasar, sehingga mampu membentuk ekspektasi pasar yang selaras dengan arah kebijakan yang ditempuh.

5) **Tercapainya kecukupan cadangan devisa yang memenuhi standar internasional dan sesuai target yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur**

Pengelolaan cadangan devisa pada triwulan I 2026 senantiasa dilakukan dalam rangka pelaksanaan mandat yakni mengupayakan kecukupan cadangan devisa untuk melaksanakan kebijakan moneter dan memenuhi kewajiban internasional dalam valuta asing, guna mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Triwulan I 2026 tercatat sebesar USD 148,2 miliar, setara dengan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan impor, juga mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Bank Indonesia mengimplementasikan transformasi pengelolaan cadangan devisa, dengan tetap berpegang pada aspek likuiditas, keamanan, tanpa mengabaikan kesempatan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal, di tengah perkembangan lingkungan strategis global yang menantang dan bergejolak. Pengelolaan cadangan devisa dilakukan sesuai dengan *framework* dan alokasi aset strategis yang adaptif terhadap dinamika pasar keuangan global,

sehingga cadangan devisa menjadi lebih *sustainable* dan *preserved* dalam mendukung upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah. Pengelolaan cadangan devisa terus diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah serta optimalisasi kerja sama keuangan internasional dengan organisasi multilateral internasional dan bank sentral mitra lainnya, terutama yang berada di kawasan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penguatan tata kelola pengelolaan cadangan devisa guna memastikan penerapan *good governance* secara konsisten, yang mencakup penyempurnaan kebijakan internal pengelolaan cadangan devisa, manajemen risiko yang menyeluruh, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel.

PS 02 Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia terus melakukan penguatan asesmen, rekomendasi, serta koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dengan tetap mempertahankan stabilitas makroekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global. Upaya tersebut didukung dengan penguatan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pada level nasional maupun regional, untuk pencapaian inflasi dalam rentang sasaran serta transaksi berjalan yang sehat dan mendukung stabilitas eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

6) **Terjalannya koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Perumusan kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan I 2026 terus diperkuat melalui penyusunan *framework* GPIPS 2026 serta kerangka kerja sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Langkah ini ditempuh untuk memastikan pengendalian inflasi yang lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi kontributor utama inflasi.



Konferensi Pers *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta.

Framework GIPS 2026 dirancang sebagai panduan strategis dalam mengintegrasikan berbagai upaya pengendalian inflasi, mulai dari penguatan produktivitas dan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, hingga penguatan komunikasi kebijakan. Pendekatan ini menekankan sinergi lintas sektor dan wilayah guna mengantisipasi risiko inflasi, terutama yang bersumber dari faktor musiman, volatilitas harga pangan, dan gangguan

pasokan pangan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah memperkuat kerangka kerja sinergi TPIP/TPID 2026 sebagai forum koordinasi utama dalam pengendalian inflasi. Penguatan ini mencakup penyesuaian program kerja pusat dan daerah, peningkatan efektivitas implementasi peta jalan pengendalian inflasi, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja pengendalian inflasi di seluruh daerah.

Boks.2: Penguatan sinergi pengendalian inflasi pangan dalam TPIP/TPID melalui GIPS di berbagai daerah



Pembukaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GIPS) Wilayah Sumatera di Banyuwangi.

Dalam rangka memperkuat pengendalian inflasi pangan dan ketahanan pangan nasional, Pemerintah dan Bank Indonesia terus mendorong implementasi Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GIPS) guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan melalui penguatan ekosistem pangan dari hulu

hingga hilir. Komitmen tersebut ditegaskan dalam *High Level Meeting* (HLM) TPIP pada 31 Januari 2026 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga anggota TPIP, serta pemangku kepentingan terkait. Pertemuan tersebut

menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui penguatan produktivitas pangan, kelancaran distribusi antarwilayah, serta penguatan ketahanan pasokan guna mendukung pengendalian inflasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penguatan sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan menjadi semakin penting mengingat inflasi pangan masih menjadi salah satu sumber utama tekanan inflasi nasional. Selain itu, meningkatnya risiko gangguan pasokan akibat faktor hidrometeorologi, volatilitas harga komoditas strategis, dan tantangan distribusi pangan antarwilayah turut memerlukan penguatan koordinasi dan respons kebijakan yang lebih terintegrasi. Berbekal keberhasilan pengendalian inflasi pada tahun sebelumnya, Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga inflasi IHK tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ serta menjaga inflasi kelompok *volatile food* pada kisaran 3,0–5,0%. Capaian tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia serta sinergi erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP-TPID, termasuk implementasi Program GPIPS yang diarahkan untuk memperkuat produktivitas pangan, penguatan rantai pasok dan distribusi antarwilayah, serta ketahanan pasokan pangan, yang telah mendorong peningkatan produktivitas pangan, penguatan kerja sama antardaerah, dan stabilitas harga di berbagai wilayah.

Sebagai langkah ke depan, implementasi GPIPS pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan yang lebih resilien melalui peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, dan peningkatan efektivitas distribusi pangan antarwilayah. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan GPIPS dan Rakor TPIP-

TPID Wilayah Sumatera difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, penguatan kerja sama antardaerah, serta peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi berbagai risiko gangguan produksi maupun distribusi pangan. Melalui pendekatan tersebut, TPID di berbagai daerah diharapkan mampu memperkuat strategi pengendalian inflasi yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah.

Implementasi GPIPS menjadi salah satu instrumen utama memperkuat ekosistem pangan yang terintegrasi. Program ini tidak hanya berfokus pada pengendalian harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan kerja sama antardaerah, penguatan ekosistem distribusi, pengelolaan pascapanen, serta penguatan konektivitas rantai pasok pangan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, GPIPS diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan pangan sekaligus mengurangi kerentanan inflasi yang bersumber dari gangguan produksi dan distribusi.

Penguatan sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui TPIP-TPID serta implementasi GPIPS merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, implementasi GPIPS diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan pangan, meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi, serta memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai risiko gangguan produksi maupun distribusi pangan, sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat, mendukung stabilitas makroekonomi, serta memperkuat ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

7) **Terjalinnnya sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi**

Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter pada triwulan I 2026 terus diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia menjalin sinergi dengan otoritas fiskal secara aktif dengan menyampaikan pandangan terkait kondisi perekonomian domestik serta asumsi makroekonomi sebagai rekomendasi kepada Pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sepanjang triwulan I 2026, Bank Indonesia melakukan koordinasi bersama Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), antara lain melalui Rapat Interdep berkala terkait *outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) APBN TA 2026 dan outlook jangka menengah*. Forum tersebut membahas dinamika global dan domestik terkini, termasuk perkembangan geopolitik, pertumbuhan ekonomi, dan respons bauran kebijakan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia telah menyampaikan rekomendasi atau pandangan terkait asumsi makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan target-target Pemerintah di bidang pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, dan inflasi tahun 2026, guna mendukung asesmen Kemenkeu dalam melakukan *tracking ADEM TA 2026* maupun

proyeksi jangka menengah. Pada triwulan I-2026, Bank Indonesia juga telah memberikan rekomendasi dan mengawal terkait penerbitan SEC-19 dalam *currency* USD dan SEC-20 dengan skema *dual currency* (Euro dan CNH). Dukungan strategis ini berhasil menjaga kelancaran seluruh tahapan penerbitan *Global Bond* agar tetap selaras dengan *timeline* yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pengelolaan *Global Bond* dari hulu ke hilir, sejak masa penerbitan hingga jatuh tempo dapat terlaksana dengan tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga turut berkontribusi dalam memperkuat kredibilitas Pemerintah di mata investor internasional.

Bank Indonesia juga memberikan rekomendasi terkait rencana penarikan pinjaman luar negeri Pemerintah dan/atau penerbitan *global bond*.

Rekomendasi tersebut mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global, biaya dan risiko pembiayaan, serta dampaknya terhadap stabilitas eksternal dan pasar keuangan domestik. Dengan demikian, strategi pembiayaan Pemerintah dapat dilakukan secara optimal, terukur, dan selaras dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, Bank Indonesia melaksanakan strategi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur dan sesuai mekanisme pasar. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara transparan dan konsisten dengan program moneter, guna mendukung stabilitas pasar keuangan serta menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter. Strategi pembelian SBN juga diarahkan untuk mengurangi volatilitas pasar, menjaga kecukupan likuiditas, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

Boks.3: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 dengan Kementerian Keuangan



Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 di Jakarta.

Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 20 Februari 2026 dan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta jajaran kedua institusi. Rapat ini merupakan wujud pelaksanaan amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter, termasuk pengelolaan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang selaras dengan arah kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global dan dinamika pasar keuangan internasional. Dalam konteks tersebut, Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat, dengan defisit tahun 2026 yang tetap terkendali sekitar 2,68% dari PDB serta strategi pembiayaan yang pruden dan berkelanjutan. Pengelolaan utang juga terus dilakukan secara hati-hati melalui penerapan manajemen risiko yang kuat guna menjaga struktur utang Pemerintah tetap sehat dan berdaya tahan.

Di sisi lain, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter secara konsisten untuk menjaga inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan memelihara stabilitas nilai tukar

Rupiah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain melalui strategi operasi moneter *pro-market* yang menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui pengelolaan instrumen moneter dan transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur dan sesuai prinsip kebijakan moneter yang berhati-hati.

Sebagai bentuk sinergi yang lebih erat, Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, disiplin pasar, dan integritas pasar (*market discipline and integrity*). Dalam kaitan ini, pembelian SBN oleh Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme pasar serta didukung oleh skema pertukaran SBN secara bilateral (*bilateral debt switch*) yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Mekanisme tersebut mendukung pengelolaan portofolio utang Pemerintah secara lebih

efisien sekaligus tetap menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.

Ke depan, koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan pasar keuangan domestik maupun global. Sinergi yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia menjadi semakin penting untuk memastikan respons kebijakan yang tepat waktu dan saling memperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berkembang.

Penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Melalui koordinasi yang erat, transparan, dan berlandaskan tata kelola yang kuat, stabilitas fiskal, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, serta memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

PS 03 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang tecermin pada volatilitas aliran modal dan nilai tukar menjadi tantangan bagi negara EMEs untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dalam memperkuat ketahanan eksternalnya serta untuk mendorong ekonomi dalam negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan penguatan kebijakan makroprudensial yang mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong fungsi intermediasi agar tetap mendukung pembiayaan ekonomi. Sepanjang 2025, Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial melalui peningkatan insentif likuiditas dan pelonggaran instrumen makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang mendukung penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat intermediasi perbankan yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan mitigasi dan pengelolaan risiko sistemik. Selain itu, implementasi kebijakan juga mendukung perluasan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Bank Indonesia terus memperkuat surveilans makroprudensial secara *forward-looking* untuk mengantisipasi potensi risiko

pasar, likuiditas, dan kredit, sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah dinamika global.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

8) Tercapainya pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Pertumbuhan kredit perbankan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 9,49% (yoy), berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia sebesar 8-11%. Berdasarkan kelompok penggunaan, kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85% (yoy), 4,38% (yoy), dan 5,88% (yoy).

Bank Indonesia turut mendukung terjaganya ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perbankan terpantau mampu melanjutkan intermediasi dengan tetap menjaga likuiditas. Hal ini tecermin pada indikator rasio AL/DPK yang mencapai 27,85% pada triwulan I 2026. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas sehingga dapat menopang penyaluran

kredit/pembiayaan perbankan secara optimal serta memperkuat sinergi dengan KSSK untuk memitigasi berbagai risiko ekonomi akibat dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan domestik.

Penguatan kebijakan makroprudensial pada triwulan I 2026 terus diarahkan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), serta ketentuan internal terkait RIM dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendorong penyaluran kredit/pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga memperkuat implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang bersifat *forward looking* guna mendorong peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor prioritas. Pendekatan ini memungkinkan perbankan untuk lebih optimal dalam mengelola likuiditas serta memperkuat kapasitas intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penguatan kebijakan tersebut turut didukung oleh sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI). Melalui program ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait mendorong peningkatan permintaan pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor produktif, sehingga memperkuat sisi permintaan (*demand side*) dari intermediasi perbankan. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat insentif KLM guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Hingga Triwulan I 2026, realisasi pengeluaran anggaran untuk insentif KLM telah mencapai 20,45% dari rencana awal, mencerminkan komitmen dalam mendorong penyaluran kredit serta mendukung aktivitas ekonomi.

9) Terjaganya risiko likuiditas perbankan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan

Penguatan pengawasan terintegrasi pada Triwulan I 2026 dilakukan melalui pelaksanaan asesmen untuk memantau perilaku perbankan dalam mengelola risiko likuiditas, termasuk pada aktivitas penyaluran kredit dan penghimpunan dana. Selain itu, juga dilakukan identifikasi potensi peningkatan eksposur risiko likuiditas perbankan yang berasal dari area makroprudensial, moneter, market, dan sistem pembayaran. Asesmen likuiditas turut

melihat interkoneksi dan potensi dampak rambatan (*contagion*) antar bank yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan.

Penguatan pengawasan dilakukan dalam memastikan berjalannya pemantauan secara menyeluruh terhadap indikator risiko likuiditas dan risiko terkait lainnya, termasuk dalam mengidentifikasi perkembangan eksposur risiko perbankan melalui penerapan strategi *Integrated Dynamic Systemic Risk Surveillance (IDSRS)*. Strategi IDSRS digunakan dalam menetapkan prioritas dan fokus pengawasan terintegrasi berbasis perilaku, risiko, dan kepatuhan, untuk mencapai tujuan akhir dalam mencegah potensi risiko sistemik yang timbul dari seluruh objek pengawasan. Dukungan inovasi berbasis digital dalam bentuk *supervisory technology (suptech)* juga menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan berjalannya pengawasan berbasis data (*data-driven supervision*) dalam mendukung pengawasan yang adaptif, *pre-emptive*, dan relevan dengan perkembangan terkini. Melalui pemanfaatan *suptech* dan IDSRS, Bank Indonesia dapat meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, serta kedalaman analisis dalam mengidentifikasi potensi risiko sistem keuangan. Selain itu, penguatan ini juga memungkinkan respons kebijakan yang lebih cepat dan terukur dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

10) Terjaganya risiko pasar perbankan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap perkembangan pasar uang, pasar valas, dan pasar keuangan lainnya, guna mengidentifikasi potensi risiko serta memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Asesmen terhadap hasil pengawasan dan surveilans moneter-market pada triwulan I 2026 menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global. Berbagai indikator pasar keuangan, seperti suku bunga pasar uang, nilai tukar, dan *yield* surat berharga, tetap berada dalam kondisi yang terkendali.

Kondisi ini mencerminkan respons kebijakan yang efektif serta tetap terjaganya kepercayaan pelaku pasar terhadap stabilitas perekonomian domestik. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga memperkuat pengawasan untuk memastikan bahwa potensi kerugian perbankan tetap berada di bawah *threshold* yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan eksposur risiko pasar, likuiditas, dan kredit secara terintegrasi, sehingga potensi tekanan

terhadap kinerja perbankan dapat diantisipasi secara dini. Melalui pendekatan pengawasan yang berbasis risiko dan data, Bank Indonesia mampu menjaga agar profil risiko perbankan tetap terkendali serta tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Upaya ini juga didukung oleh penguatan koordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan respons kebijakan yang tepat dan terukur.

11) Tercapainya pertumbuhan kredit yang inklusif dan/atau hijau untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam rangka mendorong penciptaan lapangan kerja

Bank Indonesia terus memperkuat upaya peningkatan pembiayaan kepada UMKM sebagai bagian dari dukungan terhadap inklusi ekonomi, inklusi keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mendorong inklusi keuangan yakni melalui kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) di mana pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 32%. Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan asesmen terhadap realisasi RPIM serta faktor-faktor pendukungnya guna memastikan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada sektor inklusif.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa implementasi RPIM didukung oleh berbagai faktor, antara lain kesiapan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan inklusif, dukungan kebijakan insentif, serta sinergi dengan program Pemerintah dalam pengembangan sektor prioritas. Asesmen ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi area penguatan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pembiayaan inklusif. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga melakukan asesmen terhadap penguatan RPIM, mencakup aspek cakupan, modalitas, serta fleksibilitas target. Penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menjangkau lebih banyak sektor dan pelaku usaha, serta memberikan ruang fleksibilitas bagi perbankan dalam memenuhi target RPIM sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing bank.

Bank Indonesia juga terus memperkuat implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank penyalur kredit/pembiayaan untuk sektor inklusif. Penguatan ini dilakukan melalui pemberian insentif likuiditas yang terarah, sehingga mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM dan sektor produktif lainnya.

Boks.4: Pelaksanaan *Strategic Surveillance Forum*



Strategic Surveillance Forum (SSF) 2026 di Jakarta.

Pelaksanaan *Strategic Surveillance Forum* (SSF) pada Triwulan I 2026 dilakukan pada bulan Maret 2026 di Bank Indonesia dengan mengangkat tema “Mendorong Pembiayaan, Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi”. SSF dihadiri oleh anggota Direksi dari sejumlah bank yang dinilai memiliki keterkaitan yang kuat dengan tema SSF, serta dapat mendukung pengembangan pengawasan ke depan. Pelaksanaan SSF dilakukan

secara berkala sebagai forum koordinasi dan komunikasi Bank Indonesia dengan *stakeholders* terkait dalam memperkuat pengawasan secara terintegrasi. Dengan demikian topik maupun tema yang diangkat dalam SSF tersebut nantinya dapat terus bervariasi, sesuai dengan perkembangan isu terkini maupun isu pengawasan yang perlu dibahas lebih lanjut dengan mengikutsertakan industri perbankan dan non bank.



Strategic Surveillance Forum (SSF) 2026 di Jakarta.

Dalam pertemuan SSF tersebut, terdapat beberapa *insight* yang didapat yaitu terkait dengan kapasitas likuiditas dan penopang kredit, tantangan akselerasi segmen UMKM dan ritel, dinamika suku bunga dan pelaku deposan, serta tata kelola dan iklim usaha. SSF menghasilkan komitmen perbankan dan tindak lanjut, khususnya terkait intermediasi serta dukungan terhadap implementasi kebijakan Bank Indonesia.

Sejalan dengan komitmen perbankan dalam mendukung penguatan fungsi intermediasi, kapasitas likuiditas dinilai masih memadai untuk menopang ekspansi kredit yang saat ini didorong oleh segmen korporasi. Ke depan, akselerasi pembiayaan pada segmen UMKM dan ritel memerlukan sinergi kebijakan guna memitigasi tantangan daya beli masyarakat didukung oleh optimalisasi peran strategis dari jajaran pengurus bank.

PS 04 Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pembiayaan perekonomian di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan. Ketidakpastian perekonomian global yang tinggi memerlukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial untuk menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan dari eskalasi tekanan yang bersumber dari risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Dalam kaitan itu, koordinasi KSSK diarahkan untuk mendorong intermediasi perbankan, termasuk bagi sektor prioritas sesuai program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pelaku industri dalam rangka mendorong intermediasi sektoral, termasuk pada sektor perumahan. Sejalan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, REI, BP Tapera, dan PT SMF untuk membahas strategi penguatan pembiayaan sektor perumahan serta mendorong penyaluran kredit ke sektor tersebut sebagai bagian dari rangkaian program PINISI. Secara keseluruhan, penguatan sinergi kebijakan

dan pengawasan makroprudensial dalam KSSK difokuskan pada upaya menjaga ketahanan sistem keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

- 12) Terjalinnnya sinergi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dengan KSSK, OJK, dan/atau Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus dilakukan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta mendorong pengembangan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan *deputies meeting* BI-OJK pada triwulan I 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis guna memperkuat sinergi antar otoritas baik dalam aspek perizinan, pengembangan sektor keuangan, harmonisasi regulasi, digitalisasi, pengawasan, maupun perlindungan konsumen.



Principal Meeting Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta.

Salah satu kesepakatan utama yang diperoleh adalah perpanjangan *task force* Perizinan dan/atau Persetujuan Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam proses perizinan, sehingga mendukung penguatan ekosistem sektor keuangan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan industri, serta selaras dengan arah pengembangan sektor jasa keuangan nasional. Selain itu, Bank Indonesia dan OJK juga memperkuat koordinasi dalam pengembangan pembiayaan UMKM, keuangan syariah, dan *sustainable finance*. Sinergi ini mencakup penguatan akses pembiayaan, pengembangan instrumen keuangan, serta kerja sama dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, kedua otoritas sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka mendorong harmonisasi regulasi antar institusi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan konsistensi kebijakan, meminimalkan potensi tumpang tindih pengaturan, serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri jasa keuangan. Sejalan dengan itu, koordinasi harmonisasi peraturan juga dilaksanakan melalui pembahasan bersama sejumlah rancangan ketentuan, antara lain Rancangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (RPADG) terkait investasi syariah serta Rancangan Peraturan Bank Indonesia (RPBI) terkait Uang Palsu dan/atau Uang Beredar (UPA BB). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerangka regulasi yang selaras dan mendukung stabilitas serta pengembangan sektor keuangan.

- 13) Terjalinnnya sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan KSSK, OJK, dan/atau LPS dalam rangka menjaga ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis

Dalam kerangka KSSK, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan terus dilakukan melalui koordinasi intensif dalam rangkaian agenda Rapat Berkala KSSK I Tahun 2026. Rangkaian koordinasi diawali dengan Pertemuan Tingkat Deputi pada 19 Januari 2026 yang membahas 3 (tiga) topik utama, yaitu: (i) kondisi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional dan (iii) *topical issues* perkembangan penyelesaian peraturan pelaksanaan UU P2SK, tindak lanjut evaluasi Simulasi Krisis, dan rencana kerja Sekretariat KSSK tahun 2026. Pada tataran Prinsipal, koordinasi dilanjutkan dengan Rapat Berkala yang menyepakati kondisi SSK triwulan IV 2025 dan tindak lanjut mengenai upaya bersama empat lembaga anggota KSSK dalam menjaga SSK dengan fokus utama mendorong pembiayaan antara lain melalui *debottlenecking* sektor riil.

Dalam kerangka koordinasi BI-OJK, pembahasan difokuskan pada perkembangan pertumbuhan kredit, pertukaran data untuk mendukung proses pengisian Bank Sistemik, serta pemantauan dinamika Dana Pihak Ketiga (DPK). Koordinasi ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat asesmen bersama terhadap kondisi perbankan, menjaga kesinambungan intermediasi, serta meningkatkan kualitas dukungan data dalam pelaksanaan mandat masing-masing otoritas. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

sebagai tindak lanjut arahan *High Level Meeting* BI-LPS, khususnya terkait simulasi repo SBN LPS kepada BI. Rangkaian koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan aspek kebijakan, operasional, dan tata kelola

dalam pelaksanaan simulasi, sekaligus memperkuat koordinasi antarotoritas dalam mendukung efektivitas mekanisme penanganan likuiditas dan stabilitas sistem keuangan.

Boks.5: Peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan No. 46



Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 46 di Jakarta.

Bank Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 46 (KSK 46) pada 27 Februari 2026 di Jakarta. Mengusung tema "*Mengakselerasi Intermediasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi*", KSK 46 menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap kuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Kondisi tersebut ditopang oleh ketahanan perbankan dan industri keuangan nonbank, serta kinerja korporasi dan rumah tangga yang tetap terjaga.

Dalam rangka memperkuat pemahaman dan optimisme pelaku industri keuangan terhadap perkembangan SSK terkini, Bank Indonesia juga menyelenggarakan seminar nasional yang menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perbankan, dan asosiasi terkait. Seminar tersebut juga menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pimpinan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pimpinan K/L, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), direksi perbankan, pelaku industri keuangan nonbank, asosiasi, akademisi, serta mitra strategis lainnya. Penyelenggaraan kegiatan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi dan koordinasi lintas otoritas serta industri dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional guna mendukung intermediasi yang

optimal di tengah tingginya ketidakpastian global dan meningkatnya fragmentasi ekonomi dunia.

Dalam kegiatan ini, Dewan Gubernur Bank Indonesia menegaskan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan stabil, ditopang ketahanan perbankan, likuiditas yang memadai, serta risiko yang tetap terjaga. Kondisi ini mendukung fungsi intermediasi perbankan yang tetap tumbuh positif, tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 9,69% (yoy) pada Desember 2025 yang turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11% (yoy) sepanjang tahun 2025. Ke depan, peluang akselerasi intermediasi masih terbuka seiring tingginya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) perbankan yang mencapai Rp2.506,47 triliun pada Januari 2026. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berbasis kinerja dan *forward looking*. Hingga minggu pertama Februari 2026, realisasi insentif KLM tercatat mencapai Rp427,5 triliun guna menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung penyaluran kredit ke sektor prioritas. Selain itu, Bank Indonesia juga menekankan pentingnya sinergi antarotoritas dalam kerangka KSSK serta mendorong perbankan menyesuaikan *special rate* agar transmisi penurunan suku bunga kredit berjalan lebih efektif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.



Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 46 di Jakarta.

Peluncuran KSK 46 menjadi momentum penting untuk memperkuat optimisme dan koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong akselerasi intermediasi. Dengan sinergi kebijakan yang semakin kuat dan dukungan likuiditas yang memadai, sektor keuangan diharapkan mampu terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia

yang berkelanjutan dan inklusif. Rangkaian kegiatan ini juga merupakan bagian dari *road to PINISI*, yang merupakan inisiatif strategi komunikasi dan koordinasi kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk mempercepat intermediasi optimal, seimbang, dan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi.

PS 05 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, dalam rangka memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Di tengah dinamika global yang terus berkembang, akselerasi ekonomi keuangan digital (EKD) dan semakin kompleksnya inovasi pembayaran menuntut sistem pembayaran yang semakin lancar, andal, dan adaptif. Dari sisi domestik, peningkatan volume dan keragaman transaksi digital, bertambahnya pelaku industri, serta berkembangnya aset dan instrumen digital turut memperluas kebutuhan terhadap infrastruktur dan tata kelola yang memadai. Pada saat yang sama, digitalisasi sistem pembayaran juga menghadirkan tantangan, terutama terkait risiko siber, sehingga diperlukan penguatan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen untuk menjaga keamanan sistem serta memastikan kesiapan infrastruktur secara merata. Merespons perkembangan tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan sistem pembayaran melalui peningkatan keandalan infrastruktur dan struktur industri, perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan konektivitas pembayaran antarnegara, pengelolaan uang Rupiah, serta penguatan perlindungan konsumen. Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien, menjaga kepercayaan publik, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan

pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan program Asta Cita.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

14) Ketersediaan Rupiah untuk mendukung *sovereignty* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam rangka menjaga ketersediaan uang Rupiah yang cukup, layak edar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan uang Rupiah melalui berbagai langkah strategis sepanjang triwulan I 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi uang Rupiah, menjaga kualitas uang yang beredar, serta mendukung efektivitas pengelolaan uang Rupiah secara nasional. Sebagai bagian dari upaya dimaksud, pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melaksanakan monitoring berkala terhadap kebutuhan uang Rupiah di perbankan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kebutuhan likuiditas uang tunai perbankan, mengantisipasi potensi peningkatan permintaan dari masyarakat maupun pemerintah daerah, serta memastikan kesiapan pemenuhan kebutuhan uang Rupiah di



Peluncuran Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026 di Jakarta.

berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bank Indonesia juga melakukan persiapan pelaksanaan Survei Tingkat Kelayakan Uang (STKU) Semester I Tahun 2026 untuk mengukur Indeks Kelayakan Uang atau *soil level*. Persiapan tersebut mencakup penyusunan dan penyempurnaan metodologi, koordinasi awal pelaksanaan survei, serta penguatan kesiapan operasional guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif terkait kualitas dan tingkat kelayakan uang Rupiah yang beredar di masyarakat. Hasil survei akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan uang Rupiah yang lebih efektif dan tepat sasaran.

15) Transaksi sistem pembayaran yang cepat, mudah, dan murah

Bank Indonesia terus mengimplementasikan berbagai kebijakan sistem pembayaran untuk memperkuat efektivitas kebijakan sistem pembayaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut difokuskan pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan pembayaran digital yang efisien, aman, dan terjangkau, serta penguatan dukungan terhadap percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Sepanjang triwulan I 2026, Bank Indonesia mendorong perkembangan transaksi, jumlah pengguna, dan jumlah *merchant* sistem pembayaran agar terus berakselerasi dan melampaui target. Total pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada triwulan I 2026 tercatat sebanyak 61,70 juta, dengan jumlah *merchant* QRIS yang meningkat menjadi 44

juta. Akselerasi QRIS juga terlihat dari kenaikan volume transaksi sebesar 116,43% (yoy), dimana volume transaksi QRIS pada triwulan I 2026 mencapai 5,67 miliar transaksi. Sejalan dengan itu, digitalisasi sistem pembayaran juga tecermin dari pertumbuhan digital payments sebesar 8,1% (ytd), dengan volume transaksi mencapai 14,82 miliar transaksi. Selain itu, implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) terus menunjukkan perkembangan positif, tecermin dari volume transaksi SNAP pada triwulan I 2026 yang mencapai 6,30 miliar transaksi, meningkat 82,66% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam rangka memperluas akseptasi pembayaran digital, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dan inovasi sistem pembayaran yang inklusif dan efisien. Sejak tahun 2025, Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS sebesar 0% bagi Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan nominal tertentu, serta MDR QRIS sebesar 0% bagi Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO). Kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan biaya transaksi, memperluas penggunaan QRIS oleh pelaku usaha mikro, serta meningkatkan kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran atas berbagai layanan publik. Selain itu, Bank Indonesia terus memperluas implementasi QRIS Tap sebagai inovasi pembayaran berbasis teknologi nirsentuh untuk mendukung transaksi yang semakin cepat, praktis, dan efisien.

Sejalan dengan arah kebijakan sistem pembayaran yang *pro-growth*, Bank Indonesia juga melanjutkan

sejumlah kebijakan untuk menjaga keterjangkauan layanan pembayaran bagi masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain mencakup perpanjangan relaksasi kartu kredit, khususnya terkait batas minimum pembayaran dan denda keterlambatan, serta keberlanjutan tarif layanan transfer melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran aktivitas transaksi masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, Bank Indonesia terus memperkuat akseptasi pembayaran digital melalui implementasi strategi pencapaian target QRIS secara nasional, termasuk perluasan ekosistem penggunaan QRIS di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Di sisi konektivitas lintas negara, Bank Indonesia secara berkelanjutan menindaklanjuti penguatan kerja sama pembayaran digital antara Indonesia dengan Korea Selatan dan Tiongkok melalui pengembangan QRIS Antarnegara. Langkah ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya transaksi lintas batas yang semakin mudah, efisien, dan terintegrasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital kawasan.

16) Terwujudnya industri jasa sistem pembayaran yang memenuhi Standard Kompetensi, Manajemen Risiko dan Infrastruktur Teknologi (KMI)

Bank Indonesia senantiasa memperkuat keandalan industri sistem pembayaran dan mendukung terselenggaranya layanan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan berintegritas. Bank Indonesia melakukan pengembangan dan implementasi Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SK SP) bagi sumber daya manusia pelaku industri bidang SP, baik Bank maupun Lembaga Selain Bank. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi, penguatan tata kelola, serta mitigasi risiko operasional dan keamanan siber di sektor sistem pembayaran.

Sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi SDM industri SP, pada triwulan I 2026 dilakukan asesmen dalam rangka memperoleh rekomendasi menuju kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang sistem pembayaran. Kaji ulang SKKNI bertujuan untuk memastikan SKKNI Bidang SP relevan terhadap dinamika perkembangan SP, selaras dengan arah kebijakan dan regulasi terkini, serta adaptif terhadap kebutuhan industri. Bank Indonesia

bersinergi dengan asosiasi industri terkait untuk melakukan pembahasan dan diskusi penyempurnaan SKKNI bidang Sistem Pembayaran No.178 Tahun 2022 yang mencakup 7 (tujuh) sub-bidang yaitu: (i) Pengelolaan Transfer Dana, (ii) Penatausahaan Surat Berharga Negara Milik Nasabah, (iii) Pengelolaan Uang Tunai, (iv) Pemrosesan Transaksi Pembayaran, (v) Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing, (vi) Setelmen Transaksi Tresuri, dan (vii) Setelmen Pembayaran Transaksi *Trade Finance*. Review dan pemetaan terhadap SKKNI bidang Sistem Pembayaran untuk: (i) memastikan kesesuaian SKKNI dengan perkembangan Sistem Pembayaran, kebutuhan pelaku industri, serta arah kebijakan dan regulasi terkini serta (ii) meningkatkan efektivitas SKKNI dalam implementasi SK SP.

Bank Indonesia juga terus melakukan serangkaian koordinasi dan berkolaborasi bersama mitra kerja terkait sebagai upaya mendorong implementasi SK SP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), asosiasi industri terkait, pelaku industri (Bank dan Lembaga Selain Bank), Lembaga Pelatihan Kerja Sistem Pembayaran (LPK SP), Lembaga Sertifikasi Profesi Sistem Pembayaran (LSP SP) menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran (PBK SP) dan Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran bagi sumber daya manusia pelaku industri. Selain itu, Bank Indonesia melaksanakan sosialisasi kesiapan operasional dan keamanan teknologi informasi (TI) dalam menghadapi HBKN. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan penyelenggara sistem pembayaran dalam mengantisipasi peningkatan volume transaksi masyarakat selama periode HBKN, termasuk melalui penguatan aspek operasional, kapasitas infrastruktur, manajemen risiko, serta keamanan siber. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran, keandalan, dan keamanan layanan sistem pembayaran selama periode meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.

17) Infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan andal

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI), yang meliputi BI-RTGS, BI-FAST, dan SKNBI, guna memastikan tingkat *availability* dan stabilitas sistem tetap terjaga. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui pemantauan operasional secara

berkesinambungan, penguatan kapasitas sistem, serta penerapan langkah mitigasi risiko untuk memastikan kelancaran proses transaksi pembayaran masyarakat dan pelaku usaha. Langkah ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas transaksi sistem pembayaran digital di Indonesia.

Selain itu, pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah menerbitkan pengaturan terhadap industri sistem pembayaran. Melalui PADG Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan BI-FAST sebagai wujud penyesuaian pengaturan BI-FAST dengan PBI Nomor 10 Tahun 2025 dan PADG Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran, Bank Indonesia berupaya mempersiapkan industri sistem pembayaran yang berdaya tahan. Pengaturan turut ditujukan untuk memperkuat ekosistem infrastruktur sistem pembayaran yang aman dan andal, khususnya dalam masa transisi menuju implementasi New BI-FAST dan *fast payment industry*. Bank Indonesia juga terus memastikan infrastruktur sistem pembayaran memenuhi standar internasional melalui pelaksanaan *monitoring*, uji skenario, pemeliharaan sistem, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan resiliensi infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia terhadap potensi gangguan operasional maupun risiko siber, sekaligus mendukung penerapan praktik terbaik internasional dalam pengelolaan infrastruktur sistem pembayaran. Dengan langkah tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat fondasi sistem pembayaran nasional yang aman, andal, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi digital.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia juga melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Industri, dalam hal ini penyelenggaraan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Industri. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia senantiasa melakukan komunikasi dan edukasi, serta memperkuat koordinasi dengan industri guna memastikan efektivitas pengelolaan risiko, mendukung peningkatan tingkat ketersediaan layanan (*service availability*) secara berkelanjutan, serta memperkuat resiliensi sistem pembayaran dalam memitigasi risiko operasional layanan SP. Sehingga pada akhirnya menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan sistem pembayaran. Koordinasi secara intensif dengan industri senantiasa dilakukan guna memastikan kesiapan operasional, menjaga tingkat ketersediaan

layanan, serta memperkuat resiliensi sistem pembayaran dalam menghadapi pelaksanaan hari raya keagamaan yang secara historis meningkatkan pemanfaatan layanan SP secara signifikan.

18) Terwujudnya kebijakan dan program perlindungan konsumen nasional

Edukasi perlindungan konsumen terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan sistem pembayaran secara aman dan bertanggung jawab. Sepanjang triwulan I 2026, Bank Indonesia menyelenggarakan 1 kegiatan edukasi perlindungan konsumen dengan rerata tingkat pemahaman sebesar 4,92. Sebagai bagian dari upaya dimaksud, Bank Indonesia melaksanakan edukasi perlindungan konsumen di lingkungan pesantren pada tanggal 25 Februari 2026 yang dihadiri oleh sekitar 1.500 santri. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri mengenai hak dan kewajiban konsumen, keamanan bertransaksi digital, mitigasi risiko penipuan keuangan digital, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi dalam penggunaan layanan sistem pembayaran.

Melalui kegiatan edukasi tersebut, Bank Indonesia mendorong peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda di lingkungan pesantren, dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab. Langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat perlindungan konsumen serta mendukung terciptanya ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

PS 06 Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan perlindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Sinergi dalam digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian, termasuk meningkatnya kompleksitas inovasi keuangan digital serta perkembangan aset dan mata uang digital lintas batas. Di sisi domestik, percepatan ekonomi dan keuangan digital yang ditandai oleh peningkatan transaksi digital dan perluasan pelaku industri, memerlukan penguatan sinergi untuk memastikan pengelolaan risiko yang memadai, peningkatan perlindungan



Peluncuran ChatPindar pada Perayaan Anniversary ke-10 AFTECH di Jakarta.

konsumen, serta kesiapan infrastruktur dan pemerataan distribusi uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI. Merespons dinamika tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait lainnya guna mendorong akselerasi inovasi sistem pembayaran yang selaras dengan kapasitas ekosistem dalam mengelola risiko dan melindungi konsumen. Perkembangan *fintech* dan *e-commerce* turut membuka peluang bagi pelaku usaha, termasuk *start-up* dan non-bank, dalam menghadirkan solusi pembayaran yang semakin cepat, aman, dan efisien. Dalam kerangka tersebut, kolaborasi antara Bank Indonesia, asosiasi, dan industri menjadi kunci dalam mendorong percepatan ekonomi dan keuangan digital, termasuk dalam pengelolaan uang Rupiah. Selain itu, penguatan sinergi juga dilakukan dalam pengawasan ekonomi dan keuangan digital serta penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), guna mewujudkan: (i) efisiensi transaksi dan ekosistem EKD, (ii) terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta (iii) tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

19) Terjalinnnya sinergi dalam rangka mendukung percepatan ekonomi dan keuangan digital

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, otoritas

terkait, asosiasi industri, serta pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Penguatan kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem pembayaran digital yang semakin inklusif, inovatif, aman, dan terintegrasi, baik dalam lingkup domestik maupun lintas negara. Dalam rangka mendorong inovasi digital nasional, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Pedagang Valuta Asing dan Penyelenggara Transfer Dana Indonesia (APUVINDO), serta Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dalam pelaksanaan *launching* Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) pada 25 Februari 2026. Kehadiran PIDI diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi, pengembangan inovasi, dan penguatan kapasitas ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.

Di tingkat daerah, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berkolaborasi dalam pelaksanaan inisiasi Katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD). Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta memperluas implementasi pembayaran digital di berbagai sektor layanan publik daerah. Dalam mendukung implementasi P2DD, Bank Indonesia turut melaksanakan rapat koordinasi bersama Satuan Tugas P2DD pada tanggal 22 dan 29 Januari 2026. Rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas program P2DD serta membangun pemahaman yang selaras antar daerah

dalam pelaksanaan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas implementasi program digitalisasi daerah secara nasional.

Selain itu, Bank Indonesia bersama OJK melakukan koordinasi dalam persiapan penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Indonesia Fintech Summit, dan PIDI (FEKDIxIFSExPIDI). Kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Bank Indonesia juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi QRIS serta perlindungan konsumen dalam rangka mendukung perluasan sosialisasi *piloting* bantuan

sosial berbasis digital. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan QRIS secara aman dan efisien, sekaligus memperkuat aspek perlindungan konsumen dalam pemanfaatan layanan pembayaran digital.

Di tingkat internasional, Bank Indonesia terus memperluas konektivitas sistem pembayaran lintas negara melalui finalisasi kesepakatan implementasi QRIS dalam rangka perluasan QRIS *Cross Border*, antara lain dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Penguatan kerja sama tersebut mendukung kemudahan transaksi pembayaran lintas negara bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia di kawasan dan tingkat global.

Boks.6: Peluncuran PIDI – DIGDAYA x Hackathon 2026



Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) di Jakarta.

Bank Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional melalui pengembangan talenta muda yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) yang diluncurkan di Bank Indonesia, Jakarta, pada 23 Februari 2026, dengan mengusung tema “Berinovasi untuk Masa Depan, Memberdayakan Talenta Digital”. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ASPI, AFTECH, APUVINDO, dan LPPI, serta mempertemukan talenta muda, regulator, pelaku industri, dan investor dalam satu ekosistem inovasi yang terintegrasi.

PIDI diarahkan untuk mengakselerasi lahirnya solusi digital yang siap diterapkan di industri, memperluas inklusi keuangan, dan memberikan nilai tambah nyata

bagi perekonomian nasional. Inisiatif ini diwujudkan melalui program Digdaya dan Hackathon. Digdaya menjadi wadah penguatan kapasitas melalui pelatihan terstruktur dan sertifikasi berjenjang, sedangkan Hackathon berperan sebagai laboratorium inovasi untuk menguji gagasan, membangun prototipe, dan memvalidasi solusi berbasis kebutuhan riil industri. Melalui kedua program tersebut, peserta memperoleh dukungan yang komprehensif, mulai dari pelatihan, mentoring profesional, *business matching* dengan industri, hingga *job fair*. Fokus pengembangan solusi diarahkan pada tiga isu strategis, yaitu penguatan ketahanan dan inovasi keuangan, peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan serta penciptaan lapangan kerja, dan percepatan layanan publik, ekonomi kreatif, serta ekspor jasa digital.

Pelaksanaan PIDI menegaskan pentingnya sinergi antara otoritas, dunia usaha, dan talenta muda dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang kuat, aman, dan inklusif. PIDI diharapkan menjadi ruang aktualisasi gagasan yang mampu berkembang menjadi solusi nyata, implementatif, dan berskala luas bagi

kebutuhan masyarakat maupun industri. Dengan demikian, inisiatif ini diharapkan dapat mendukung peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan keuangan, penciptaan inovasi bernilai tambah, serta penguatan daya saing perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

20) Terjalinnnya sinergi dalam rangka mendukung Pengelolaan Uang Rupiah

Dalam rangka menjaga kelancaran pengelolaan uang Rupiah dan memastikan kecukupan uang tunai di masyarakat, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian/ lembaga terkait sepanjang triwulan I 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung kesiapan penyediaan uang Rupiah, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sebagai bagian dari upaya dimaksud, Bank Indonesia melaksanakan koordinasi bersama Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan Forum Mata Uang (FOMARU) Triwulan I Tahun 2026 pada tanggal 25 Februari 2026. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan terkait langkah-langkah pemenuhan kebutuhan uang Rupiah untuk periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) tahun 2026, termasuk penguatan koordinasi distribusi dan kesiapan operasional pengelolaan uang Rupiah. Melalui forum koordinasi tersebut, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan berupaya memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama periode RAFI. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran transaksi masyarakat, menjaga kepercayaan terhadap uang Rupiah, serta memperkuat efektivitas pengelolaan uang Rupiah secara nasional.

21) Terjalinnnya sinergi terkait penerapan prinsip Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), dan pengawasan Sistem Pembayaran (SP), serta penegakan perilaku pasar (*market conduct*)

Bank Indonesia terus mempererat koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait dalam penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), pengawasan sistem pembayaran, serta penegakan perilaku pasar (*market conduct*). Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melaksanakan dua kegiatan koordinasi yang menghasilkan dua kesepakatan. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat integritas industri sistem

pembayaran, meningkatkan efektivitas pengawasan dan mitigasi risiko, serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran nasional.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait implementasi APU/PPT di sektor sistem pembayaran. Koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi berupa rencana pelaksanaan *joint audit* bersama PPATK terhadap 11 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Layanan Remitansi, serta pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) bank. Sinergi pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kepatuhan penyelenggara sistem pembayaran terhadap ketentuan APU/PPT, meningkatkan efektivitas deteksi dan mitigasi risiko transaksi keuangan ilegal, serta mendukung terciptanya ekosistem sistem pembayaran yang aman, sehat, dan berintegritas. Selain itu, sinergi yang erat antarotoritas diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan kepatuhan secara menyeluruh di sektor jasa keuangan.

22) Terjalinnnya sinergi terkait Pelindungan Konsumen

Dalam rangka memperkuat literasi keuangan dan pelindungan konsumen di sektor sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mempererat sinergi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga. Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melaksanakan lima kegiatan koordinasi yang menghasilkan lima kesepakatan. Koordinasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat, memperluas jangkauan literasi keuangan, serta mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab.

Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan edukasi kepada civitas akademika Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai sistem pembayaran, pelindungan konsumen, serta literasi keuangan digital sebagai bagian dari penguatan

kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan. Selain itu, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyusunan modul edukasi bagi sektor prioritas untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan dan sistem pembayaran, termasuk aspek keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Sinergi juga dilakukan bersama Kementerian Perdagangan melalui koordinasi penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen di era digital.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia memperkuat kolaborasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam penyusunan modul edukasi bagi pelajar dan materi edukasi pada *Integrated Flat Panel*. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas integrasi materi literasi keuangan dan sistem pembayaran ke dalam media pembelajaran yang interaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI) dalam pelaksanaan edukasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta penyelenggaraan *Trainer of Trainers (ToT)* bagi pengajar PMI. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PMI mengenai penggunaan layanan keuangan dan sistem pembayaran yang aman, termasuk pengelolaan keuangan dan mitigasi risiko penipuan transaksi digital. Melalui berbagai sinergi tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat upaya literasi dan perlindungan konsumen secara inklusif dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya

ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang aman, terpercaya, dan berdaya saing.

PS 07 Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi

Tantangan lingkungan strategis global pada triwulan I 2026 semakin berat seiring meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan internasional akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, penguatan dolar AS, dan meningkatnya premi risiko investasi global. Kondisi tersebut mendorong volatilitas pasar keuangan yang lebih tinggi serta meningkatkan tekanan terhadap aliran modal dan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, perkembangan digitalisasi dan inovasi keuangan terus mendorong perubahan lanskap pasar keuangan yang memerlukan penguatan respons kebijakan dan pengawasan.

Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat strategi OM *pro-market* guna menarik aliran masuk portofolio asing sekaligus mendorong pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan PUVA guna menjaga stabilitas pasar keuangan, mendukung efektivitas transmisi kebijakan, serta mempercepat pendalaman pasar keuangan domestik. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus

BANK INDONESIA ANNUAL INVESTMENT FORUM 2026 BEYOND THE OLD PLAYBOOK: EMBRACING A NEW PARADIGM IN GLOBAL INVESTMENT BALI, 29TH - 30TH JANUARY 2026



Pembukaan Bank Indonesia Annual Investment Forum 2026 di Bali.

memperkuat dukungan infrastruktur pasar keuangan yang modern, andal, dan sesuai standar internasional, serta menindaklanjuti implementasi amanat UU P2SK terkait peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Bank Indonesia.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur, mengawasi, dan mengembangkan PUVA untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

23) Peningkatan volume transaksi dan likuiditas, serta harga yang transparan dan kredibel dalam rangka mewujudkan PUVA yang modern dan maju

Dalam rangka mendukung pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), Bank Indonesia terus memperkuat kerangka pengaturan melalui penerbitan ketentuan terkait transaksi valuta asing, termasuk ketentuan internal sebagai pedoman dalam pelaksanaan transaksi valuta asing, pengembangan derivatif PUVA, serta *Dealer* Utama PUVA. Penguatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepastian hukum, tata kelola transaksi, serta efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia di PUVA.

a) Pengembangan *Product* PUVA

Dari sisi pengembangan produk PUVA, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan produk pasar uang melalui berbagai inisiatif, antara lain melalui perluasan basis investor kepada non-bank untuk meningkatkan interkoneksi antar pelaku dan likuiditas pasar. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia telah melaksanakan diskusi pengembangan repo non-bank dengan pelaku pasar dan otoritas antara lain dengan OJK, APUVINDO, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Manajer Investasi, dan HIMDASUN. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan *marketability* Surat Berharga Komersial (SBK) agar lebih aktif diperdagangkan di pasar sekunder dan menjadi alternatif pendanaan jangka pendek yang lebih efisien bagi korporasi. Pada triwulan I 2026, koordinasi dilakukan dengan *issuer*, *arranger*, serta investor untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala dalam pengembangan SBK untuk mendukung asesmen *marketability* SBK. Koordinasi bersama OJK turut diperkuat dalam rangka perluasan basis investor, bersama

Kementerian Keuangan terkait harmonisasi perpajakan, serta bersama KSEI dalam kaitan dengan proses penatausahaan SBK.

Di pasar valuta asing, Bank Indonesia memperkuat pengembangan pasar keuangan domestik melalui berbagai inisiatif strategis. Inisiatif tersebut antara lain ditempuh melalui penguatan standar kontrak margin transaksi derivatif PUVA bekerja sama dengan International Swaps and Derivatives Association (ISDA), asosiasi industri, dan praktisi hukum, dengan melibatkan perbankan serta lembaga terkait guna mendukung harmonisasi praktik pasar domestik dengan standar internasional. Selain itu, pengembangan ekosistem PUVA Renminbi Tiongkok (RMB) dan Yen Jepang (JPY) terus didorong melalui asesmen dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung diversifikasi transaksi valuta asing dan memperkuat pendalaman pasar keuangan domestik. Penguatan tersebut dilengkapi dengan penyesuaian ketentuan transaksi valuta asing untuk mendukung pengembangan produk pasar valuta asing, termasuk penyesuaian *threshold* transaksi valuta asing terhadap rupiah tanpa dokumen *underlying*.

b) Pengembangan *Pricing* PUVA

Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan referensi harga acuan yang kredibel di pasar uang dan pasar valuta asing, antara lain melalui **INDONIA** sebagai referensi suku bunga rupiah. Dalam rangka pengembangan suku bunga acuan yang bersifat *forward-looking* berbasis transaksi *Overnight Index Swap* (OIS), Bank Indonesia akan memublikasikan suku bunga dan volume transaksi SRBI dan Repo di pasar sekunder guna meningkatkan transparansi serta mengakselerasi *price discovery* di pasar uang domestik dan pengembangan pasar OIS. Penguatan peran *Dealer* Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (DU PUVA) juga terus dilakukan sebagai upaya pengembangan pasar OIS yang lebih likuid dan efisien. Dalam hal ini, Bank Indonesia mendorong kewajiban *matchmaking* OIS, kuota harga OIS, serta perluasan *counterparty* OIS bagi DU PUVA guna meningkatkan likuiditas dan frekuensi transaksi, memperkuat *price discovery*, serta meningkatkan jumlah pelaku OIS di pasar domestik. Inisiatif ini dilakukan dalam rangka mendorong terbentuknya referensi harga yang lebih transparan dan kredibel di pasar uang.

Di pasar valuta asing, Bank Indonesia memastikan ketersediaan JISDOR sebagai referensi kurs rupiah terhadap dolar AS dan Kurs Acuan Non-USD/IDR. Ketersediaan referensi harga acuan tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi pembentukan harga, serta pendalaman PUVA yang modern dan berintegritas. Untuk mendukung ketersediaan referensi harga acuan yang kredibel di pasar valuta asing, melalui penerbitan PADG No.7 Tahun 2026, Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian waktu penerbitan JISDOR sebagai bentuk penguatan ketentuan untuk mengantisipasi model bisnis terkini.

c) **Pengembangan Derivatif PUVA**

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan ekosistem derivatif PUVA melalui penguatan aspek pelaporan dan perizinan. Sejalan dengan implementasi pelaporan transaksi Derivatif PUVA kepada Bank Indonesia yang efektif berlaku sejak 2 Februari 2026, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan sistem pelaporan serta pelaksanaan *coaching clinic* bagi pelaku pasar sebagai persiapan implementasi pelaporan. Penguatan pelaporan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data transaksi dan profil pengguna jasa secara lebih komprehensif guna mendukung transparansi pasar, pengawasan berbasis risiko, serta perumusan kebijakan pengembangan Derivatif PUVA yang berbasis data. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyusunan petunjuk teknis perizinan Derivatif PUVA serta penyempurnaan proses perizinan melalui pengembangan aplikasi perizinan Bank Indonesia (EASE tahap 2) guna memperkuat tata kelola, standardisasi proses, serta efektivitas layanan perizinan dalam mendukung pengembangan ekosistem Derivatif PUVA yang sehat dan kredibel.

d) **Pengembangan PUVA Syariah**

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia terus mengembangkan PUVA syariah dengan pendekatan 3P+I (produk, pelaku, *pricing* dan infrastruktur) untuk mendukung manajemen likuiditas perbankan syariah, mendorong peningkatan pembiayaan syariah, serta memperdalam pasar keuangan syariah. Sebagai upaya akselerasi pengembangan PUVA Syariah dilakukan pembentukan kembali Kelompok

Kerja PUVA Syariah dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), IIGMA Pasar Global Indonesia, Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan perwakilan perbankan syariah. Kelompok kerja tersebut difokuskan pada penguatan transaksi repo syariah, pengembangan inovasi produk dan instrumen PUVA Syariah, dan penguatan pelaku PUVA Syariah. Untuk memperkuat perumusan kebijakan terkait syariah, Bank Indonesia juga membentuk Tim Moneter dan PUVA Syariah 2026-2030.

Dari sisi produk, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan transaksi valuta asing syariah untuk mendukung stabilisasi nilai tukar, yang akan diterbitkan pada triwulan II 2026, serta memperluas basis investor Sukuk Bank Indonesia (SukBI). Pasca perluasan fitur SukBI pada Oktober 2025 yang membuka akses bagi investor nonbank dan nonresiden di pasar sekunder, telah tercatat pembelian SukBI oleh investor nonbank sebagai indikasi awal meluasnya basis investor SukBI di luar perbankan. Sejalan dengan itu, transaksi repo syariah dan repo SBSN juga menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Sementara dari sisi pelaku, Bank Indonesia terus mendorong perluasan pelaku transaksi PUVA Syariah antara lain melalui penandatanganan perjanjian kerjasama transaksi pendanaan pasar uang syariah dan/atau transaksi repo syariah untuk meningkatkan transaksi PUVA Syariah. Dalam rangka penguatan pelaku PUVA Syariah, Bank Indonesia terus melakukan asesmen kesiapan implementasi dealer utama PUVA Syariah yang ditujukan untuk mengurangi segmentasi pelaku PUVA Syariah dan mendukung implementasi kebijakan operasi moneter *pro-market*.

Dari sisi *pricing* (harga acuan), Bank Indonesia menyusun rencana pengembangan sistem yang mendukung *price discovery* dan rencana publikasi *reference rate* syariah. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat transparansi dan kredibilitas harga acuan di pasar keuangan syariah. Selanjutnya dari sisi infrastruktur, pengembangan infrastruktur PUVA Syariah dilakukan sejalan dengan pengembangan infrastruktur PUVA konvensional antara lain

BI-SSSS dan BI-ETP, untuk mendukung pasar keuangan syariah yang lebih dalam, likuid, dan berdaya saing.

Berbagai upaya tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Pada triwulan I 2026, rata-rata harian volume pasar uang syariah meningkat menjadi Rp 5,03 triliun atau tumbuh 11,28% dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar Rp 4,52 triliun. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat pengembangan produk, pelaku, harga acuan, dan infrastruktur, termasuk pengembangan transaksi repo syariah serta penguatan perjanjian induk repo syariah, guna mendukung terwujudnya PUVA Syariah yang modern, dalam, likuid, inklusif, dan sesuai prinsip syariah.

24) Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang aman dan andal serta Pelaku yang profesional dalam rangka mewujudkan PUVA yang modern dan maju

Dalam rangka mengakselerasi pendalaman PUVA, Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) secara terintegrasi serta pelaku pasar yang profesional. Pengembangan IPK dilakukan secara terarah dengan mengacu pada strategi pengembangan IPK dalam *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2030. Strategi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3I) sehingga mampu beroperasi secara andal, efisien, dan aman. Penguatan tersebut mencakup pengembangan infrastruktur pada sisi *front-end*, *middle-end*, dan *back-end*, termasuk penguatan infrastruktur data untuk mendukung pasar keuangan yang semakin modern dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus mendorong penguatan kapasitas dan profesionalisme pelaku pasar guna mewujudkan pelaku pasar PUVA yang aktif, kompeten, dan berintegritas.

a) Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK)

Pada triwulan I 2026, penguatan IPK dari sisi *front end* dilakukan melalui pengembangan Bank Indonesia–*Electronic Trading Platform* (BI-ETP). Pengembangan tersebut diarahkan untuk mengakomodasi transaksi lelang dan setelmen repo valuta asing menggunakan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI), yang telah diimplementasikan pada 30 Maret 2026. Selain itu, pada area sarana transaksi (*market operator*), Bank Indonesia telah memberikan persetujuan

kepada salah satu penyedia ETP pelaksanaan transaksi multilateral DNDF pada 25 Februari 2026.

Pada sisi *middle-end*, pengembangan IPK diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan *Central Counterparty* (CCP), perluasan layanan CCP, dan penguatan kelembagaan CCP. Dari sisi bisnis, Bank Indonesia mendukung penyiapan CCP untuk mengkliringkan transaksi repo melalui pelaksanaan asesmen, termasuk kebutuhan interkoneksi CCP dengan IPK yang diselenggarakan Bank Indonesia. Dari sisi kelembagaan, Bank Indonesia mendukung upaya CCP untuk memperoleh status *recognized* dari empat yurisdiksi, yaitu Inggris, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, melalui pemenuhan kesetaraan kerangka pengaturan dan pengawasan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi tersebut.

Pada sisi *back-end*, penguatan IPK dilakukan melalui modernisasi infrastruktur penyelesaian transaksi dan penguatan infrastruktur data PUVA. Pengembangan BI-SSSS sebagai kustodian sentral dan sistem setelmen surat berharga dilakukan baik pada sistem *existing* maupun *next generation*. Pada triwulan I 2026, telah dilakukan pengembangan BI-SSSS *existing* untuk mengakomodasi setelmen repo valuta asing menggunakan SVBI dan SUVBI. Sementara itu, untuk BI-SSSS *next generation* telah memasuki tahap penyusunan konsepsi bisnis dan fungsional pengembangan BI-SSSS.

Penguatan infrastruktur data juga terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan mendukung kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan konsepsi bisnis inisiatif *capturing pricing* untuk mendukung pembentukan *money market curve* dan Indonesia Sharia Overnight Index Average guna meningkatkan transparansi pembentukan harga di pasar uang. Implementasi atas inisiatif tersebut direncanakan pada tahun 2027. Selain itu, penguatan *data-driven policy* juga ditempuh melalui penyusunan metadata transaksi PUVA dan pengembangan konsepsi *data exchange platform* untuk mendukung perolehan data transaksi dari penyelenggara sarana transaksi secara lebih terintegrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga turut melaksanakan pengawasan serta *oversight* terhadap IPK dalam rangka menjaga stabilitas dan keandalan infrastruktur PUVA

guna mendukung tercapainya tujuan kebijakan Bank Indonesia. Fokus pelaksanaan pengawasan serta *oversight* terhadap IPK berbasis pemantauan perilaku (*behavior*), risiko (*risk*), dan kepatuhan (*compliance*), termasuk memastikan terpenuhinya standar internasional sebagaimana tercantum dalam *Principles of Financial Market Infrastructures* (PFMI). Pengawasan terhadap pelaku, khususnya terkait pemenuhan sertifikasi tresuri, menjadi salah satu fokus pengawasan Bank Indonesia dalam memastikan terjaganya aspek kompetensi dari pelaku PUVA yang memenuhi kriteria khusus sebagai *Dealer* Utama PUVA. Pemenuhan aspek kompetensi tersebut menjadi bahan evaluasi *Dealer* Utama PUVA secara berkelanjutan, dengan turut memastikan keterkaitan dengan pemenuhan kriteria transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

b) Pengembangan Pelaku PUVA

Sejalan dengan penguatan infrastruktur, Bank Indonesia terus mendorong konsolidasi pelaku PUVA guna mewujudkan pelaku pasar yang aktif, kompeten, dan berintegritas. Upaya tersebut antara lain ditempuh melalui peningkatan kepemilikan Sertifikat Tresuri, penguatan Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI), dan pengkinian *Market Code of Conduct* Edisi V. Pelaku yang aktif direfleksikan dari aktivitas dan peran yang dijalankan oleh *Dealer* Utama PUVA. Pada triwulan 1 tahun 2026, jumlah pemegang Sertifikat Tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia mencapai 1.907 *tresuri dealer*, sementara jumlah *Dealer* Utama PUVA tercatat sebanyak 21 bank. Aktivitas dan peran *Dealer* Utama juga terus dimonitor dan dievaluasi melalui asesmen TIKMI, termasuk pemenuhan kewajiban sebagai *Dealer* Utama.

Dalam pengembangan PUVA Syariah, Bank Indonesia turut memperkuat kualitas pelaku melalui penyusunan *handbook* transaksi SIPA dan repo syariah serta pengembangan profesi Ahli Syariah Pasar Uang. Berbagai langkah penguatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola, integritas, dan kompetensi pelaku pasar guna mewujudkan terciptanya PUVA yang modern dan maju.

25) Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah, OJK, dan LPS serta asosiasi dalam kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan literasi keuangan untuk

pendalaman pasar keuangan nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Dalam rangka memperkuat sinergi antarotoritas dalam pengembangan literasi dan edukasi keuangan, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait penyelenggaraan LIKE-IT. Koordinasi tersebut ditujukan untuk menyelaraskan konsep, pembagian peran, dan kesiapan pelaksanaan kegiatan sehingga penyelenggaraan LIKE-IT dapat berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan keuangan serta mendorong partisipasi publik dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penatausahaan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU No. 24 Tahun 2022 tentang Surat Utang Negara (SUN) dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengamanatkan bahwa kegiatan penatausahaan surat berharga yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berwenang menerbitkan nomor tunggal identitas investor (*Single Investor Identification*). Sebagai bagian dari penguatan kerja sama tersebut, pada 13 Maret 2026 Bank Indonesia dan KSEI menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama mengenai penerapan Nomor Tunggal Identitas Investor (*Single Investor Identification*) bagi investor surat berharga. Perpanjangan kerja sama ini diharapkan dapat semakin mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan penatausahaan surat berharga yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

PS 08 Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat fragmentasi perdagangan, tingginya volatilitas pasar keuangan internasional, serta eskalasi

LAUNCHING "AKSI KLIK" DAN "AKU BISA SEJAHTERA"

Literasi dan Akses Keuangan serta Ekonomi Berkelanjutan
untuk Kesejahteraan Keuangan

Jakarta, 6 Maret 2026



Launching "Aksi Klik" dan "Aku Bisa Sejahtera" di Jakarta.

risiko geopolitik, upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Di sisi lain, percepatan transformasi digital, penguatan agenda pembangunan hijau, serta kebutuhan untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM dan sektor prioritas, termasuk ekonomi hijau, menuntut penguatan sinergi kebijakan dan pengembangan ekosistem ekonomi-keuangan yang semakin terintegrasi. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan (IEKB) guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem, perluasan pembiayaan, serta peningkatan literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia serta mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai *net zero emission* pada 2060 atau lebih cepat.

Sementara itu, pemulihan daya beli yang belum merata, terbatasnya akses pembiayaan—termasuk pembiayaan syariah—serta meningkatnya kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit UMKM menjadi kendala utama dalam mendorong pertumbuhan usaha. Di samping itu, potensi besar sektor halal belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dan tata kelola keuangan sosial syariah perlu terus diperkuat. Kondisi tersebut menegaskan perlunya respons kebijakan yang komprehensif melalui perluasan akses pasar dan pembiayaan, akselerasi UMKM naik kelas dan berdaya saing, serta penguatan koordinasi dan ekosistem ekonomi-keuangan syariah secara terintegrasi.

Sepanjang triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

- 26) **Tercapainya pertumbuhan pembiayaan syariah, akses keuangan serta akses pasar bagi UMKM dan pelaku usaha syariah untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Dalam rangka memperkuat akses pembiayaan UMKM dan pembiayaan usaha syariah yang inklusif dan berkelanjutan, Bank Indonesia melaksanakan berbagai inisiatif strategis sepanjang triwulan I 2026. Upaya tersebut antara lain ditempuh melalui fasilitasi akses kredit/pembiayaan UMKM dan pembiayaan usaha syariah melalui *kick-off Business Project Showcase* (BPS) serta peluncuran program KEKSI dan AKU BISA SEJAHTERA sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagai *flagship* program fasilitasi pembiayaan syariah nasional dan bagian dari *Road to Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) 2026, BPS 2026 menghadirkan sejumlah penguatan. Upaya penguatan dilakukan melalui perluasan cakupan pembiayaan yang mencakup pembiayaan komersial dan keuangan sosial syariah (*blended finance*), perluasan peserta hingga mencakup UMKM, *halal start-up*, dan industri halal, serta perluasan keterlibatan lembaga keuangan

syariah, termasuk lembaga keuangan mikro syariah dan perusahaan penjaminan. Selain itu, dilakukan penajaman proses kurasi dan pendampingan pelaku usaha, optimalisasi *platform digital business matching*, serta integrasi dengan program literasi dan inklusi keuangan syariah.

Pelaksanaan BPS 2026 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahapan tersebut mencakup: (i) *Sharia Business Literacy* untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha; (ii) *Sharia Business Linkage* melalui kurasi, pendampingan, *bootcamp*, fasilitasi *business matching*, pengembangan berbagai skema pembiayaan inovatif, serta Gerakan Sadar Wakaf khususnya wakaf produktif; dan (iii) *Sharia Business Showcase* yang menampilkan realisasi serta komitmen pembiayaan (*business deals*). Rangkaian kegiatan dilaksanakan di tingkat nasional dan regional melalui penyelenggaraan BPS pada Festival Ekonomi Syariah (FESyar) regional Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia, serta Road to FESyar di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. Berbagai upaya tersebut mendukung penguatan intermediasi sektor keuangan syariah dan perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sejalan dengan hal tersebut, pembiayaan perbankan syariah pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 9,92% (yoy), menunjukkan tetap terjaganya kinerja pembiayaan syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia melakukan persiapan *Project Charter BPS* dan *Open Call* yang melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), *fintech*, asosiasi, serta lembaga sosial syariah. Program tersebut diarahkan untuk memperluas kolaborasi dan mendorong inovasi pembiayaan yang lebih terintegrasi. Bank Indonesia juga mempersiapkan *Business Matching* Pembiayaan tahun 2026 sebagai upaya mempertemukan UMKM dengan sumber pembiayaan potensial secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari penguatan literasi dan ekosistem keuangan berkelanjutan, Bank Indonesia turut meluncurkan *Indonesia Sustainable Report Forum*, penyelenggaraan *Sharia Economic and Finance Outlook (ShEFO) 2026*, kegiatan *Training of Trainers (ToT) Content Creator*, penyelenggaraan *Talkshow Halal* berkolaborasi bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), serta edukasi literasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap ekonomi dan

keuangan syariah, serta mendukung perluasan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

- 27) Terlaksananya program pemberdayaan, literasi, dan edukasi ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik konvensional maupun syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui berbagai program pemberdayaan dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup penguatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, dan peningkatan akses pembiayaan. Dalam rangka memperluas akses pasar internasional, Bank Indonesia memfasilitasi keikutsertaan UMKM terkurasi dalam berbagai kegiatan promosi dan *business matching* guna meningkatkan omzet, memperbesar peluang ekspor, serta fasilitasi akses pembiayaan. Hingga akhir triwulan I 2026, jumlah UMKM yang telah berdaya saing tercatat mencapai 11.811 UMKM.

Pada triwulan I 2026, UMKM binaan Bank Indonesia berpartisipasi dalam sejumlah pameran internasional. Beberapa pameran yang diikuti antara lain *Spring Fair UK* di Birmingham pada 1-4 Februari 2026, *International Food Exhibition (IFEX)* di ICE BSD City pada 5-8 Maret 2026, *Foodex Japan* di Tokyo pada 10-13 Maret 2026, serta *Melbourne International Coffee Expo (MICE)* pada 26-28 Maret 2026. Selain itu, Bank Indonesia juga menyelenggarakan IKRA sebagai ajang apresiasi dan kurasi UMKM unggulan. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM Indonesia dan meningkatkan daya saing produk unggulan nasional di pasar global.

Sejalan dengan penguatan daya saing UMKM, Bank Indonesia juga terus mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan usaha melalui berbagai kegiatan edukasi dan diseminasi. Pada triwulan I 2026, dilakukan diseminasi Pedoman Implementasi Model Bisnis UMKM Hijau dan Pedoman Implementasi Model Bisnis Pertanian Berkelanjutan Komoditas Padi kepada Kementerian/Lembaga, pelaku industri, UMKM, dan akademisi. Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan literasi melalui diseminasi kebijakan keuangan hijau dan berkelanjutan Bank Indonesia kepada UMKM Binaan dan mitra. Di sisi lain, Bank Indonesia terus mendorong peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan melalui edukasi penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) berkoordinasi dengan Kementerian dan

Lembaga kepada para *trainers* di Kalimantan Tengah dan D.I. Yogyakarta. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan yang lebih baik, sehingga mendukung akses pembiayaan dan penguatan tata kelola usaha secara berkelanjutan.

Bagi pelaku usaha syariah berbasis pesantren, Bank Indonesia telah melakukan ToT pencatatan keuangan digital dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) yang diikuti oleh akademisi di Kalimantan Tengah. Melalui pelatihan tersebut, peserta akademisi yang hadir diharapkan dapat melakukan pelatihan kepada pesantren yang ada di wilayahnya. Pelatihan serupa selanjutnya akan diperluas ke berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan kapasitas ekonomi pesantren.

Dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi pesantren, Bank Indonesia juga melanjutkan *piloting* dan replikasi pengembangan model bisnis di pesantren, khususnya model bisnis pertanian komoditas penyumbang inflasi. Pengembangan model bisnis tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan (*income generation*) dan/atau pengurangan biaya (*cost reduction*). Pengembangan dan penerapan model bisnis dimaksud dilakukan dengan tetap mengimplementasikan prinsip ekonomi hijau, adaptasi digitalisasi, dan praktik yang sesuai standar dari sisi hulu sampai hilir. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong pengembangan dan perluasan *virtual market* Pesantren Nusantara (Pesantara) untuk memfasilitasi transaksi antarpesantren secara digital sehingga dapat meningkatkan kemudahan, efisiensi biaya transaksi, dan mendorong terbentuknya kerja sama antarpesantren.

28) Terjalannya koordinasi / kerja sama / kesepakatan dengan otoritas (termasuk KSSK, OJK, dan Pemerintah) / Asosiasi / Komunitas / Lembaga Nasional dan Internasional dalam rangka ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik konvensional maupun syariah

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan K/L dan mitra kerja terkait dalam rangka mendukung ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik konvensional maupun syariah. Berbagai upaya tersebut menghasilkan 2 kesepakatan dan tindak lanjut strategis yang diarahkan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung transisi menuju perekonomian yang berkelanjutan. Pada area keuangan berkelanjutan, Bank Indonesia berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah

(RPP) terkait Pengembangan Keuangan Berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan landasan kebijakan dalam mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia turut berkontribusi dalam finalisasi *Common Ground Framework for CRST in ASEAN* guna mendorong harmonisasi kerangka kerja dan penguatan kolaborasi regional ASEAN dalam pengembangan pembiayaan dan instrumen keuangan berkelanjutan. Langkah tersebut mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung agenda keberlanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan integrasi kawasan melalui penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Pada area ekonomi dan keuangan inklusif syariah, Bank Indonesia dan OJK memperkuat koordinasi untuk mengembangkan pembiayaan UMKM syariah dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Dalam pertemuan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan sejumlah program dan inisiatif terkait penguatan pembiayaan UMKM syariah, antara lain penguatan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS), pengembangan model *blended financing*, pemberdayaan ekonomi pesantren, serta penguatan *business matching* pembiayaan UMKM. Selain itu, disampaikan pula pengembangan alternatif instrumen pembiayaan syariah seperti *salam*, *istishna'*, *supply chain financing*, dan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) guna mendukung pembiayaan UMKM yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor riil. Sejalan dengan itu, OJK menyampaikan dukungan terhadap penguatan ekosistem pembiayaan UMKM syariah, termasuk melalui penguatan peran lembaga jasa keuangan non-bank, peningkatan literasi dan pendampingan UMKM, serta pengembangan model bisnis pembiayaan bagi segmen mikro dan *unbankable*. OJK juga menyampaikan kesiapan untuk bersinergi dalam pengembangan program pesantren dan penguatan fungsi sosial perbankan syariah untuk UMKM.

Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia dan OJK menyepakati penguatan kolaborasi melalui integrasi berbagai program. Kedua lembaga sepakat untuk mensinergikan program Bulan Pembiayaan Syariah, Program UMKM yang diinisiasi OJK, dan Gerakan Aku Bisa yang diinisiasi Bank Indonesia, termasuk pemanfaatan data non-konfidensial terkait UMKM dan pembiayaan. Bank Indonesia dan OJK juga sepakat mendorong pengembangan model bisnis pembiayaan UMKM, pelaksanaan *pilot project* desa ekosistem syariah dan pembiayaan pesantren, serta pelaksanaan *joint research* BI-OJK-BNM terkait *Islamic Money Market*. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat

pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif syariah, yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,

khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM dan penguatan kelembagaan pesantren.

Boks.7: Pelaksanaan *Launching* AKSI KLIK dan AKU BISA SEJAHTERA



Launching "Aksi Klik" dan "Aku Bisa Sejahtera" di Jakarta.

Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan program “Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan” (AKSI KLIK) dan Gerakan “Akses Keuangan melalui *Business Matching* dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan” (AKU BISA SEJAHTERA) pada 6 Maret 2026 di Grha Bhasvara Icchana (GBI), Bank Indonesia. Peluncuran dilakukan bersama oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), serta dirangkaikan dengan *soft launching* Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden RI dengan UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) pada November 2025. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga, industri keuangan, akademisi, asosiasi pengusaha, dan pelaku UMKM sebagai bentuk sinergi untuk memperkuat literasi, inklusi, dan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Peluncuran program dilatarbelakangi oleh masih lebarnya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74%, namun tingkat literasi keuangan masih tercatat 66,46%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan akses layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak, produktif, dan terlindungi. Di sisi lain, sektor UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% PDB masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.

Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperkuat kapasitas dan keterhubungan usaha.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia meluncurkan tiga publikasi strategis yang menjadi fondasi program penguatan literasi dan inklusi keuangan. *Pertama*, Buku Strategi dan Program Edukasi dalam Rangka Literasi Keuangan Digital Menuju Kesejahteraan Keuangan, yang menjadi kerangka kebijakan edukasi keuangan nasional dan diserahkan kepada DNKI sebagai acuan. *Kedua*, Buku Panduan Modul Edukasi Keuangan Digital untuk Pelatihan Tingkat Dasar, yang menyediakan instrumen edukasi khususnya bagi pelaku UMKM mikro, pelajar, mahasiswa, perempuan, dan masyarakat di daerah 3T, dengan mekanisme implementasi melalui *Training of Trainers* (ToT). *Ketiga*, Buku Pedoman Implementasi Model Bisnis UMKM Berkelanjutan: AKSI Mitigasi, yang memberikan panduan penerapan prinsip usaha berkelanjutan mencakup aspek mitigasi, sosial, dan tata Kelola yang diselaraskan dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk memperluas akses pembiayaan hijau. Gerakan AKU BISA SEJAHTERA melengkapi ketiga publikasi tersebut dengan mengintegrasikan edukasi keuangan dan *business matching* pembiayaan sebagai aksi konkret, untuk menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan secara langsung dan terstruktur.

Dalam sesi diskusi, para narasumber menekankan pentingnya transformasi kebijakan dari sekadar perluasan inklusi keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan (*financial well-being*). Dalam kaitan ini, kebijakan Pemerintah difokuskan



Launching "Aksi Klik" dan "Aku Bisa Sejahtera" di Jakarta.

pada penguatan sektor keuangan, inovasi digital, dan perlindungan konsumen. Dari sisi Bank Indonesia menekankan perlunya strategi literasi yang berjenjang sesuai segmen sasaran, disertai pemantauan dan evaluasi yang terukur agar program benar-benar berdampak pada pemberdayaan UMKM. Sementara itu, dari sisi asosiasi menyoroti kebutuhan UMKM akan pendampingan jangka panjang dan insentif yang konkret, terutama dalam menghadapi tuntutan pasar global terhadap praktik usaha yang berkelanjutan.

Peluncuran AKSI KLIK dan AKU BISA SEJAHTERA merupakan wujud komitmen Bank Indonesia bersama Pemerintah dalam mendorong transformasi literasi keuangan dari pendekatan berbasis akses menuju kerangka kesejahteraan keuangan yang menyeluruh. Inisiatif ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian target literasi dan inklusi keuangan nasional, serta mendorong UMKM Indonesia untuk mengakses pembiayaan yang lebih luas, termasuk pembiayaan berkelanjutan yang selaras dengan agenda ekonomi hijau.

PS 09 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional di tengah dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks, ditandai dengan fragmentasi yang meluas, diikuti kebijakan proteksionisme antara lain penerapan tarif resiprokal oleh AS yang kemudian memicu kebijakan balasan dari berbagai negara. Ketidakpastian tersebut juga berdampak pada aliran modal *emerging market* yang bergeser ke *safe-haven asset*, sehingga meningkatkan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Melalui kebijakan internasional yang strategis dan proaktif, seperti mendorong transaksi berbasis mata uang lokal, menjaga kepercayaan lembaga internasional dan pemeringkat dengan pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian nasional, serta strategi diplomasi di forum internasional, Bank Indonesia turut menjaga perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah situasi global yang semakin menantang.

Sepanjang Triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

29) Terjalinnnya kerja sama internasional bilateral Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter mitra yang mendukung kepentingan Bank Indonesia/ Republik Indonesia

Dalam rangka memperkuat kerja sama internasional, Bank Indonesia melaksanakan berbagai inisiatif strategis dengan bank sentral dan/atau otoritas moneter negara mitra sepanjang triwulan I 2026. Upaya penguatan kerja sama internasional Bank Indonesia antara lain dilakukan melalui penyelesaian *Operational Guidelines (OG) Local Currency Transaction (LCT)* antara Bank Indonesia dan Japan Ministry of Finance. OG tersebut merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman/*Memorandum of Cooperation (MOC) in Local Currency Transaction* yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dan Japan Ministry of Finance untuk mendorong penggunaan

mata uang lokal dalam transaksi bilateral yang berlaku sejak 15 Desember 2025. Melalui kerja sama ini, Bank Indonesia dan JMOF akan memperkuat kolaborasi dalam mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi ekonomi dan keuangan bilateral, termasuk untuk inisiatif *cross-border payment*, guna mendukung pengembangan pasar keuangan serta memperkuat stabilitas sistem keuangan di kedua negara. Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan keuangan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Jepang.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral Indonesia-Jepang yang lebih luas, termasuk untuk inisiatif *cross-border payment linkages*. Bank Indonesia melakukan sosialisasi dan *campaign* implementasi QRIS *Cross-border* Indonesia-Jepang dalam kegiatan Japan-Indonesia (JAPINDA) *Seminar on Digital Economy and Human Resources* pada Januari 2026 serta rangkaian kegiatan *Foodex 2026* di Jepang dan *event* Shibuya Sakura di Jepang pada Maret 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan pemanfaatan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR antara Indonesia dan

Jepang guna mendukung kemudahan transaksi bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat integrasi ekonomi dan ekosistem pembayaran digital antarnegara.

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama *Local Currency Transaction (LCT)* dengan bank sentral mitra sebagai strategi diversifikasi mata uang pada transaksi bilateral untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal. Dalam mendorong implementasi LCT, Bank Indonesia menerapkan dua strategi yaitu (i) *refocusing* melalui penajakan intensifikasi cakupan kerja sama dengan negara mitra *existing* dan perluasan kerja sama dengan negara mitra baru, serta (ii) *restrategizing* pelaksanaan sosialisasi 3T (*Targeted, Terintegrasi, Terencana*), termasuk melalui koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT. Strategi ini berhasil meningkatkan capaian nilai transaksi LCT dan rerata pengguna bulanan pelaku LCT secara signifikan. Sepanjang triwulan I 2026, nilai transaksi LCT mencapai ekuivalen USD13,62 miliar atau meningkat sebesar 155% (yoy) dari capaian triwulan I 2025. Rerata bulanan pengguna LCT mencapai 15.526 Pelaku usaha, meningkat 59,73% dari 2025 sebesar 9.720 Pelaku usaha pengguna per bulan.

Boks.8: Penandatanganan BCSA Bank Indonesia-Bank of Korea



Penandatanganan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Bank Indonesia dan Bank of Korea di Jakarta

Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati perpanjangan perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal masing-masing negara (*Bilateral Currency Swap Arrangement / BCSA*) pada 5 Februari 2026. *Bilateral Currency Swap Arrangement* merupakan bentuk kerja sama keuangan bilateral yang umum dilakukan antar bank sentral untuk saling mempertukarkan mata

uang lokal masing-masing negara dengan kesepakatan bahwa mata uang tersebut akan ditukar kembali pada waktu dan nilai yang telah disepakati.

Perjanjian ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Korea, Rhee, Chang Yong. Perjanjian BCSA tersebut memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara

kedua bank sentral hingga senilai KRW10,7 triliun atau Rp115 triliun. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendorong perdagangan bilateral dan memperkuat kerja sama keuangan antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama BCSA juga akan mendukung penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan regional. Kerja sama BCSA antara Bank Indonesia dan Bank of Korea

pertama kali ditandatangani pada Maret 2014 dan telah beberapa kali diperpanjang. Perpanjangan kali ini berlaku selama lima tahun, yaitu mulai 6 Maret 2026 hingga 5 Maret 2031, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua bank sentral.

Penandatanganan perjanjian ini mencerminkan eratnya hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan, termasuk kerja sama bidang keuangan antara kedua bank sentral.

30) Terjaganya kepentingan Bank Indonesia/Republik Indonesia melalui peningkatan pengaruh, kontribusi, dan keterwakilan dalam forum/organisasi/lembaga/kerja sama internasional

Dalam rangka memperkuat komunikasi kebijakan dan menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia, Bank Indonesia terus meningkatkan *engagement* dengan investor global, lembaga pemeringkat, dan lembaga internasional sepanjang triwulan I 2026. Pada triwulan I 2026, terdapat 3 laporan publikasi oleh lembaga internasional dan lembaga pemeringkat, yang meliputi hasil *Sovereign Credit Rating* (SCR) 2026 oleh Moody's dan Fitch, serta pelaksanaan *Article IV Consultation* Indonesia oleh IMF.

Pada 5 Februari 2026, lembaga pemeringkat Moody's mempertahankan SCR Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian *outlook*. Afirmasi *rating* Indonesia oleh Moody's mencerminkan ketahanan ekonomi yang tetap kuat melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid, serta didukung oleh kekuatan struktural termasuk sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, sehingga menopang prospek pertumbuhan jangka menengah. Afirmasi *rating* Indonesia juga didukung oleh kredibilitas kebijakan moneter dan kehati-hatian fiskal yang terjaga, yang mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, revisi *outlook* dipengaruhi oleh pandangan Moody's akan risiko dari penurunan kepastian kebijakan, yang apabila berlanjut dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

Sejalan dengan Moody's, lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) pada 4 Maret 2026 juga mempertahankan SCR Republik Indonesia pada BBB dan melakukan penyesuaian *outlook*. Fitch menyatakan bahwa afirmasi *rating* Indonesia mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dengan prospek pertumbuhan jangka menengah yang solid, rasio

utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah, dan ketahanan eksternal yang memadai. Sementara, revisi *outlook* dipengaruhi oleh pandangan Fitch mengenai meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan Indonesia.

Persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia juga tercermin dalam *IMF Article IV Consultation Report* yang dirilis pada Januari 2026. Pada laporan tersebut, IMF menilai bahwa perekonomian Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah tekanan eksternal, didukung oleh inflasi yang terkendali serta sektor keuangan yang berdaya tahan. Capaian tersebut didukung oleh kerangka kebijakan yang solid, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta komitmen terhadap pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Komitmen otoritas terhadap kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati, reformasi struktural yang terarah, serta penguatan sinergi kebijakan menjadi fondasi utama bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Dalam laporannya, IMF juga memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,0% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026.

Selain publikasi berbagai laporan dan asesmen oleh lembaga pemeringkat dan lembaga internasional, Bank Indonesia juga memperkuat *investor outreach* melalui penyelenggaraan *Investor Conference Call* (ICC) sebanyak tiga kali sepanjang triwulan I 2026. Bank Indonesia juga melaksanakan berbagai *investor meeting*, baik secara grup maupun bilateral melalui kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri kepada *targeted stakeholders*. Pertemuan dengan investor dilakukan guna menyampaikan perkembangan terkini perekonomian, arah kebijakan, serta prospek ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus meningkatkan kualitas *engagement* dengan lembaga pemeringkat dan investor global melalui penyampaian *key messages* yang lebih *targeted* untuk menanggapi

perhatian dan *concern investor*. Pemetaan *concern investor* secara optimal dilakukan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan *machine learning*. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas komunikasi kebijakan, meningkatkan responsivitas terhadap dinamika pasar, serta mendukung terjaganya persepsi positif investor terhadap stabilitas dan prospek perekonomian Indonesia.

31) **Terjalinnnya sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memajukan ekonomi Republik Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan**

Dalam rangka memperkuat peran dan memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dalam forum serta kerja sama internasional, Bank Indonesia secara aktif berpartisipasi serta menyampaikan posisi (*stance*) dan pandangan kebijakan terkait berbagai isu strategis ekonomi dan keuangan global maupun regional sepanjang triwulan I 2026. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penyampaian posisi Bank Indonesia dalam perumusan kerja sama *Economic Growth Partnership* (EGP) Indonesia–Inggris yang diinisiasi Pemerintah, penyampaian posisi pada *9th Task Force ASEAN Swap Arrangement* (ASA), pembahasan dalam *SEACEN Special EXCO Meeting*, serta pemberian tanggapan atas *Staff Report* dan *Buff Statement* pada *Article IV Consultation for Indonesia* (AIV) 2025.

Pada 21 Januari 2026, Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pemerintah Inggris melalui Department for Business and Trade menandatangani *Economic Growth Partnership* (EGP) Indonesia–Inggris di sela kunjungan Presiden RI ke Inggris. Sebagai bagian dari *Accord for a New Strategic Partnership* Indonesia–Inggris, EGP menjadi fondasi penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, inovasi, dan jasa keuangan kedua negara. Dalam perumusan kerja sama tersebut, Bank Indonesia berperan aktif mendukung kerja sama di sektor keuangan dengan otoritas terkait di Inggris, antara lain melalui kolaborasi pengembangan *Islamic Finance*, guna memperkuat stabilitas sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank Indonesia berperan aktif memperjuangkan posisi Bank Indonesia dalam *9th ASEAN Swap Arrangement* (ASA) *Re-establishment Task Force Meeting* pada 15 Januari 2026 di Filipina. Pertemuan dimaksud membahas tindak lanjut atas elemen-elemen perjanjian ASA sebagai mekanisme kerja

sama likuiditas antarnegara ASEAN. ASA merupakan fasilitas swap keuangan kawasan yang ditujukan untuk menyediakan dukungan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota ASEAN dalam menghadapi tekanan neraca pembayaran dan kebutuhan stabilisasi makroekonomi. Sebagaimana pelaksanaan sebelumnya, dalam pertemuan TF ASA tersebut, Bank Indonesia secara aktif memperjuangkan posisi Bank Indonesia, a.l. terkait penguatan *safeguard measures* pada sejumlah elemen utama ASA. Upaya tersebut berkontribusi pada tercapainya konsensus seluruh elemen ASA oleh negara anggota ASEAN, yang selanjutnya telah dieskalasi untuk mendapatkan *endorsement Deputies* pada *31st ASEAN SLC Meeting*.

Dalam perannya sebagai *Chair* pada *SEACEN Special EXCO Meeting* tanggal 6 Februari 2026, Bank Indonesia memimpin pembahasan strategis terkait penyusunan *SEACEN Strategic Plan 2026-2030*. Pembahasan mencakup dua *building blocks* utama dalam *Strategic Plan*, meliputi: penguatan *structure and governance* serta *measurement*. Diskusi juga membahas penguatan kerangka anggaran jangka menengah. Pertemuan telah menyepakati sejumlah isu, antara lain dukungan terhadap transisi pengukuran kinerja SEACEN dari pendekatan berbasis *output* menjadi *outcome and quality-based measurement*.

Sejalan dengan penerbitan *IMF Article IV Consultation Report*, dalam proses penyusunannya Bank Indonesia berperan aktif dalam memperjuangkan persepsi positif perekonomian Indonesia dalam laporan tersebut melalui penyampaian posisi dan usulan tanggapan atas *Staff Report* dan *Buff Statement*. Dokumen *Staff Report* merupakan asesmen IMF atas kondisi dan prospek ekonomi Indonesia, sedangkan *Buff Statement* merupakan respons perwakilan otoritas Indonesia di IMF atas asesmen tersebut. Secara prinsip, Bank Indonesia menyampaikan posisi untuk menjaga akurasi data dan konsistensi narasi dengan publikasi otoritas Indonesia, menegaskan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global, serta memperkuat pesan mengenai bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap *pro-growth* dan *pro-stability*. Upaya ini penting agar publikasi IMF dapat merefleksikan kondisi perekonomian Indonesia secara tepat dan mendukung persepsi positif terhadap prospek ekonomi nasional. Keterlibatan aktif Bank Indonesia dalam berbagai forum dan kerja sama internasional tersebut ditujukan untuk memastikan kepentingan nasional dan perspektif Bank Indonesia terakomodasi secara optimal dalam pembahasan kebijakan internasional, sekaligus memperkuat koordinasi, kredibilitas, dan posisi Indonesia dalam dinamika ekonomi dan keuangan global.

Boks.9: Peran Bank Indonesia sebagai *co-chair* ASEAN SLC Meeting



Pembukaan ASEAN Senior Level Committee (SLC) Meeting di Boracay, Filipina.

Bank Indonesia berperan sebagai *co-chair* bersama State Bank of Vietnam (SBV) dalam pertemuan 31st ASEAN Senior Level Committee (SLC) Meeting pada 6 Maret 2026 di Boracay, Filipina. Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam 31st ASEAN SLC meliputi *Priority Economic Deliverables* ASEAN di bawah keketuaan Filipina pada forum ASEAN 2026, perkembangan dan outlook perekonomian kawasan, serta progres integrasi keuangan di kawasan melalui beberapa inisiatif di bawah *working committees*.

Sebagai *co-chair*, Bank Indonesia turut mengawal pembahasan strategis terkait arah integrasi keuangan ASEAN yang lebih resilien, inklusif, dan berkelanjutan. *Priority Economic Deliverables* keketuaan ASEAN 2026 Filipina antara lain mencakup pengembangan pasar keuangan ASEAN untuk mendukung keuangan berkelanjutan, penguatan ASEAN *Regional Payments Connectivity*, serta penguatan *financial health* kawasan guna mendorong inklusi keuangan. Agenda pembahasan kondisi perekonomian terkini mencakup diskusi kondisi

perekonomian di kawasan dan *outlook* perekonomian global di tengah tantangan global, ketegangan geopolitik, risiko perdagangan, dan potensi *spillover* terhadap stabilitas keuangan. Dalam diskusi, IMF dan AMRO menyampaikan bahwa penguatan integrasi kawasan—melalui peningkatan perdagangan, investasi, permintaan intra-regional, dan *structural upgrading* dengan transfer teknologi—dipandang penting untuk memperkuat ketahanan ASEAN terhadap guncangan eksternal. Pertemuan juga membahas upaya penguatan tata kelola dan struktur pertemuan ASEAN di jalur keuangan ke depan, melalui *project revive*.

Pelaksanaan peran aktif Bank Indonesia sebagai *co-chair* dalam 31st ASEAN SLC Meeting menegaskan kontribusi aktif Indonesia dalam pelaksanaan kerja sama di kawasan yang adaptif. Pertemuan telah mendiskusikan sejumlah isu penting, seperti progres inisiatif di bawah jalur keuangan (*finance track*) ASEAN, termasuk agenda *sustainable finance*, ASEAN Swap Arrangement (ASA), dan forum diskusi keamanan siber.

PS 10 Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan, serta dukungan organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional

Di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, Bank Indonesia terus memperkuat kapasitas kelembagaan guna memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang yang efektif, efisien, serta didukung tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. Dari sisi eksternal, meningkatnya ketidakpastian global, akselerasi teknologi digital, serta meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap organisasi

yang responsif, kredibel, transparan, dan *agile* mendorong perlunya penyempurnaan tata kelola, proses pengambilan keputusan, serta pengelolaan organisasi yang semakin adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, implementasi mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memerlukan penguatan kerangka kelembagaan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Merespons perkembangan tersebut, Bank Indonesia terus mengoptimalkan implementasi Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) melalui penyempurnaan proses bisnis, percepatan transformasi digital, pengelolaan sumber daya keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan, serta pengembangan sumber daya

manusia yang kompeten, profesional, berintegritas, dan relevan dengan kebutuhan bank sentral di era digital. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan organisasi yang semakin efektif, adaptif, dan berdaya tahan, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan Bank Indonesia dalam mendukung pencapaian tujuan yang diamanatkan Undang-Undang.

Sepanjang triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan bauran kebijakan kelembagaan, serta dukungan organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

32) Terlaksananya organisasi yang efektif dan transformatif dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional

Bank Indonesia terus memperkuat implementasi tata kelola yang baik dan profesional sebagai fondasi dalam mendukung kinerja kelembagaan yang efektif dan transformatif. Pada triwulan I 2026, upaya tersebut difokuskan pada persiapan pelaksanaan asesmen tata kelola melalui penguatan koordinasi dengan satuan kerja terkait, penyiapan data dan dokumen pendukung, serta evaluasi awal atas kecukupan ketentuan, proses bisnis, dan mekanisme pengendalian yang telah diterapkan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen sebelumnya guna memastikan implementasinya berjalan sesuai rencana dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang kredibel, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis terkini.

33) Terjaganya akuntabilitas dan kinerja keuangan lembaga

Sebagai wujud akuntabilitas kelembagaan kepada publik, Bank Indonesia menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban publik. Pengelolaan keuangan Bank Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kredibilitas Bank Indonesia yang berlandaskan kinerja efektif, efisien, dan berkepatuhan melalui terjaganya akuntabilitas keuangan Bank Indonesia. Sesuai amanat Undang-undang Bank Indonesia, pada 3 Februari 2026 Bank Indonesia telah menyampaikan LKTBI Tahun

2025 *unaudited* kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam rangka mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia memperkuat peran *internal control officer*, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan data dan dokumen pemeriksaan, serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Berbagai langkah tersebut ditempuh untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta menjaga akuntabilitas dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.

34) Tersedianya sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan baik secara kuantitas dan kualitas, yang kompeten, profesional, produktif, berintegritas, dan berahlak mulia

Dalam rangka memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Bank Indonesia terus memperkuat strategi pemenuhan dan pengelolaan SDM secara terencana dan adaptif. Sepanjang triwulan I 2026, pemenuhan kebutuhan SDM dilakukan melalui rekrutmen eksternal, antara lain melalui skema *borrow* tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan mekanisme *targeted referral* untuk mendukung kebutuhan kompetensi pada berbagai area tugas Bank Indonesia. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga melanjutkan proses rekrutmen melalui jalur *special hire* guna memperoleh talenta dengan kompetensi spesifik yang dibutuhkan organisasi. Hingga akhir triwulan I 2026, proses tersebut telah memasuki tahap tes psikologi. Berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemenuhan SDM yang *agile* dan terarah guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang semakin kompleks.

Dari sisi pemenuhan internal, Bank Indonesia turut melakukan pemenuhan kebutuhan SDM melalui berbagai program pengembangan karier untuk mendukung kebutuhan organisasi. Pemenuhan internal dimaksud antara lain mencakup penetapan Kelompok Pegawai Pimpinan (KPP), promosi *grade*, penetapan peserta Sespi, dan promosi pangkat sesuai kalender pengelolaan SDM. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk memastikan tersedianya talenta yang siap mengisi kebutuhan organisasi, sekaligus mendukung pengembangan karier pegawai yang objektif, terencana, dan selaras dengan kebutuhan kelembagaan.

PS 11 Merumuskan dan implementasi landasan hukum, manajemen risiko, audit internal, dan komunikasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional

Pelaksanaan mandat Bank Indonesia yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian global, percepatan transformasi digital, dan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang memerlukan dukungan tata kelola yang kuat untuk menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan. Di sisi lain, implementasi mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga, serta berkembangnya risiko yang dihadapi organisasi menuntut penguatan fungsi pendukung tata kelola secara berkelanjutan.

Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat landasan hukum, manajemen risiko, audit intern, dan komunikasi sebagai bagian integral dari upaya menjaga kualitas tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. Penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan dan proses bisnis didukung oleh kerangka hukum yang memadai, pengelolaan risiko yang efektif, pengendalian intern yang andal, serta komunikasi yang transparan dan kredibel. Dengan dukungan fungsi-fungsi tersebut, Bank Indonesia dapat menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang.

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan landasan hukum, manajemen risiko, audit internal, dan komunikasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

35) Terpenuhinya peraturan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dan kebutuhan Bank Indonesia dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia terus memperkuat kecukupan landasan hukum melalui penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan yang berlaku dan menerbitkan ketentuan baru guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Dalam periode tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan 26 (dua puluh enam) peraturan,

yang terdiri dari 5 (lima) peraturan yang bersifat prinsipil dan strategis serta 21 (dua puluh satu) peraturan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan yang bersifat prinsipil dan strategis. Penerbitan peraturan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan maupun tindak lanjut atas peraturan perundang-undangan, antara lain UU Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK. Selain itu, penerbitan peraturan juga dilakukan untuk merespons dinamika kebijakan dan kebutuhan penguatan fungsi kelembagaan secara menyeluruh.

Secara umum, pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. Tahapan dimaksud meliputi: (i) asesmen hukum secara komprehensif terhadap area kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan; (ii) proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; serta (iii) koordinasi dengan mitra kerja terkait. Seluruh proses tersebut dimaksudkan agar peraturan yang diterbitkan dapat mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, selaras dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta sesuai dengan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36) Terpenuhinya tingkat maturitas manajemen risiko dan audit intern dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional

Dalam rangka memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan efektivitas pengendalian internal, Bank Indonesia melaksanakan asesmen dan merumuskan rencana pengendalian risiko sesuai dengan rencana tahunan manajemen risiko. Hal ini ditujukan agar risiko di area kelembagaan dapat dikendalikan dengan baik sehingga memberi keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga melaksanakan audit strategis, kepatuhan, dan keuangan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026. Pelaksanaan audit tersebut merupakan perwujudan fungsi audit intern dalam memberikan *assurance* dan *advisori* guna memastikan proses bisnis, pelaksanaan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik.

Dalam rangka penguatan maturitas manajemen risiko dan audit intern secara berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan evaluasi berkala serta menyusun rencana pengembangan berdasarkan hasil asesmen sebelumnya. Upaya tersebut

dilakukan untuk memperkuat kesiapan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pengendalian, sekaligus memastikan rekomendasi hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara terarah dan berkesinambungan. Bank Indonesia juga terus mengimplementasikan pemantauan risiko dengan dukungan standar, metodologi, dan sistem informasi digital, serta memperkuat budaya risiko di seluruh tingkatan organisasi. Hal ini ditujukan agar pengendalian risiko dapat dilakukan secara *forward looking* dengan dukungan kapasitas SDM yang memadai dalam mengelola risiko di setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan lembaga.

Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memperkuat integrasi tata kelola melalui sinergi fungsi hukum, manajemen risiko, dan audit intern. Pada triwulan I 2026, pelaksanaan asesmen integrasi tata kelola pada area BPPU telah dimulai dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pengendalian dan tata kelola kelembagaan. Sejalan dengan itu, persiapan asesmen maturitas audit internal juga terus dilakukan melalui koordinasi internal dan tindak lanjut atas hasil asesmen sebelumnya guna mendukung peningkatan kualitas pengendalian intern dan penguatan tata kelola organisasi secara berkesinambungan.

37) Kualitas komunikasi untuk pemenuhan ketentuan transparansi, kredibilitas kebijakan, dan menjaga persepsi publik dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional

Upaya komunikasi Bank Indonesia diarahkan untuk memenuhi prinsip transparansi, memperkuat kredibilitas kebijakan, serta menjaga persepsi publik melalui penyampaian informasi yang akurat, konsisten, serta inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola yang baik dan profesional, sekaligus memperkuat pemahaman publik terhadap arah kebijakan Bank Indonesia dan pengelolaan ekspektasi di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi. Untuk itu, Bank Indonesia mengoptimalkan kanal komunikasi terpadu, mulai dari pemanfaatan media massa dan media sosial (*above the line*) hingga pelaksanaan konferensi pers, taklimat media, serta forum diskusi mendalam bersama ekonom, akademisi, dan mitra strategis lainnya (*below the line*).

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia telah memperkuat tata kelola informasi dan efektivitas komunikasi melalui serangkaian langkah strategis. Langkah tersebut diawali dengan penyusunan *strategic*

action plan tahunan serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) kepada seluruh satuan kerja. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan *benchmarking* sistem pengelolaan informasi dengan Kementerian/Lembaga, sosialisasi Layanan Informasi Publik (LIP) bersama Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) untuk standardisasi layanan, serta memformulasikan instrumen penilaian monitoring dan evaluasi internal yang komprehensif, guna memastikan bahwa seluruh rangkaian pengelolaan informasi publik tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga efektif dalam mendukung keterbukaan informasi sebagai pilar kepercayaan publik terhadap kebijakan bank sentral.

Di sisi eksternal, Bank Indonesia secara proaktif menjangkau masukan dan perspektif strategis melalui diskusi rutin bulanan bersama *Key Opinion Leaders (KOL)* dalam penyusunan *Economic Views*. Bank Indonesia juga memperkuat diseminasi kebijakan melalui konferensi pers RDG, mengoptimalkan pemanfaatan media massa nasional, serta menyampaikan siaran pers kepada pemangku kepentingan strategis. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia melakukan asesmen terhadap efektivitas penyebarluasan informasi dan pemantauan respons publik di berbagai kanal komunikasi sebagai basis data dalam evaluasi dan penyempurnaan strategi komunikasi secara berkelanjutan.

PS 12 Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional

Di tengah akselerasi transformasi digital termasuk meningkatnya pemanfaatan layanan digital Bank Indonesia serta eksposur terhadap risiko siber, terdapat tuntutan untuk percepatan adopsi teknologi secara terarah dan terintegrasi. Dinamika tersebut diiringi oleh perkembangan regulasi lintas sektor dan meningkatnya kompleksitas pelaksanaan program, termasuk pada lokasi dengan keterbatasan akses, sehingga memerlukan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan yang semakin andal. Kondisi ini menuntut kesiapan kelembagaan yang adaptif, resilien, serta tetap berlandaskan tata kelola yang baik dan profesional.

Dalam merespons tantangan tersebut, Bank Indonesia mempercepat pemanfaatan berbagai teknologi terkini untuk memperkuat kapabilitas, baik pada area kebijakan maupun kelembagaan. Upaya ini didukung melalui penguatan pengelolaan sumber daya, khususnya pada

aset teknologi digital dan aset fisik, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik. Penguatan tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan inovasi digital dan data yang saling terhubung, penyediaan sarana dan prasarana berbasis *modern office* dan *modern living*, serta pengelolaan program secara menyeluruh. Dengan demikian, Bank Indonesia mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus memperkuat ketahanan operasional dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis.

Sepanjang triwulan I 2026, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan, mengembangkan, serta mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan bertata kelola baik dan profesional sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

38) Terwujudnya *modern office* dan *modern living* yang berkualitas, terencana, terintegrasi, dan digital dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional

Dalam rangka mendukung terwujudnya *modern office* dan *modern living*, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan berbagai inovasi dan teknologi serta layanan digital yang *agile*, *resilient*, dan *intelligent* untuk mendukung transformasi pada area kebijakan dan kelembagaan. Pada triwulan I 2026, penyediaan layanan kelogistikan telah dilakukan secara optimal untuk menjaga keberlangsungan operasional berbagai aplikasi kritikal BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, BI-ETP, dan BI-FAST secara kontinu 24/7. Untuk mendukung keandalan layanan tersebut, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi dengan PLN dan pelaksana operasional pemeliharaan sebagai upaya dalam mendukung layanan kelogistikan. Hal ini dicapai antara lain dengan memastikan ketersediaan *supply* daya listrik terjaga serta memastikan kualitas tegangan dan frekuensi listrik dicapai secara optimal melalui instalasi peralatan pendukung kelistrikan pada aplikasi kritikal dan kecukupan ketersediaan solar untuk mendukung peralatan *backup*. Di sisi lain, Bank Indonesia turut menjalin kemitraan strategis dengan PLN, Pertamina, dan mitra lainnya guna memastikan kualitas layanan listrik pada aplikasi kritikal serta peralatan *backup* selalu dalam kondisi yang prima sehingga mendukung operasionalisasi aplikasi dapat berjalan 24/7.

39) Terwujudnya aset teknologi digital yang berkualitas, terencana, terintegrasi, dan andal dalam rangka

mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional

Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan aset teknologi digital guna memastikan layanan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berjalan secara aman, andal, dan sesuai standar layanan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kinerja layanan secara berkala dan peningkatan kapasitas layanan teknologi informasi untuk menjaga ketersediaan dan keberlangsungan layanan digital secara berkelanjutan. Penguatan ini juga diarahkan untuk mencapai tingkat maturitas *IT Service Management* (ITSM) dan maturitas siber pada skala yang optimal. Melalui berbagai upaya tersebut, pengelolaan layanan teknologi digital Bank Indonesia diharapkan semakin adaptif, resilien, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi di tengah akselerasi transformasi digital.

40) Terwujudnya pengadaan untuk pengelolaan aset dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terencana, berkualitas, dan bertata kelola dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan yang bertata kelola baik dan profesional

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat tata kelola pengadaan melalui pengukuran *Procurement Maturity Assessment* (PMA). Pengukuran dilaksanakan oleh pihak eksternal menggunakan model *Procurement Excellence Plus*, sehingga dapat menilai kematangan fungsi pengadaan secara holistik yang mencakup dimensi strategi, operasional, organisasi, dan teknologi. Berdasarkan penilaian pada tahun 2025, Bank Indonesia berhasil menjaga level maturitas pengadaan di level strategis dan proaktif pada berbagai aspek penilaian. Penilaian strategis pada aspek strategi, operasional, dan organisasi mencerminkan pengelolaan pengadaan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Sementara pada 3 *key drivers* aspek teknologi, 1 *key driver* mengalami kenaikan menjadi level strategis sedangkan 2 *key drivers* lainnya berada pada level proaktif, hal ini menunjukkan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pengadaan.

Seiring dengan arah kebijakan digitalisasi Bank Indonesia, saat ini tengah dikembangkan digitalisasi proses bisnis pengadaan secara *end-to-end*. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan *key drivers* aspek teknologi menuju level strategis, sekaligus mendukung transformasi proses pengadaan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya,

dalam mendukung pengadaan yang bertata kelola, Bank Indonesia menerapkan penguatan koordinasi internal dalam rangka penyelesaian pengadaan strategis sesuai rencana sebagaimana strategi simplifikasi, standardisasi, sistemisasi, dan integrasi

pada area pengadaan, *monitoring* berkala melalui laporan pengadaan yang dilakukan secara periodik, serta penyusunan program kerja dan *timeline* untuk pelaksanaan PMA 2026.



BANK INDONESIA

LAMPIRAN



DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, interkoneksi, interoperabilitas yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
3-Smart	Program kepemimpinan Bank Indonesia untuk menciptakan pemimpin yang profesional yang memiliki kompetensi (<i>book smart</i>), berpengalaman (<i>street smart</i>), dan memiliki perilaku mulia (<i>spiritual smart</i>).
<i>Agile</i>	Kemampuan untuk bergerak cepat dan mudah
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, yakni kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan system pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
Bauran Kebijakan Kelembagaan	Penggunaan beberapa kebijakan pada area kelembagaan dengan basis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan/ <i>compliance</i> . Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam memastikan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
BI-Payment Clear dan BI-Payment Info	Infrastruktur untuk mendeteksi anomali transaksi dan potensi fraud di sektor keuangan.
Bank Indonesia – <i>Real-Time Gross Settlement</i>	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Bank Indonesia- <i>Scripless Securities Settlement System</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
<i>Blueprint</i>	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
<i>Business matching</i>	Temu bisnis antarpelaku ekonomi.
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Central Bank Digital Currency</i>	Mata uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.
<i>Central Counterparty</i>	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral <i>netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar.
<i>Countercyclical Capital Buffer (CCyB)</i>	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
<i>Counterparty Line</i>	Jumlah kredit atau limit eksposur yang diberikan oleh satu pihak kepada <i>counterparty</i> dalam transaksi keuangan.
<i>Cross Border</i>	Lintas batas, lintas negara.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan.
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Digital BPR	Pendekatan komprehensif untuk mendesain ulang dan mengoptimalkan proses bisnis berbasis digital dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan beradaptasi, antara lain mencakup aspek pengambilan keputusan, manajemen informasi, <i>digital environment</i> , dan pola kerja.
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>	Kerangka pengawasan yang bersifat <i>forward looking</i> dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet.
Ekonomi dan keuangan hijau	Sistem ekonomi dan keuangan yang mendukung upaya menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan dan/atau iklim.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Electronic Trading Platform</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
<i>Employee Value Proposition</i>	Nilai tambah yang ditawarkan pegawai dan sebagai imbalan atas kontribusi terhadap perusahaan.
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
Festival Ekonomi Syariah (FESyar)	Kegiatan sejenis Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang berskala regional dan nasional serta merupakan kegiatan <i>road to ISEF</i> .
<i>Financial Market Infrastructure (PFMI)</i>	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya.
<i>Financing to Value</i>	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Forward looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter.
Government Shutdown	Penghentian sementara fungsi administrasi pemerintahan akibat kegagalan lembaga legislatif dan eksekutif mencapai kesepakatan terkait pengesahan anggaran negara.
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
Industri Halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar.
IndONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .

ISTILAH	PENJELASAN
Infrastruktur Pasar Uang	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antar sistem terjadi secara tidak langsung.
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)	Acara tahunan Bank Indonesia yang berskala nasional dan internasional dan terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu <i>Sharia Economic Forum</i> dan <i>Sharia Fair</i> . Kegiatan forum terdiri dari seminar/ <i>workshop</i> , sedangkan <i>Sharia Fair</i> merupakan <i>outlet</i> bagi pelaku usaha industri halal, pesantren, Lembaga keuangan, dan lembaga terkait.
<i>Joint Audit</i>	Proses audit keuangan yang dilakukan oleh dua atau lebih firma audit secara bersamaan untuk menilai laporan keuangan suatu entitas.
Keuangan digital	Keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau <i>web</i> melalui pihak ketiga.
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
<i>Loan to Value</i>	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i>	Bentuk kerja sama keuangan bilateral yang lazim dilakukan oleh bank sentral, yang memungkinkan suatu bank sentral untuk mendapatkan valuta asing dari bank sentral mitra dengan cara saling mempertukarkan mata uang lokal masing-masing negara, untuk kemudian dipertukarkan Kembali pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.
<i>Local Currency Transaction</i>	Transaksi bilateral antar dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk mendiversifikasi <i>currency exposure</i> .
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
<i>Market Maker</i>	Pihak yang secara aktif menyediakan likuiditas dengan menawarkan harga beli (<i>bid</i>) dan harga jual (<i>ask</i>) dalam transaksi pasar uang.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Merchant Discount Rate</i>	Tarif yang dikenakan kepada <i>merchant</i> oleh bank.
Mikroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan Lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
<i>Modern Strategic Sourcing</i>	Pendekatan strategis dalam pemilihan dan manajemen pemasok yang mengutamakan efisiensi, inovasi, keberlanjutan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai bisnis serta mengoptimalkan rantai pasok.
<i>Money Market Curve</i>	Kurva yang menggambarkan hubungan antara tenor (jangka waktu) dan suku bunga instrumen pasar uang.
<i>National Driven</i>	Pendekatan atau strategi yang berfokus pada tujuan, kepentingan, dan prioritas suatu negara, dengan dorongan kuat dari pemerintah atau institusi nasional untuk mencapai visi atau target tertentu.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
<i>Net inflows</i>	Selisih antara total kontribusi atau pembelian baru (<i>inflows</i>) dan total penarikan atau penjualan (<i>outflows</i>) dari suatu investasi atau entitas.
<i>Non Performing Loan</i>	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
<i>Outstanding</i>	Jumlah yang masih berjalan, beredar, atau belum lunas dalam suatu instrumen keuangan.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
<i>Primary Dealer</i>	Institusi yang disetujui oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan obligasi pemerintah secara langsung dari pemerintah.
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.
<i>Project Based</i>	Pendekatan kerja yang berfokus pada penyelesaian program dengan tim khusus, batas waktu tertentu, dan hasil yang terukur.
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS)	Standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
QRIS <i>Cross Border</i> /Lintas Negara	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standardisasi infrastruktur setelmen untuk perdagangan lintas batas.
QRIS Tap (NFC)	Sistem pembayaran berbasis teknologi <i>Near Field Communication</i> (NFC) yang memungkinkan pengguna cukup mendekatkan ponsel ke terminal pembayaran tanpa perlu memindai QR code secara manual.
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif
<i>Regional Payment Connectivity</i> (RPC)	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Banko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand.
<i>Regulatory Reform</i>	Proses perubahan, penyempurnaan, atau penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan dalam suatu sektor atau industri.
<i>Repurchase Agreement</i> (Repo)	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
<i>Seamless</i>	Sistem atau proses yang berjalan lancar, otomatis, dan tanpa hambatan.
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga milik Bank Indonesia.

ISTILAH	PENJELASAN
Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI)	Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
<i>Sovereign Credit Rating</i>	Peringkat utang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. <i>Sovereign Credit Rating</i> mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
<i>Spot</i>	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.
Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran (SNAP)	Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
<i>Straight-through</i>	Pemrosesan otomatis yang dilakukan dalam transaksi bisnis
<i>Streamlining</i>	Peningkatan efisiensi suatu proses tertentu dalam suatu organisasi
<i>Stress test</i>	Uji ketahanan.
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah.
<i>Supervisory Technology</i> (Suptech)	Penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung implementasi fungsi pengawasan.
<i>Supplier Relationship Management</i>	Strategi dan proses yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pemasok secara efektif, dengan tujuan meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi risiko, dan menciptakan nilai tambah dalam bisnis.
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<i>Swap</i>	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.

ISTILAH	PENJELASAN
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (<i>mitra kerja</i>) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.
<i>Triple Intervention</i>	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar <i>spot</i> , penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
<i>White Paper</i>	Laporan atau panduan yang ditulis secara mendalam untuk menginformasikan secara ringkas tentang suatu permasalahan dan solusinya.
<i>Yield</i>	Imbal hasil.

DAFTAR SINGKATAN

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas
3S	Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
3P + 1I	<i>Product, Pricing, Pelaku</i> dan Infrastruktur
4P	Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, Pemeliharaan
ACC-BIS	The Council dari Asian Consultative Council – Bank for International Settlement
AI	Artificial Intelligence
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATL	<i>Above The Line</i>
BTL	<i>Below The Line</i>
BIDIC	Bank Indonesia-Digital Innovation Center
BI-ETP	Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-FAST	Bank Indonesia – <i>Fast Payment</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>

ISTILAH	PENJELASAN
BI-SSSS	Bank Indonesia- <i>Scriptless Securities Settlement System</i>
BIS	Bank for International Settlements
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BNM	Bank Negara Malaysia
BoP	<i>Balance of Payments</i>
BoT	Bank of Thailand
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
BPPUR	<i>Blueprint</i> Pengelolaan Uang Rupiah 2024-2030
BPR	Business Process Reengineering
BSP	Bangko Sentral ng Pilipina
BSPI	<i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
CBDC	<i>Central Bank Digital Currency</i>
CBUAE	Bank Sentral Uni Emirat Arab
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
DC	Data Center
DHE SDA	Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
DMP	<i>Decision Making Process</i>
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>

ISTILAH	PENJELASAN
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DU	Dealer Utama
DWP	<i>Digital Workplace Platform</i>
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EKDA	Ekonomi dan Keuangan Daerah
EMEAP	Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks
ERB	Ekspedisi Rupiah Berdaulat
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
EVP	<i>Employee Value Proposition</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Question</i>
FDS	<i>fraud detection system</i>
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FFR	<i>Fed Funds Rate</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKDOP	Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan
G20	Group of Twenty
GEBER PK	Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen
GIRU	<i>Global Investor Relation Unit</i>

ISTILAH	PENJELASAN
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
HLM	<i>High Level Meeting</i>
IEKB	Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKNB	Institusi Keuangan Non-Bank
IKRA	Industri Kreatif Syariah
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	International Monetary Fund
IN2MOTION Fest	Indonesia International Modest Fashion Festival
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
IndONIA	Indonesia Overnight Index Average
INFRATANI	Integrated Farming with Information Technology and Society
IRU	<i>Investor Relation Unit</i>
IHT	<i>In House Training</i>
ISDA	<i>International Swaps and Derivatives Association</i>
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ITSM	<i>Information Technology Service Management</i>
JIBOR	<i>Jakarta Interbank Offered rate</i>

ISTILAH	PENJELASAN
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
K/L	Kementerian/Lembaga
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KKI	Kartu Kredit Indonesia
KKI	Kerja Sama Keuangan Internasional
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KOPERBI	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LGA	Listrik-Gas-Air
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LSB	Lembaga Selain Bank
LU	Lapangan Usaha
MAS	Monetary Authority of Singapore
MBG	Makanan Bergizi Gratis
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
ML	<i>Machine Learning</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MuBI	Museum Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia

ISTILAH	PENJELASAN
NCCD	<i>Non Centrally Cleared Derivative</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
NWGBR	<i>National Working Group on Benchmark Reform</i>
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PCPM	Pendidikan Calon Pegawai Muda
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
Pemda	Pemerintah Daerah
PFMI	<i>Principles for Financial Market Infrastructures</i>
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PKS	Perjanjian Kerja Sama

ISTILAH	PENJELASAN
PMA	<i>Procurement Maturity Assessment</i>
PMK	Program Meningkatkan Kompetensi
PMK	Protokol Manajemen Krisis
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PoC	<i>Proof of Concept</i>
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
QRISTUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	<i>Regional Investor Relation Unit</i>
RPC	<i>Regional Payment Connectivity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RRH	Rata-Rata Harian
SAL	Saldo Anggaran Lebih

ISTILAH	PENJELASAN
SBC	<i>Structured Bilateral Cooperation</i>
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBN	Surat Berharga Negara
SBV	State Bank of Vietnam
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
Simkrisnas	Simulasi Krisis Nasional
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	Standar Nasional <i>Open API</i>
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPIP	Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia
SP-PUR	Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSKI	Statistik Sistem Keuangan Indonesia
STP	<i>Straight Through Processing</i>
SupTech	<i>Supervisory Technology</i>
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
ToT	<i>Training of Trainer</i>
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah

ISTILAH	PENJELASAN
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UE	Uang Elektronik
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
ULE	Uang Layak Edar
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UU	Undang-Undang

ISTILAH	PENJELASAN
UU P2SK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VITAL	<i>Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning</i>
VF	<i>Volatile Food</i>
WB	World Bank
WTE	<i>Waste to Energy</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	<i>Year on Year</i>





Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id